



PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH



Dr. Sunardi, SE.,MM

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Dr. Sunardi, S.E., MM



Penerbit : CV. Zenius Publisher

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Dr. Sunardi, S.E., MM

Editor: Puput Dani Prasetyo Adi

Januari 2023

Size: 210 x 297 mm, 107 pages.

ISBN : 978-623-5264-21-9

Published by: CV. Zenius Publisher

Anggota IKAPI Jabar

Jalan Waruoyom-Depok- Cirebon 45155,

Email : zenius955@gmail.com

Telp: (0231)8829291

Web. zeniuspublisher.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang. Tidak ada bagian dari publikasi ini yang boleh direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan, atau ditransmisikan, dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman, atau lainnya, kecuali untuk dimasukkannya kutipan singkat dalam ulasan, tanpa terlebih dahulu izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena Rahmat dan HidayahNya, Penulis dapat menyelesaikan Buku ini yang berjudul **“Penanggulangan Kemiskinan Daerah”**. Kami panjatkan terimakasih kepada kedua orangtua penulis, berkat kasih sayangnya dan doanya yang membuat penulis mendapatkan berbagai kemudahan dan keberhasilan dalam hidup, yang salah satunya dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Kami haturkan terimakasih kepada rekan-rekan di Universitas Merdeka Malang, mulai dari Jajaran rektorat, mulai Ketua Yayasan Universitas Merdeka Malang, Bapak Kol. (Purn) H. Toegino Sokarno, SE, Rektor Prof.Dr.Anwar Sanusi, S.E., M.Si., Wakil Rektor 1. Dr. Sukardi, M.Si, Wakil Rektor 2 Dr.Prihat Assih, Wakil Rektor 3. Dr. Rudi Haryanto, dan semua kalangan yang membantu dalam penulisan buku ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Buku ini akan membahas tentang kondisi kemiskinan di daerah atau gambaran umum daerah dan proses penanggulangan kemiskinan dengan melihat satu faktor *performance* dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Untuk itu secara spesifik, anda yang membaca buku ini akan mendapatkan informasi penting tentang landasan hukum penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD), data luas wilayah, jumlah desa/kelurahan dan jumlah dusun, sehingga dapat membandingkan jumlah penduduk dari setiap dusun dan juga membandingkan tingkat penduduk miskin di daerah tersebut. juga kondisi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ada di daerah (TKPKD) dalam tugasnya melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Kemudian mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (Program, anggaran, dan regulasi) dalam penanggulangan kemiskinan daerah. Dan mengetahui tentang keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah.

Saya sangat mengharapkan buku ini dapat dibaca oleh setiap kalangan, sehingga setiap kalangan baik akademisi, praktisi, mahasiswa, maupun umum mendapatkan manfaat dari adanya buku ini, minimal mengetahui dan dapat menganalisis tentang kondisi kemiskinan di suatu daerah dan langkah –langkah tepat yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan khususnya di daerah.

Malang, 20 Januari 2023

Dr. Sunardi., SE., MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	ix

BAB I. KEMISKINAN DI INDONESIA

1.1	Pengertian dan Latar Belakang Kemiskinan	1
1.2	Usaha penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial RI.....	3
1.3	Usaha penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi kasus di Jombang)	6
1.4	Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)	8
1.5	Landasan Hukum tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)	8

BAB II. KEMISKINAN DI INDONESIA

2.1.	Gambaran Umum Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Jombang).....	11
2.2.	Gambaran Demografis	13
2.3.	Gambaran Ekonomi Daerah.....	14
2.3.1.	Struktur Ekonomi	14
2.3.2.	Pertumbuhan Ekonomi.....	16
2.3.3.	Tingkat Inflasi	21
2.4.	Kondisi Kemiskinan Multidimensi	22
2.4.1.	Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan.....	22
2.4.2.	Persentase Penduduk Miskin.....	22
2.4.3.	Jumlah Penduduk Miskin.....	25
2.4.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	26
2.4.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan	28
2.4.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	30
2.4.7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	34
2.4.8.	Analisis Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan.....	35
2.5	Dimensi Pendidikan	37
2.5.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan.....	38
2.5.2	Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan	44
2.5.3	Analisis Prioritas Bidang Pendidikan.....	45
2.6	Dimensi Kesehatan.....	47
2.6.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan	48
2.6.2	Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional	52
2.6.3	Analisis Prioritas Bidang Kesehatan.....	53
2.7	Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar	55
2.7.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Prasarana Dasar.....	55
2.7.2	Capaian indikator Prasarana/Infrastruktur Dasar terhadap Provinsi dan Nasional .	57
2.7.3	Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar	58
2.8	Dimensi Ketahanan Pangan	59
2.8.1	Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan.....	59
2.8.2	Capaian indikator Ketahanan Pangan terhadap Provinsi	61

2.8.3 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan.....	62
---	----

BAB III. TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah	65
3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi	66
3.3 Efektivitas Perkembangan APBD Kabupaten Jombang	68
3.4 Komposisi Anggaran Belanja Sektoral	70
3.4.1 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan	73
3.4.2 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan.....	75
3.4.3 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar.....	79
3.4.4 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan	81
3.4.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan	83

BAB IV. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.....	86
4.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.....	92

BAB V. KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	94
5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah.....	94
5.1.2 Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat.....	96
5.2 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.....	97
5.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat	98

BAB VI. PENUTUP

6.1 Prioritas Intervensi Sektoral.....	100
6.2. Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Belanja	103
6.3. Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan.....	105

DAFTAR PUSTAKA	106
PROFIL PENULIS	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Masyarakat Miskin.....	1
Gambar 2. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 1	3
Gambar 3. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 2	4
Gambar 4. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 3	4
Gambar 5. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 4	5
Gambar 6. Program Keluarga Harapan (PKH)	5
Gambar 7. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)	6
Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang.....	11
Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang.....	13
Gambar 10. Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2019.....	16
Gambar 11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019	18
Gambar 12. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2019	19
Gambar 13. Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	20
Gambar 14. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019.....	21
Gambar 15. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	22
Gambar 16. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019	23
Gambar 17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	23
Gambar 18. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kabupaten Jombang)	24
Gambar 19. Relevansi Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019.....	25
Gambar 20. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	26
Gambar 21. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	26
Gambar 22. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	27
Gambar 23. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	27
Gambar 24. Relevansi Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019.....	28
Gambar 25. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	29
Gambar 26. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	29
Gambar 27. Relevansi Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019.....	30
Gambar 28. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019	31
Gambar 29. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang	

terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019	32
Gambar 30. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	33
Gambar 31. Relevansi Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2019	33
Gambar 32. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang, 2015-2019	34
Gambar 33. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019	35
Gambar 34. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	36
Gambar 35. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	38
Gambar 36. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	39
Gambar 37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	40
Gambar 38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	41
Gambar 39. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	42
Gambar 40. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019.....	42
Gambar 41. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019	44
Gambar 42. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	47
Gambar 43. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019.....	48
Gambar 44. Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	49
Gambar 45. Perkembangan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	51
Gambar 46. Perkembangan Persalinan Ditolong oleh Tenaga Medis (%) Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019.....	52
Gambar 47. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	55
Gambar 48. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	59
Gambar 49. Produksi Padi Kabupaten Jombang (Ton) Tahun 2015-2019.....	60
Gambar 50. (a,b,c) Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	62
Gambar 51. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 ..	65
Gambar 52. Analisis Efektivitas Perkembangan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang.....	69
Gambar 53. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Jombang ..	73
Gambar 54. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	74
Gambar 55. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	76

Gambar 56. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	77
Gambar 57. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	79
Gambar 58. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Dasar terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	80
Gambar 59. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019	81
Gambar 60. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	82
Gambar 61. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019.....	83
Gambar 62. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Dusun di Kabupaten Jombang.....	12
Tabel 2. Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015-2019 Kabupaten Jombang	14
Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (Persen) ADKH 2010 Tahun 2015- 2019 Kabupaten Jombang	16
Tabel 4. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019	44
Tabel 5. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Kesehatan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019	53
Tabel 6. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Tahun 2017-2019	56
Tabel 7. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019	57
Tabel 8. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Tahun 2015-2019	60
Tabel 9. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur, Tahun 2019.....	61
Tabel 10. Realisasi APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	64
Tabel 11. Proporsi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019.....	66
Tabel 12. Proporsi Komponen PAD Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2019	66
Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2018 ...	67
Tabel 14. Proporsi Komponen Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	68
Tabel 15. Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019	70
Tabel 16. Proporsi Anggaran Belanja Bidang Intervensi terhadap APBD Kabupaten Jombang	72
Tabel 17. Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023.....	87
Tabel 18. Matrik Hubungan Strategi dan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023.....	89
Tabel 19. Program dan Indikator Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023.....	89
Tabel 20. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jombang.....	91
Tabel 18. Perkembangan antar waktu dari indikator bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar	100

BAB I

KEMISKINAN DI INDONESIA

1.1 Pengertian dan Latar Belakang Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu faktor penghambat suatu perkembangan daerah, kemiskinan terjadi diberbagai wilayah diindonesia, banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan terjadi diberberapa daerah, salah satunya adalah dampak dari Pandemic COVID-19 yang menyerang selama 2 tahun di 2020-2021 perekonomian diindonesia tergoncang, sampai di bulan maret 2022 ini tingkat kemiskinan secara keseluruhan nasional adalah 9,54%. Ini menunjukkan bahwa masih tinggi tingkat kemiskinan di Indonesia dan diberberapa daerah diindonesia, walaupun lebih baik daripada yang dialami negara-negara lainnya. Dan ini harus segera diselesaikan dengan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minimal adalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, vitamin, dan yang bukan makan yang dihitung sebagai pengeluaran rutin.



Gambar 1. Masyarakat Miskin (sumber: detik.com)

Guna mempercepat penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang isinya antara lain adalah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah Daerah secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka pengurangan jumlah penduduk miskin khususnya di

tingkat daerah. Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, ketidak berdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia. Kemiskinan adalah permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan di Indonesia telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan hukum, rasa aman, kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan yang terjangkau, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang layak, keadilan, partisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik. Kemiskinan harus diakui memang terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara bangsa, bahkan hampir seluruh energi dihabiskan hanya untuk mengurus persoalan kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan untuk penanggulangan kemiskinan. Guna meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Pada Peraturan Presiden nomor 166 Tahun 2014 pasal 1 poin kedua menyebutkan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

1.2 Usaha penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Sosial RI

Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Sosial yang ditunjukkan pada gambar 2 – 7, antara lain:

1. Perluasan Target dan kenaikan anggaran program (Program KPM dan Program Keluarga Harapan).
2. Transformasi Penyaluran Bantuan Sosial dan subsidi secara Non Tunai.
3. Integrasi Bantuan Sosial dan Subsidi didasarkan pada data terpadu.
4. Memastikan perubahan perilaku positif KPM melalui pendampingan sosial.



Gambar 2. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 1 (sumber: kemsos.go.id)

Empat Langkah Strategis Menekan Angka Kemiskinan

2. Transformasi Penyaluran Bansos dan Subsidi Secara Non Tunai

- 2016** • Bantuan berupa Beras Sejahtera (Rastra) untuk **15,6 juta keluarga**
- 2017** • Transformasi bertahap dari Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 2019** • Seluruh bansos pangan telah beralih ke BPNT yakni **15,6 juta keluarga**

PKH dan BPNT disalurkan Non Tunai menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Penyaluran bantuan secara non tunai agar
 Tepat sasaran, Tepat administrasi, Tepat jumlah,
 Tepat manfaat, Tepat waktu dan Tepat kualitas

#ProduktifSejahtera #BansosUntukRakyat

kemsos.go.id @KemososRI @kemososri @kemososri

Gambar 3. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 2 (sumber: kemsos.go.id)

Empat Langkah Strategis Menekan Angka Kemiskinan

3. Integrasi Bansos dan Subsidi Didasarkan pada Data Terpadu

Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dimutakhirkan secara berkala oleh pemda melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dan ditetapkan oleh Menteri Sosial

Data Terpadu yang valid dan termutakhirkan menjadi rujukan bagi berbagai program bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat dan daerah

Data Terpadu menjadi rujukan pengambilan keputusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

#ProduktifSejahtera #BansosUntukRakyat

kemsos.go.id @KemososRI @kemososri @kemososri

Gambar 4. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 3 (sumber: kemsos.go.id)



Gambar 5. Langkah strategis Mengurangi angka kemiskinan tahap 4 (sumber: kemosos.go.id)



Gambar 6. Program Keluarga Harapan (PKH) (sumber: kemosos.go.id)



Gambar 7. Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) (sumber: kemosos.go.id)

1.3 Usaha penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi kasus di Jombang)

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta percepatan pembangunan daerah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Namun, pengentasan permasalahan kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari Pemerintah, melainkan masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, selama 5 (lima), angka kemiskinan Kabupaten Jombang terus mengalami penurunan. Tahun 2015 angka kemiskinan Kabupaten Jombang sebesar 10,79% menurun menjadi 10,48% di tahun 2017 dan menjadi 9,22% di tahun 2019 (Data per April 2020). Persentase capaian ini masih lebih rendah dari capaian propinsi yang sebesar 12,34% tahun 2015, sebesar 11,77% tahun 2017, dan sebesar 10,37% tahun 2019. Sedangkan angka kemiskinan nasional tahun 2015 sebesar 11,13% turun menjadi 10, 12% tahun 2017, dan terakhir menjadi 9,41% tahun 2019. Sehingga diperlukan percepatan upaya penanggulangan kemiskinan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Dari hal tersebut, maka pemantauan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang sedang berjalan menjadi penting untuk diberlakukan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 10 tahun 2020 tentang APBD Perubahan Kabupaten Jombang tahun 2020,

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 14 tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No 1 tahun 2020 tentang RPJMD kabupaten Jombang tahun 2018-2023, arahan dari Undang-Undang no 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah, dan Peraturan Menteri Sosial No 10 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan dana terpadu program penanganan fakir miskin, dalam upaya menurunkan tingkat angka kemiskinan sesuai target penurunan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di daerah sangat tergantung pada komitmen, kemampuan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta didukung dengan anggaran yang memadai. Penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana dengan baik jika seluruh stakeholder saling bekerja sama dan bersinergi dengan baik tidak hanya peran pemerintah tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat secara aktif. Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan agar menciptakan integritas nasional sesuai UUD 1945. Untuk itu penting untuk mengetahui sejauhmana capaian indikator di dalam program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jombang melalui TKPKD dalam penanggulangan kemiskinan agar dapat melakukan rencana tindak lanjut ke depan melalui program-program yang inovatif, strategis, menyeluruh dan berkelanjutan yang akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan secara signifikan, dengan hal tersebut akan menjadikan sebagai indikator yang sangat penting dalam pembangunan wilayah Kabupaten Jombang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jombang Tahun 2020. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) ini merupakan laporan pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan koordinasi antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, yang diatur dalam Bab Hubungan Kerja dan Tata Kerja, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

1.4 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Jombang Tahun 2020 ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauhmana capaian pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai kelompok bidang dan indikator-indikatornya baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan program maupun anggaran belanja di Kabupaten Jombang. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a) Mengetahui kondisi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang dalam menyelenggarakan tugas koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.
- b) Mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan (program, anggaran dan regulasi) penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.
- c) Mengetahui keberhasilan pencapaian penanggulangan kemiskinan di daerah.

1.5 Landasan Hukum tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Studi Kasus Kabupaten Jombang)

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 34
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- d) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
- e) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- g) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -2019;

- h) Instruksi Presiden No.1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;
- i) Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- k) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- l) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;

BAB 2

KEMISKINAN DI INDONESIA (STUDI KASUS: KABUPATEN JOMBANG)

2.1. Gambaran Umum Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Jombang)

Kabupaten Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak pada koridor tengah wilayah Provinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah mencapai 1.115,09 Km² atau menempati sekitar 2,5 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Batas wilayah Kabupaten Jombang meliputi :

- ❑ Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- ❑ Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri
- ❑ Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk
- ❑ Sebelah Timur : Kabupaten Malang



Gambar 8. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Jombang (BAPPEDA Kabupaten Jombang Tahun 2019)

Secara astronomi wilayah Kabupaten Jombang terletak di sebelah selatan khatulistiwa berada antara terletak antara 7.20' 48,60" dan 7.46' 41,26" Lintang Selatan serta antara 1120 03' 46,57" dan 1120 27' 21,26" Bujur Timur seperti ditunjukkan pada Peta Gambar 8.

Tabel 1
Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Jumlah Dusun
di Kabupaten Jombang

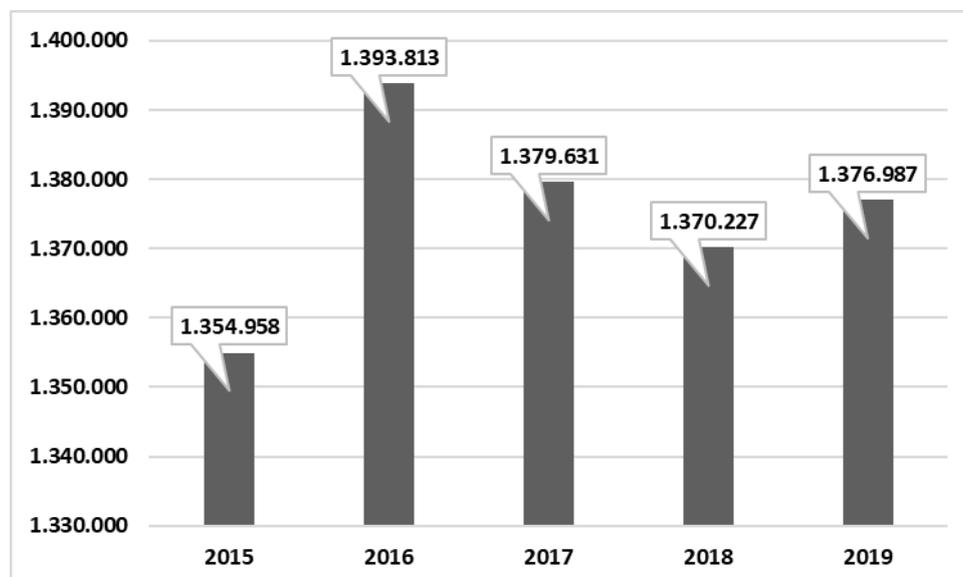
No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun
1	Bandarkedungmulyo	32,50	11	42
2	Perak	29,05	13	36
3	Gudo	34,39	18	75
4	Diwek	47,70	20	100
5	Ngoro	49,86	13	82
6	Mojowarno	78,62	19	68
7	Bareng	94,27	13	50
8	Wonosalam	121,63	9	48
9	Mojoagung	60,18	18	60
10	Sumobito	47,64	21	76
11	Jogoroto	28,28	11	46
12	Peterongan	29,47	14	56
13	Jombang	36,40	20	72
14	Megaluh	28,41	13	41
15	Tembelang	32,94	15	65
16	Kesamben	51,72	14	61
17	Kudu	77,75	11	47
18	Ngusikan	34,98	11	39
19	Ploso	25,96	13	50
20	Kabuh	97,35	16	87
21	Plandaan	120,40	13	57
	Jumlah	1.159,50	306	1.258

Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, Tahun 2019

Secara administrasi, Kabupaten Jombang terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Peta wilayah administrasi Kabupaten Jombang tersaji dalam gambar 8. Luasan wilayah kecamatan dan jumlah desa/dusun pada masing-masing kecamatan tersaji dalam Tabel 1. Berdasarkan data tersebut Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas dengan luas 121,63 Km² dan memiliki 9 desa dan 48 dusun. Sedangkan Kecamatan Ploso merupakan kecamatan dengan wilayah yang terkecil dengan luas 25,96 Km² dan memiliki 13 Desa dan 50 Dusun.

2.2. Gambaran Demografis

Penduduk Kabupaten Jombang Pada Tahun 2019 Berdasarkan Hasil Pencatatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Berjumlah 1.376.987 Jiwa, Terdiri Atas 693.272 Jiwa Penduduk Laki-Laki (50,34%) Dan 683.715 Jiwa Penduduk Perempuan (49,66%). Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Jombang tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada gambar 9. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Jombang meningkat sebesar 6.760 jiwa atau 0,49% jika dibandingkan dengan penduduk pada tahun 2018 yang berjumlah 1.370.227 jiwa. Penduduk Kabupaten Jombang Pada Tahun 2019 didominasi oleh penduduk usia produktif (umur 15-76 tahun) mencapai 77,20 persen. sedangkan penduduk usia muda (usia dibawah 15 tahun) sebesar 22,80 persen.



Gambar 9. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Jombang Tahun 2015 –2019 (Jiwa) (Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, 2019)

2.3. Gambaran Ekonomi Daerah

Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan mengetahui struktur ekonomi suatu daerah yang antara lain dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan per-kapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, dan perkembangan laju inflasi.

2.3.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat dilihat melalui komposisi peranan masing-masing lapangan usaha/kategori terhadap nilai PDRB (produk Domestik Regional Bruto) maupun komposisi peranan sub-kategori terhadap kategorinya. Gambaran secara lengkap distribusi persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha (persen) tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

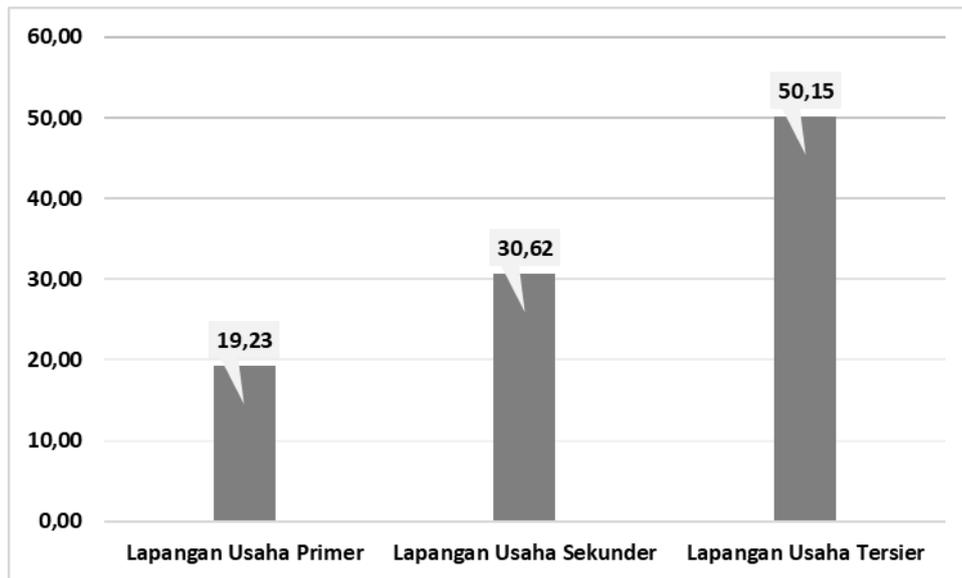
Tabel 2
Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Persen)
Tahun 2015-2019 Kabupaten Jombang

Kategori	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,20	21,29	20,10	19,41	18,59
B	Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,68	0,67	0,66	0,64
C	Industri Pengolahan	19,83	19,65	19,92	20,12	19,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09
F	Konstruksi	9,61	9,90	10,31	10,66	10,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,07	22,82	23,46	23,73	24,40
H	Transportasi dan Pergudangan	1,12	1,13	1,14	1,21	1,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,17	2,29	2,38	2,34	2,42

Kategori	Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB Tahun (%)				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
J	Informasi dan Komunikasi	6,21	6,26	6,27	6,25	6,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,57	2,63	2,60	2,62	2,60
L	Real Estate	1,98	2,01	2,01	2,00	2,06
M,N	Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,27	0,27	0,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,42	3,36	3,26	3,20	3,23
P	Jasa Pendidikan	5,27	5,19	5,07	5,01	5,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	0,81	0,83	0,84	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,59	1,58	1,54	1,52	1,53
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara; ** Angka Sangat Sementara
 Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2019

Struktur ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2019 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Industri pengolahan; dan (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ketiga lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 62,75 persen. Sedangkan lapangan usaha dengan kontribusi paling kecil yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 0,09 persen, dan kategori Pengadaan Listrik, dan Gas sebesar 0,07 persen.



Gambar 10. Struktur Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2019

Jika dilihat berdasarkan kelompok lapangan usaha, kontribusi lapangan usaha primer (kategori A dan B), yaitu kelompok lapangan usaha yang mengandalkan sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jombang sebesar 19,23 persen. Kelompok lapangan usaha sekunder (kategori C, D, E, dan F) yang merupakan kelompok lapangan usaha yang memproduksi barang berkontribusi sebesar 30,62 persen. Sedangkan kontribusi di kelompok lapangan usaha tersier (kategori G sampai dengan U), yaitu lapangan usaha yang bergerak di bidang produksi jasa memberikan kontribusi sebesar 50,15 persen, dengan penyumbang terbesar pada kelompok ini adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 24,40 persen. Kondisi tersebut lebih jelas dapat dilihat pada gambar 10.

2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang menurut lapangan usaha pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif yang dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi menurut Lapangan Usaha (Persen) ADKH 2010 Tahun 2015-2019 Kabupaten Jombang

Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,02	1,72	0,66	1,84	0,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,36	2,26	4,14	2,10	2,22
C	Industri Pengolahan	5,27	5,27	6,03	5,84	2,63

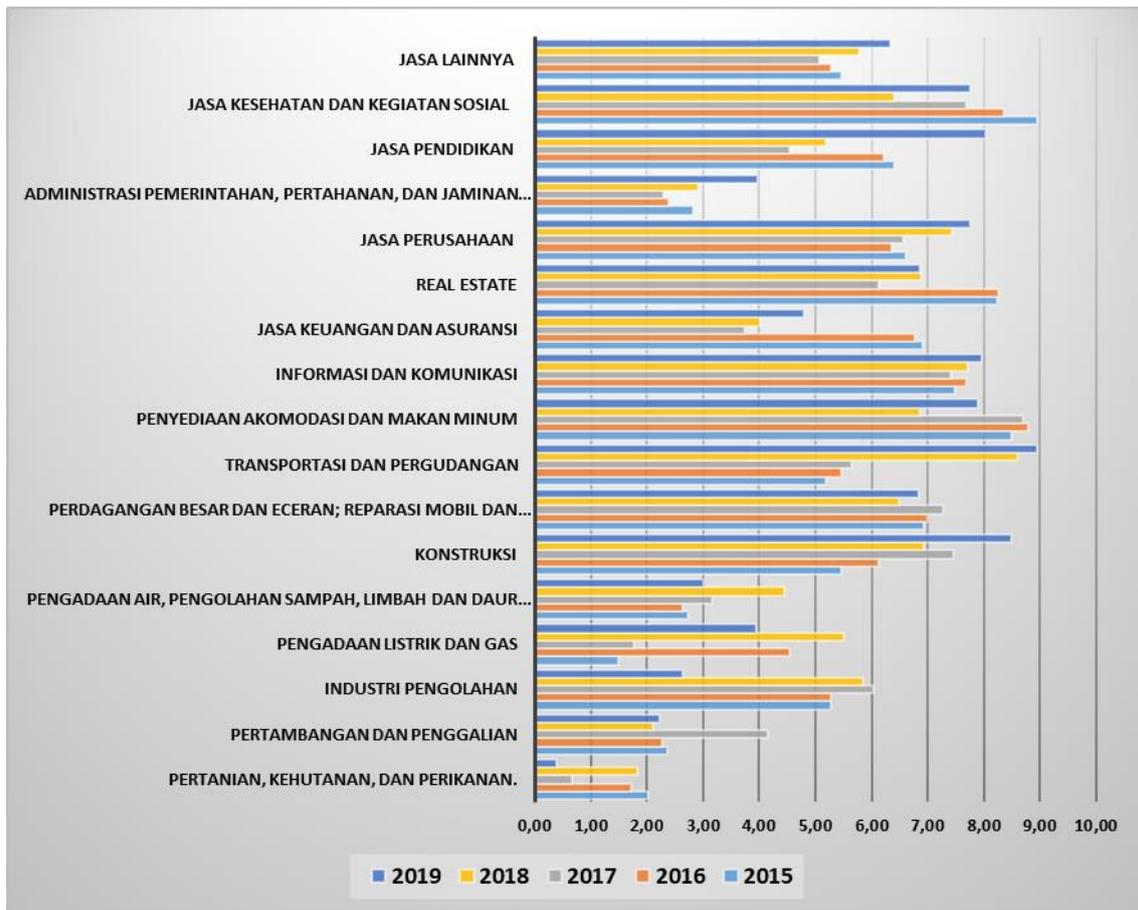
Kategori	Lapangan Usaha	Pertumbuhan Ekonomi Tahun				
		2015	2016	2017	2018*	2019**
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,18	1,53	1,76	5,50	3,94
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,72	2,63	3,17	4,44	3,00
F	Konstruksi	5,47	6,12	7,45	6,94	8,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,93	6,99	7,28	6,50	6,83
H	Transportasi dan Pergudangan	5,18	5,45	5,65	8,60	8,94
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,48	8,79	8,69	6,85	7,90
J	Informasi dan Komunikasi	7,49	7,69	7,42	7,71	7,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,90	6,77	3,74	4,02	4,80
L	Real Estate	8,24	8,26	6,12	6,88	6,87
M,N	Jasa Perusahaan	6,60	6,36	6,56	7,43	7,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,39	2,28	2,90	3,97
P	Jasa Pendidikan	6,41	6,22	4,53	5,18	8,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,96	8,36	7,69	6,39	7,76
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,47	5,28	5,06	5,78	6,33
Produk Domestik Regional Bruto		5,36	5,40	5,36	5,44	5,06

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Jombang Tahun 2019

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,94 persen disusul lapangan usaha Konstruksi 8,49 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,04 persen. Lapangan usaha lainnya yang mencatat pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang adalah: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,97 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,90 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,76 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 6,87 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,83 persen serta lapangan usaha Jasa lainnya sebesar 6,33 persen.



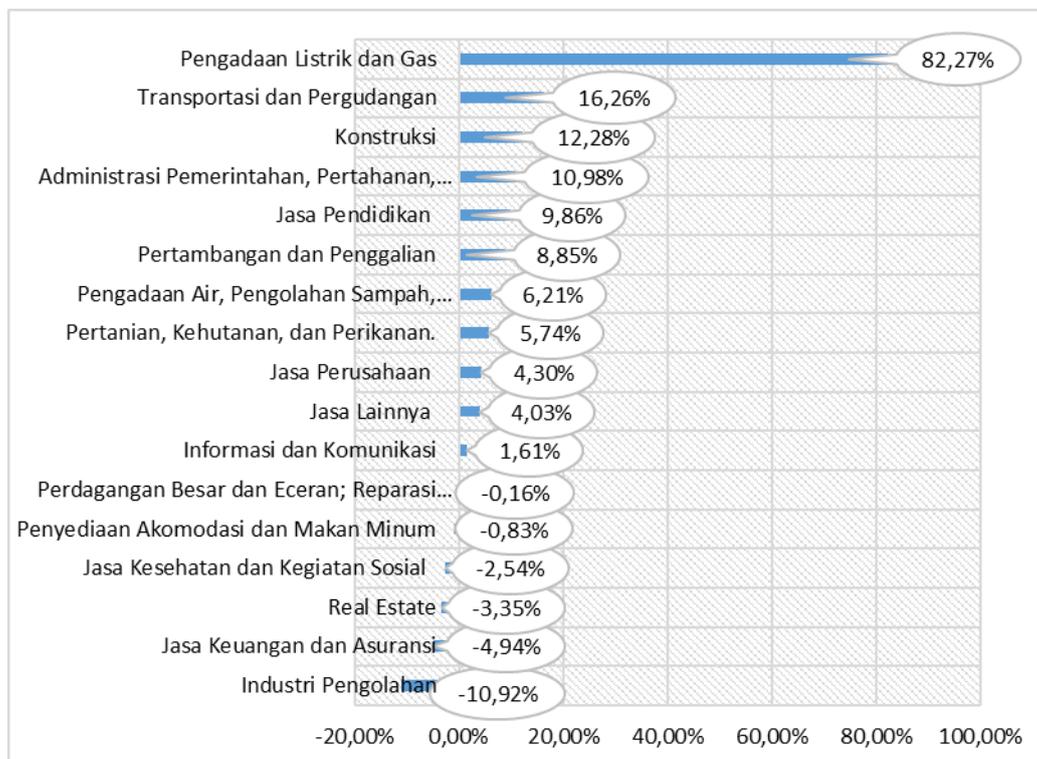
Gambar 11. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

Sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang adalah: lapangan usaha Jasa keuangan dan Asuransi sebesar 4,80 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,97 persen, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,94 persen, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,00 persen, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2,63 persen, lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 2.22 persen serta terakhir lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,38 persen. Meskipun Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang selama tahun 2015-2019 mengalami perkembangan yang menggembirakan namun tidak seluruh lapangan usaha yang ada di Kabupaten Jombang menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Gambaran tentang kondisi tersebut sebagaimana gambar 11.

Lapangan usaha di Kabupaten Jombang yang mengalami penurunan pertumbuhan secara rata-rata selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 berjumlah 6 (enam) sektor lapangan usaha, yaitu: sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar -10,92 persen, Jasa

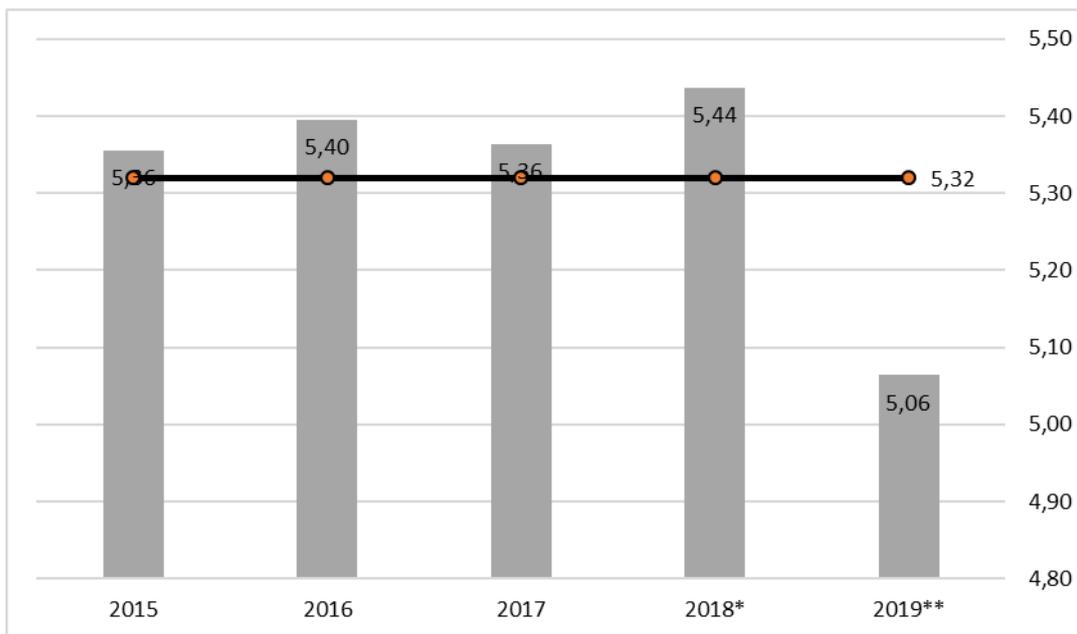
Keuangan dan Asuransi sebesar – 4,94 persen, Real Estate sebesar – 3,35 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar – 2,54 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar - 0,83 persen dan sektor lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar – 0,16 persen.

Perkembangan ekonomi Kabupaten Jombang dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jombang pada kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 5,06 persen, melambat dibanding tahun 2018 yang sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 secara keseluruhan mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata 5,32 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 5,35 persen, pada tahun 2016 naik sebesar 0,05 persen menjadi 5,4 persen, pada tahun 2017 turun sebesar 0,04 persen menjadi 5,36 persen, pada tahun 2018 naik sebesar 0,08 persen menjadi 5,44 persen, dan pada tahun 2019 turun sebesar 0,38 persen menjadi 5,06 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 13.



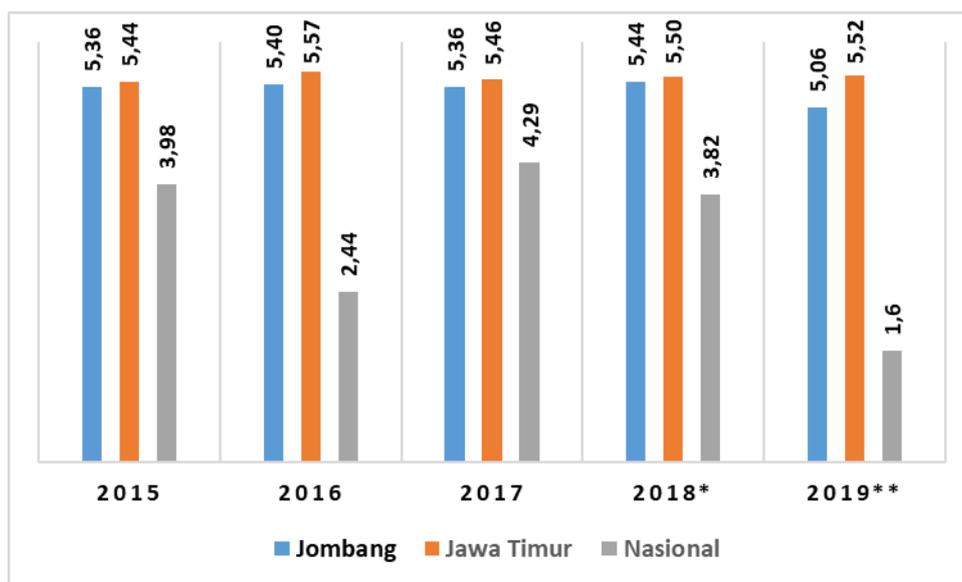
Gambar 12. Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha, Tahun 2015-2019

Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang untuk periode tahun 2015-2019 lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang lebih tinggi 0,02 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi 0,47 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang lebih rendah 0,13 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi 0,38 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional.



Gambar 13. Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kabupaten Jombang (data diolah))

Pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang lebih rendah 0,09 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan lebih rendah 0,31 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang lebih rendah 0,07 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi 0,26 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang lebih rendah 0,46 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi 3,46 persen dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional. Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 14.



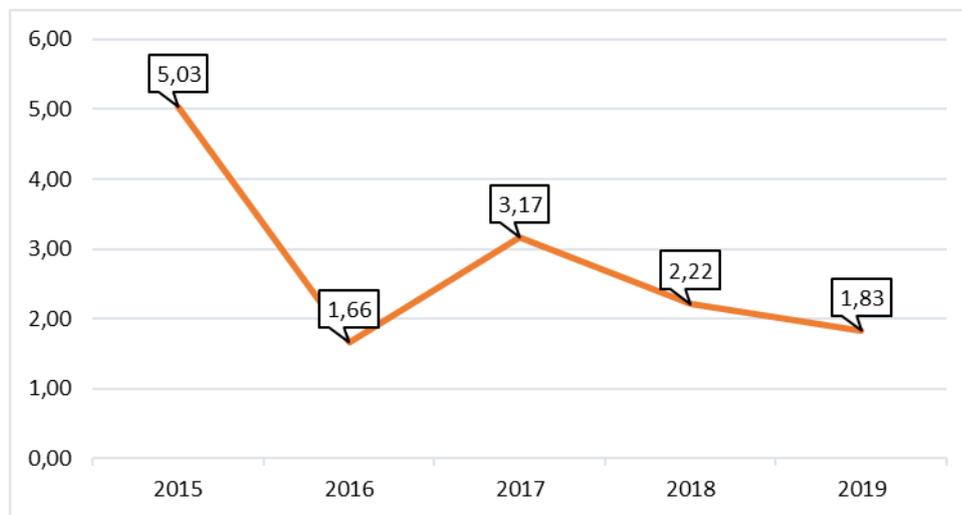
Gambar 14. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019 (Sumber Data: BPS (data diolah))

Indikator ekonomi berikutnya yang penting untuk mengetahui perkembangan pendapatan daerah dalam hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan regional yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan kesejahteraan rakyat. Kondisi pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Jombang selama periode tahun 2015-2018 semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pendapatan per kapita tahun 2015 berdasarkan PDRB ADHK tahun 2010 sebesar 18,50 juta Rupiah pada tahun 2016 sebesar 19,40 juta Rupiah, tahun 2017 sebesar 20,35 juta Rupiah, dan tahun 2018 sebesar 21,36 juta Rupiah. Dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita yang cukup signifikan selama periode tahun 2015-2018 ini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Jombang selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan.

2.3.3. Tingkat Inflasi

Salah satu indikator perekonomian makro adalah angka inflasi di suatu daerah. Pada tahun 2018 tingkat inflasi Kabupaten Jombang sebesar 1,83 persen. Rata-rata inflasi di Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2015-2019 sebesar 2,78 persen per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Jombang masuk dalam kategori *low inflation* atau inflasi satu digit. Fluktuasi tingkat inflasi Kabupaten Jombang dapat dilihat dari tahun 2015 tingkat inflasi turun sebesar 0,08 persen menjadi 5,03 persen pada tahun 2015.

Pada tahun 2016, tingkat inflasi turun 3,37 persen menjadi 1,66 persen. Pada tahun 2017, tingkat inflasi naik 1,5 persen menjadi 3,17 persen. Pada tahun 2018, tingkat inflasi turun 0,95 persen menjadi 2,22 persen dan pada tahun 2019 tingkat inflasi turun 0,39 persen menjadi 1,83 persen. Perkembangan inflasi Kabupaten Jombang tahun 2015-2018 dapat dilihat pada gambar 15.



Gambar 15. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kabupaten Jombang (data diolah))

Dari perkembangan tingkat inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga yang terjadi pada tahun 2019 jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan inflasi yang menurun (membaik) di tahun 2019 secara tidak langsung akan memberi dampak bagi perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.

2.4. Kondisi Kemiskinan Multidimensi

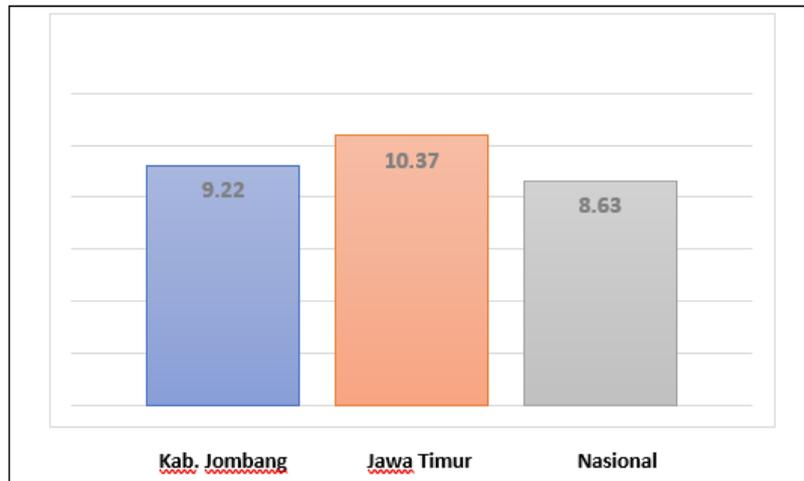
2.4.1. Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi di Kabupaten Jombang adalah dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

2.4.2 Persentase Penduduk Miskin

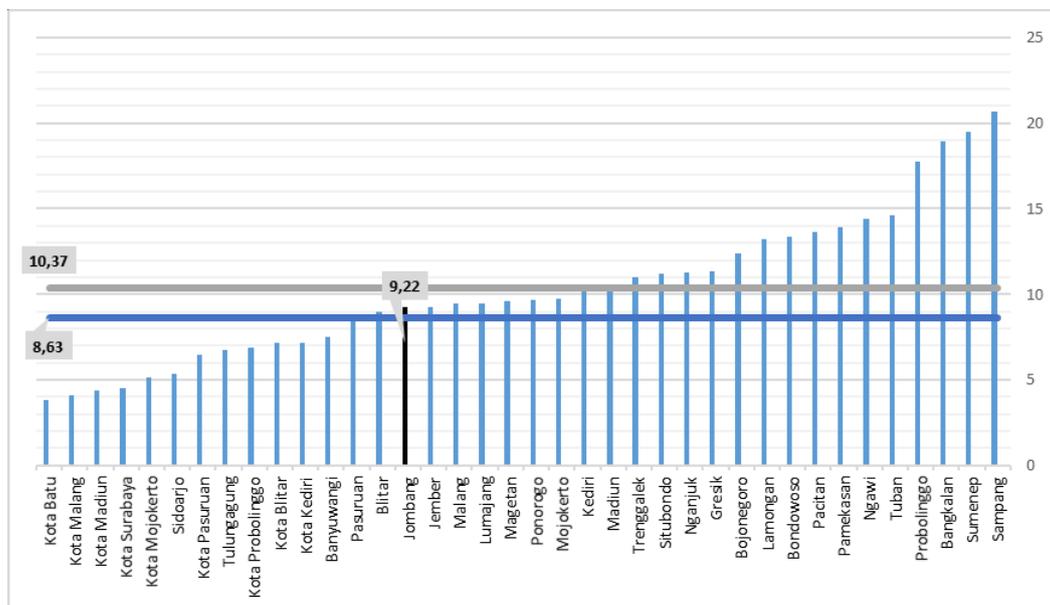
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 9,22 persen, mengalami penurunan sebesar 3,56 persen jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018. Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur maupun

Nasional pada tahun yang sama dimana persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,37 persen sedangkan persentase penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 8,63 persen, maka persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan berada di atas capaian Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator persentase penduduk di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator yang sama di Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

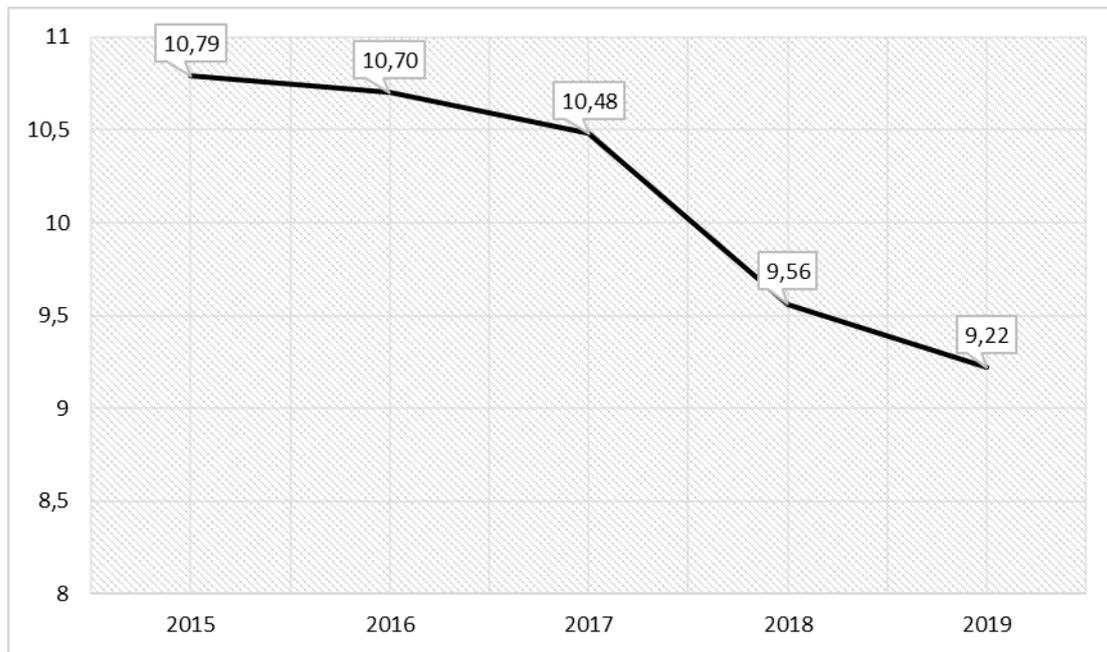


Gambar 16. Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 (Sumber: BPS (data diolah))

Sementara diantara 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2019) menempati urutan ke 15 dari yang terendah.



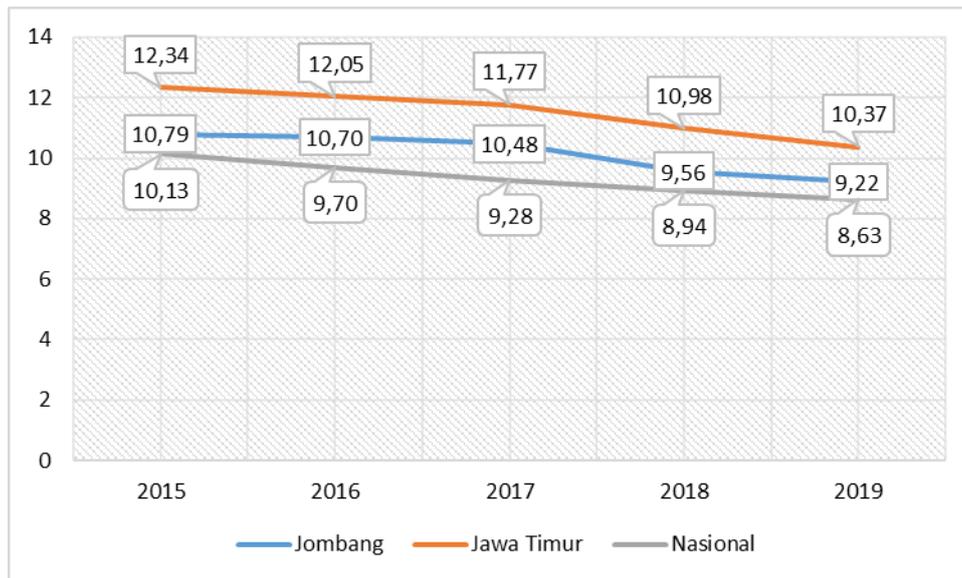
Gambar 17. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 (Sumber: BPS (data diolah))



Gambar 18. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS Kabupaten Jombang (data diolah))

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019 menunjukkan *trend* menurun dengan rata-rata penurunan persentase penduduk miskin sebesar 3,81 persen per tahun.

Perkembangan tingkat kemiskinan dengan *trend* menurun tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka menurunkan persentase penduduk miskin dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka kemiskinan. Selama periode 2015-2019, perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang menunjukkan *trend* yang sama (relevan) dengan perkembangan di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun memiliki *trend* yang relevan, akan tetapi rata-rata penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang sebesar 3.81 persen, masih lebih rendah dari rata-rata penurunan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4.24 persen dan 3.93 persen untuk rata-rata penurunan di tingkat Nasional.

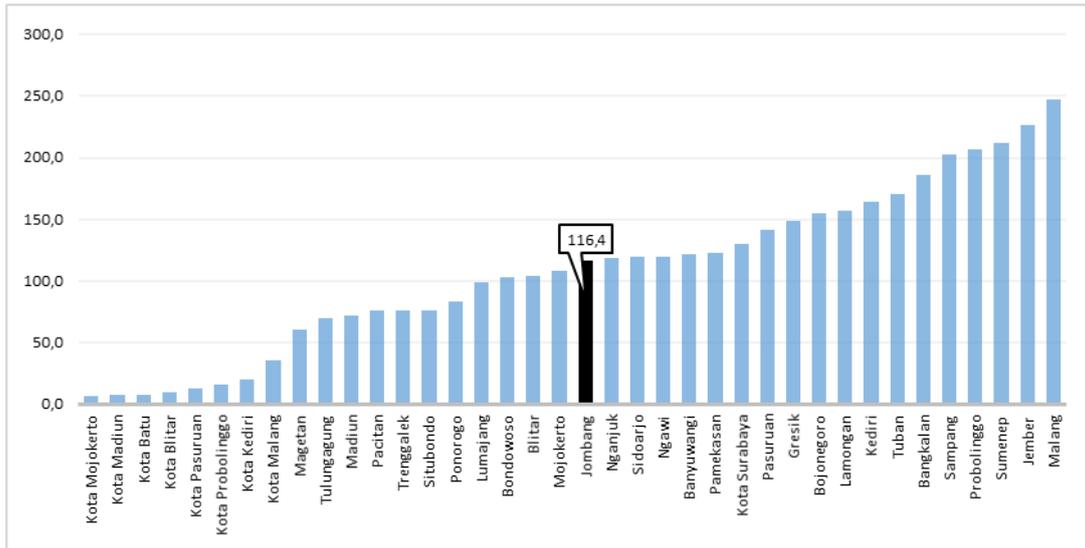


Gambar 19. Relevansi Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019 (Sumber: BPS (data diolah))

Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan relevansi antara perkembangan di Kabupaten Jombang dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indikasi bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jombang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan melakukan sinkronisasi program-program kemiskinan agar terarah, efektif dan tepat sasaran baik dengan Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Pusat dan bantuan-bantuan lainnya baik berupa hibah maupun bantuan lainnya yang mendukung pengentasan kemiskinan.

2.4.3 Jumlah Penduduk Miskin

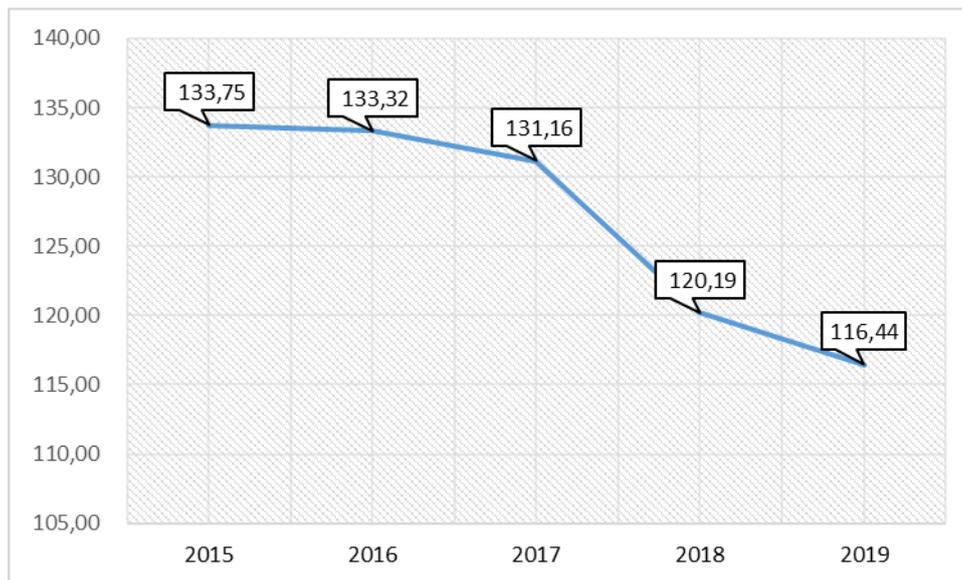
Dengan prosentase kemiskinan sebesar 9,22 persen, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebanyak ±116,44 ribu jiwa. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar ±4.112,25 ribu jiwa dan penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar ±24.785,8 ribu jiwa. Dengan demikian Kabupaten Jombang pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 2,83 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan sebesar 0,47 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional. Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif Kabupaten Jombang pada tahun 2019 menempati urutan ke 20 (Dua Puluh) dari yang terendah.



Sumber: BPS (data diolah)

Gambar 20. Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama tahun 2015-2019, menunjukkan perkembangan angka secara keseluruhan menunjukkan *trend* yang menurun.



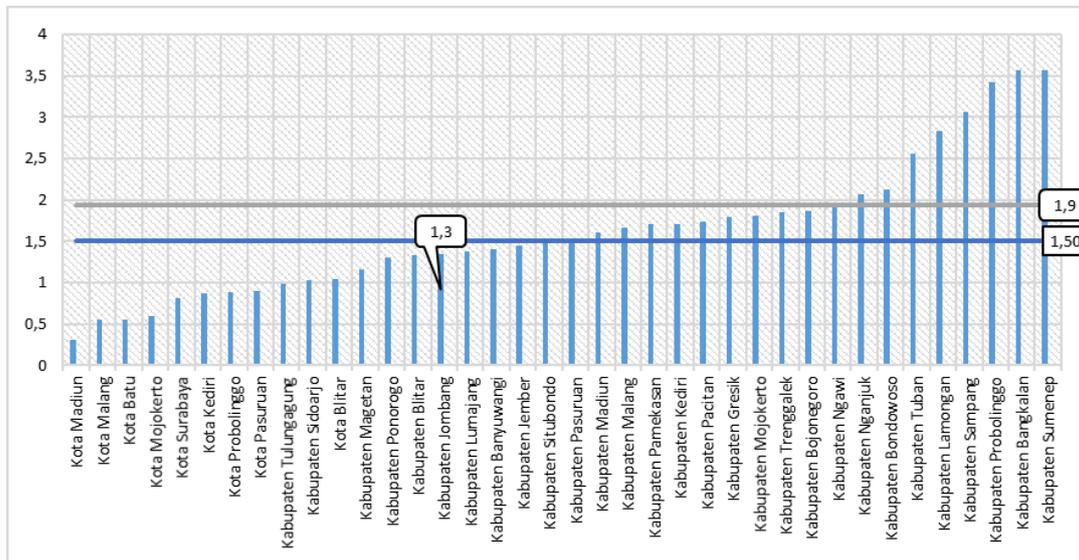
Sumber: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 21. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

2.4.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 1,34 mengalami penurunan sebesar 0,43 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,94 sedangkan

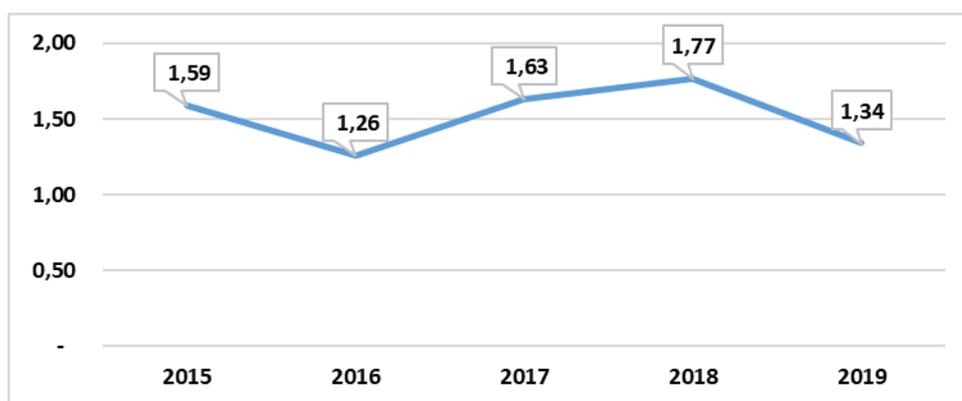
indeks kedalaman kemiskinan secara Nasional sebesar 1,50. Capaian indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Jombang lebih rendah (lebih baik) karena berada di bawah tingkat kesenjangan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 berada pada posisi ke 15 (lima belas) dari yang terendah.



Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 22. Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

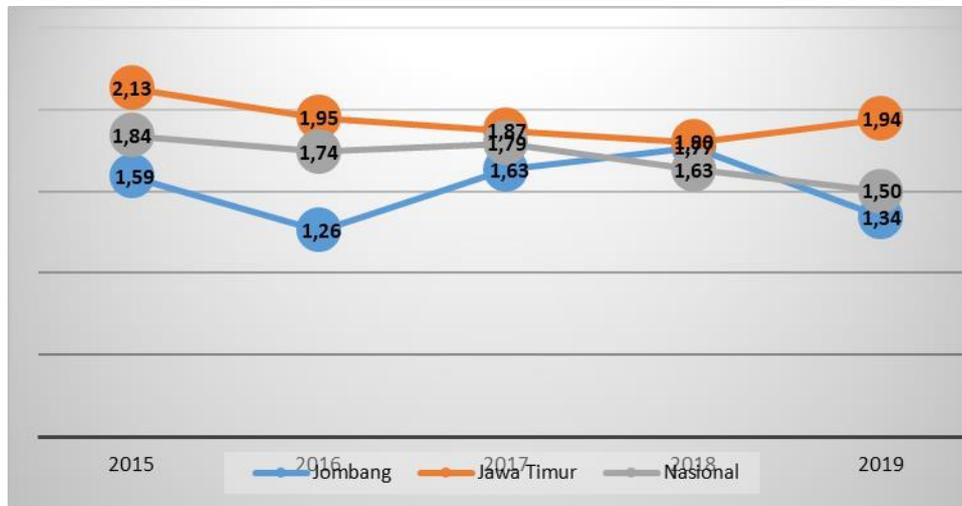
Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019, menunjukkan perkembangan yang bersifat fluktuatif dengan *trend* perkembangan secara keseluruhan menunjukkan *trend* menurun.



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 23. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan *trend* menurun, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun ke tahun semakin membaik. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dapat berjalan efektif dan berdampak positif.



Sumber Data: BPS (data diolah)

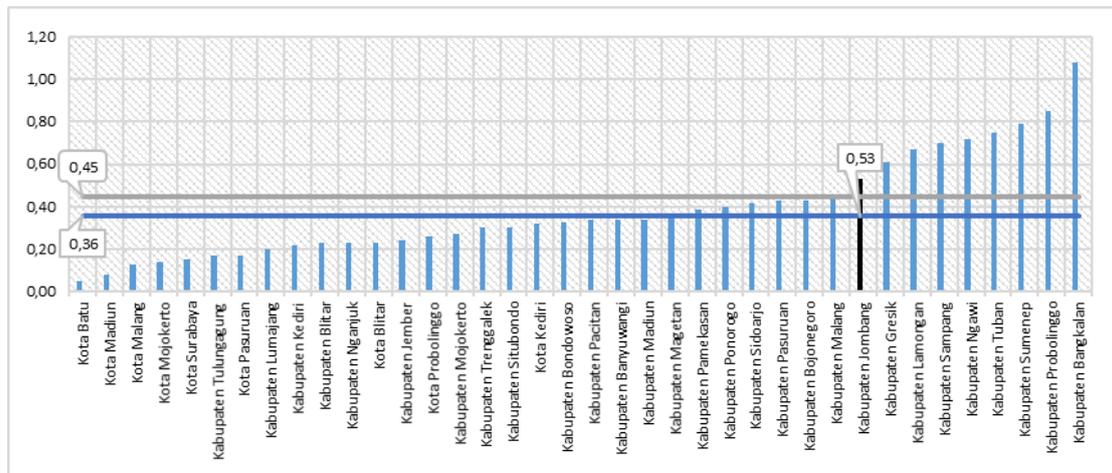
Gambar 24. Relevansi Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Selama periode 2015-2019, *trend* perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan *trend* yang sama (relevan) dengan perkembangan secara Nasional. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan relevansi antara perkembangan di Kabupaten Jombang dengan tingkat Nasional menjadi petunjuk bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkecil nilai indeks kedalaman kemiskinan melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun secara Nasional.

2.4.5 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,53 mengalami peningkatan sebesar 0,23 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun yang sama indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,37 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 0,36, maka dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Jombang masih lebih buruk karena berada di atas tingkat kesenjangan di Tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Diantara Kabupaten/Kota

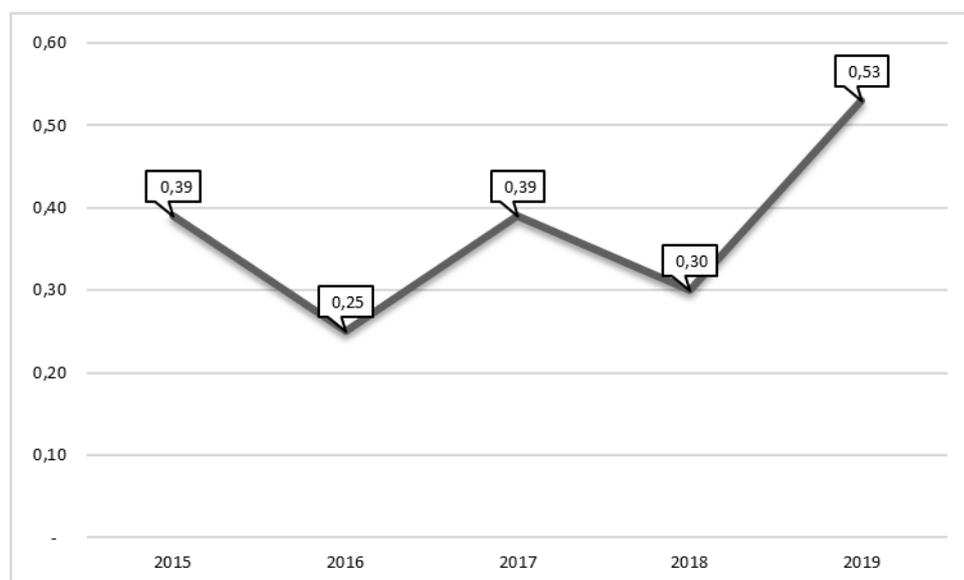
di Provinsi Jawa Timur, tingkat ketimpangan pengeluaran antara penduduk miskin Kabupaten Jombang pada tahun 2019 berada pada posisi ke 30 (tiga puluh) dari yang terendah.



Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 25. Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif dengan *trend* perkembangan secara keseluruhan menunjukkan *trend* yang meningkat (memburuk).



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 26. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan *trend* meningkat, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di Kabupaten Jombang semakin memburuk. Dengan demikian kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin belum berjalan efektif dalam mempersempit kesenjangan antar penduduk miskin di Kabupaten Jombang. Selama periode 2015-2019, *trend* perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan kondisi yang berbeda dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional.



Sumber Data: BPS (data diolah)

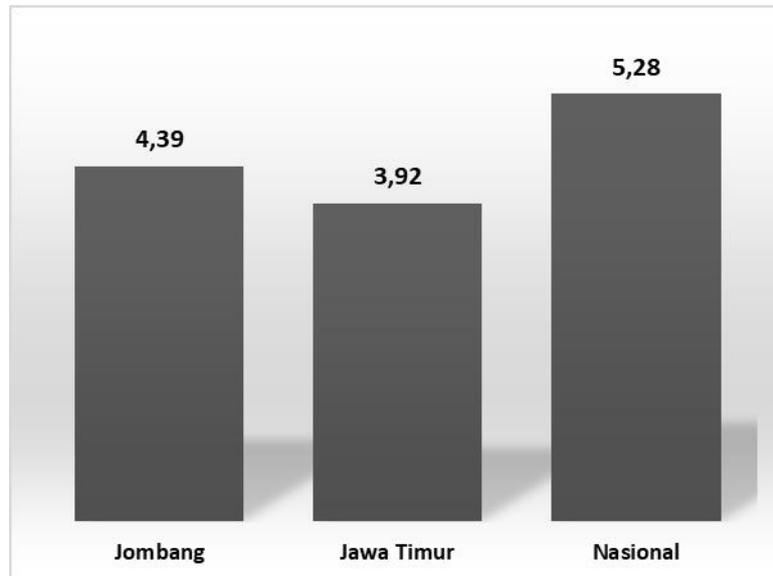
Gambar 27. Relevansi Capaian Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015-2019

Perkembangan indeks keparahan kemiskinan antara perkembangan di Kabupaten Jombang dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam memperkecil nilai indeks keparahan kemiskinan melalui program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan cukup relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi/nasional.

2.4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 4,39 persen, mengalami penurunan sebesar 0,356 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018. Bila melihat capaian Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur maupun secara Nasional, di mana pada tahun yang sama persentase TPT di

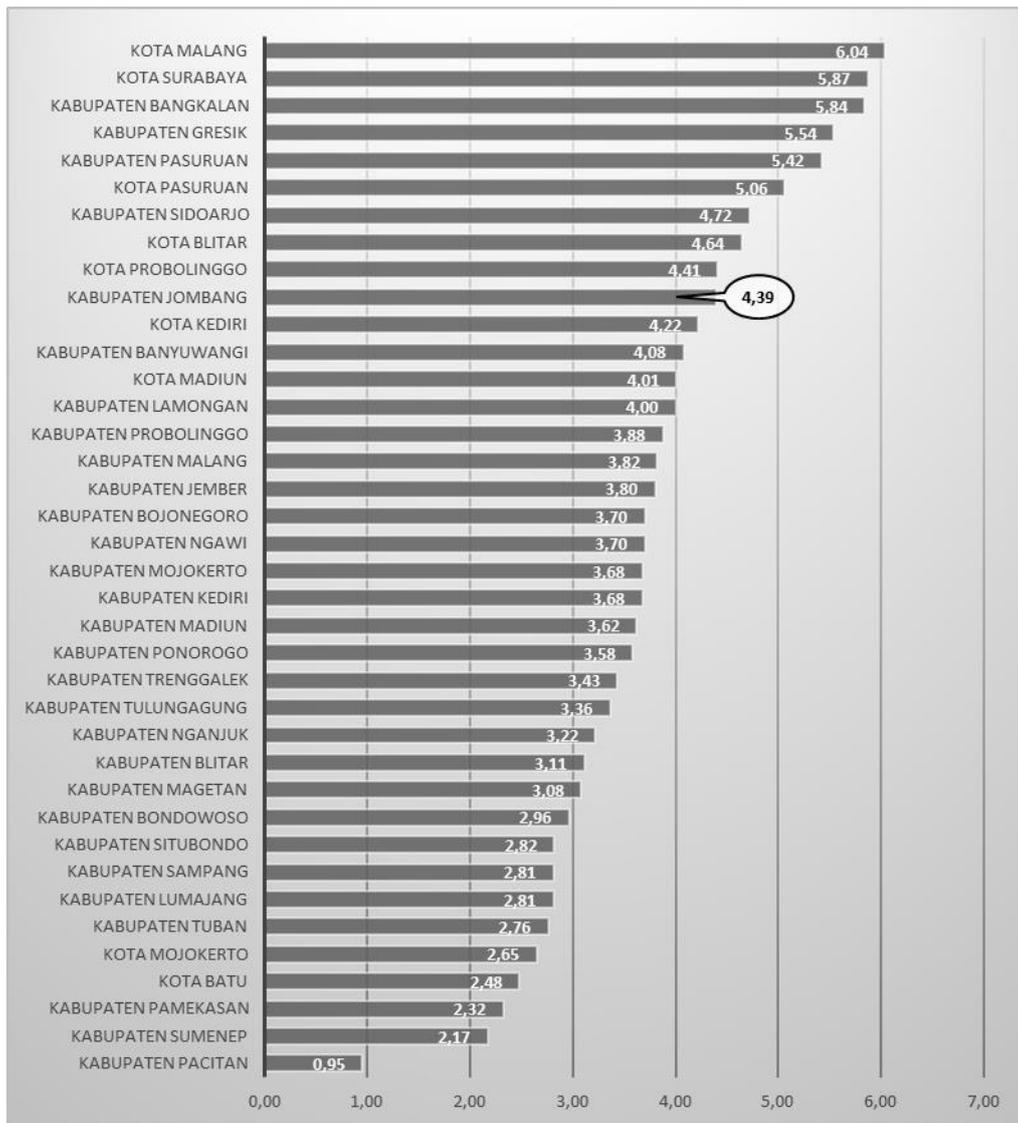
Provinsi Jawa Timur sebesar 3,92 persen sedangkan secara Nasional adalah sebesar 5,28 persen, maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang masih lebih buruk karena berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur namun masih lebih baik dari capaian Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional.



Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 28. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019

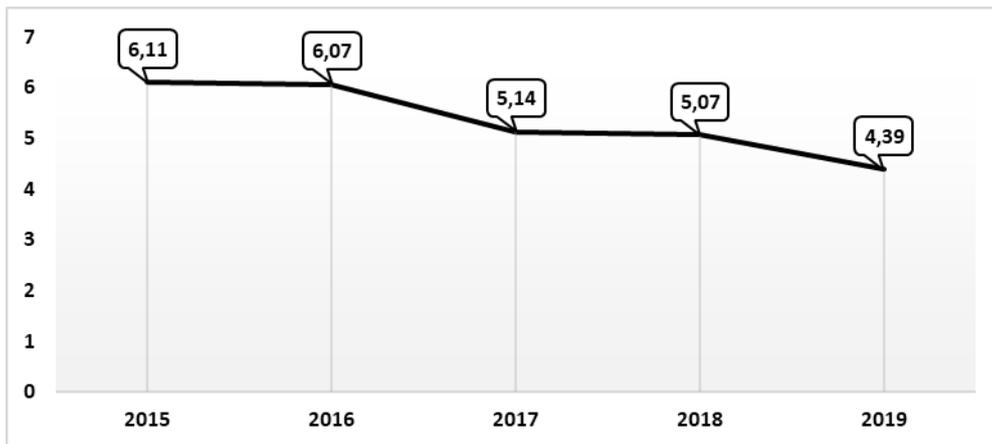
Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 menempati urutan ke 29 dari yang Tingkat Pengangguran Terbuka terendah.



Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 29. Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019

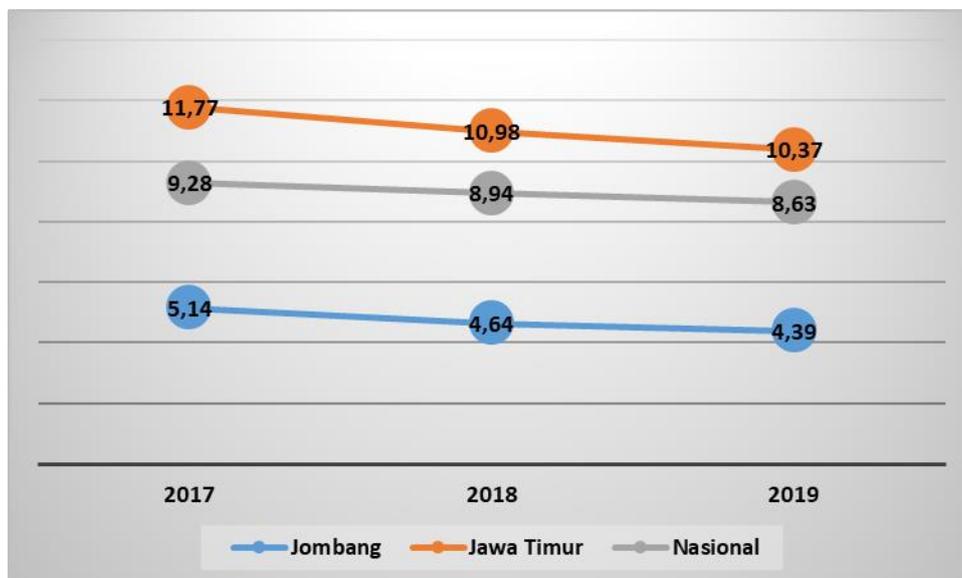
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang selama tahun 2017-2019, menunjukkan perkembangan dengan *trend* secara keseluruhan yang menurun (membaik).



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 30. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jombang ini tentu menjadi informasi bahwa kebijakan maupun program yang telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran telah dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang. Selama periode 2015-2019, capaian perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Jombang menunjukkan *trend* yang sama (relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.

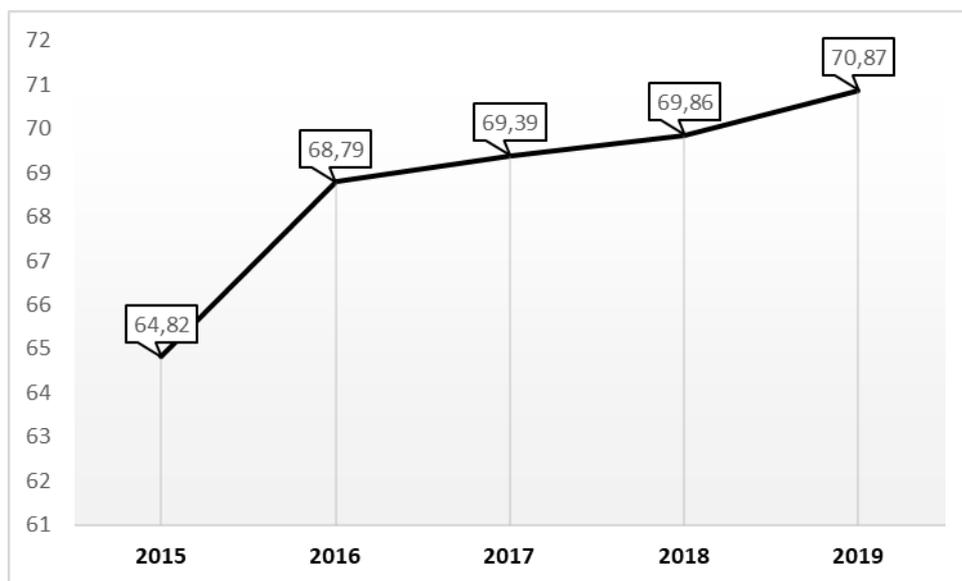


Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 31. Relevansi Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2019

2.4.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

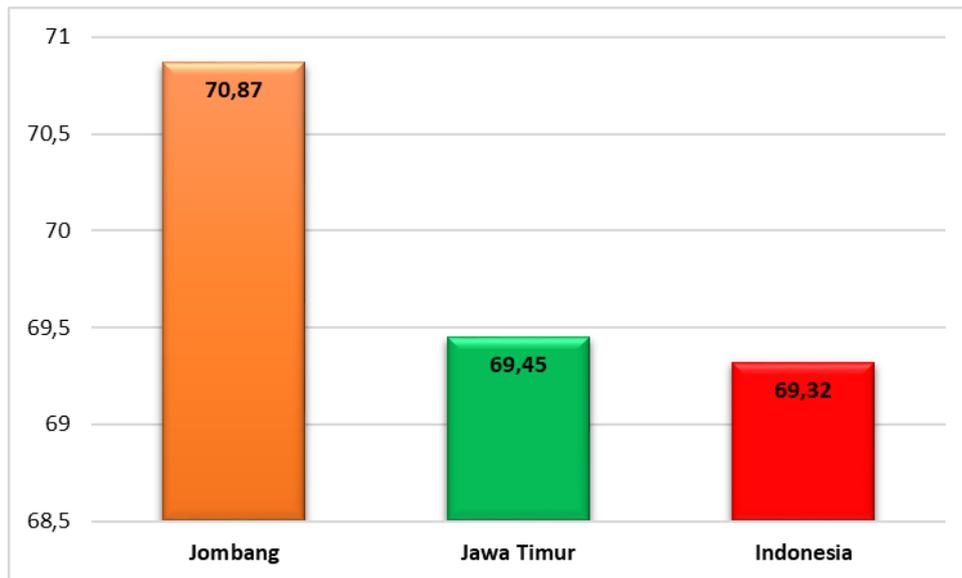
Indikator bidang ketenagakerjaan yang juga menjadi tolak ukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Rata-rata peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Jombang per tahun sebesar 1,51 persen. Pada tahun 2015 tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jombang sebesar 64,82 persen. Pada tahun 2016 meningkat sebesar 3,97 persen menjadi 68,79 persen. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 0,6 persen menjadi 69,39 persen. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 0,47 persen menjadi 69,86 persen. Pada tahun 2019 meningkat sebesar 1,01 persen menjadi 70,87 persen. Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Jombang dapat dilihat pada gambar 32.



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 32. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang, 2015-2019

Posisi relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang pada tahun 2019 berada 1,42 poin di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jawa Timur sebesar 69,45 persen dan berada 1,55 poin di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara nasional yang sebesar 69,32 persen sebagaimana ditunjukkan pada gambar 33.



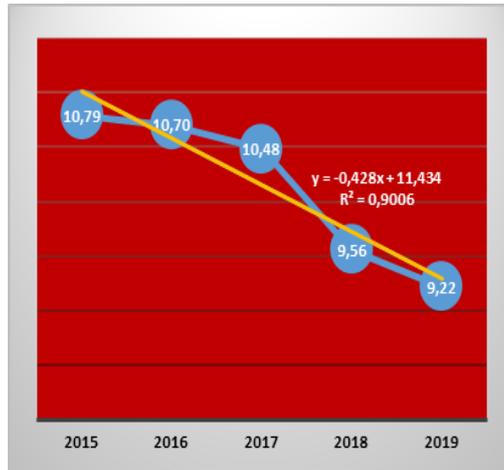
Sumber Data: BPS (data diolah)

Gambar 33. Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Tahun 2019

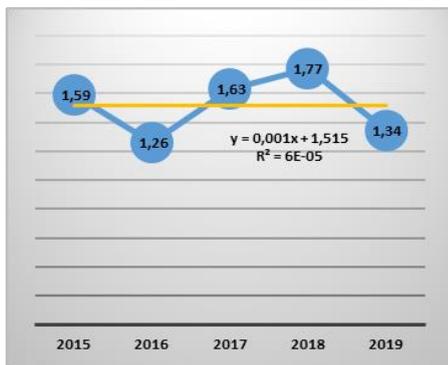
2.4.8 Analisis Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Analisis prioritas bidang kemiskinan Kabupaten Jombang, nampak perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah belum sejalan dengan perkembangan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan karena adanya perkembangan capaian dari tahun sebelumnya. Dengan demikian juga menunjukkan rendahnya keterkaitan dari indikator tersebut yang ditunjukkan dengan perkembangan indikator tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang tidak konsisten dengan indikator indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indikator yang terutama masih memerlukan prioritas penanganan adalah pada indikator indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang, yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Jombang.

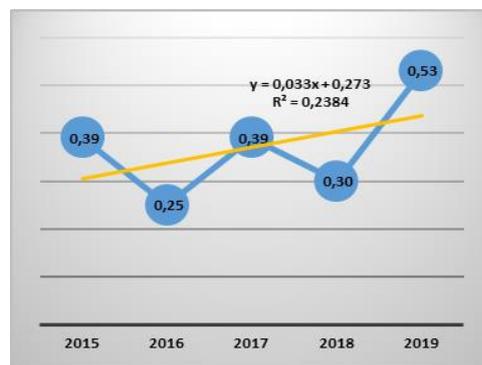
Sementara di bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, nampak perkembangan indikator tingkat kemiskinan adalah konsisten dengan perkembangan bidang ketenagakerjaan yang ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja karena adanya perkembangan capaian dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa faktor pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kemiskinan. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Jombang yang konsisten meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.



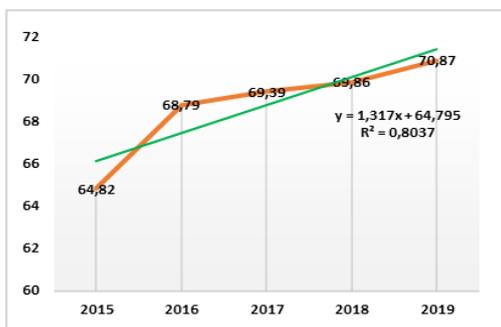
(a) Persentase Penduduk Miskin



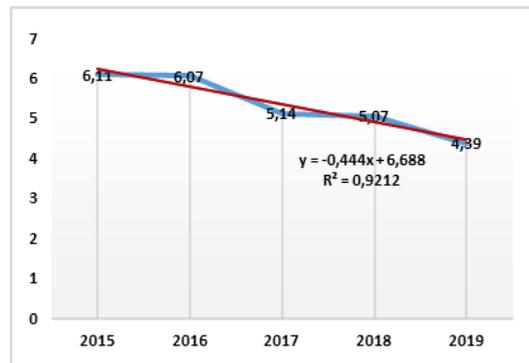
(b) Indeks Kedalaman Kemiskinan



(c) Indeks Keparahan Kemiskinan



(d) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



(e) Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 34. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

2.5 Dimensi Pendidikan

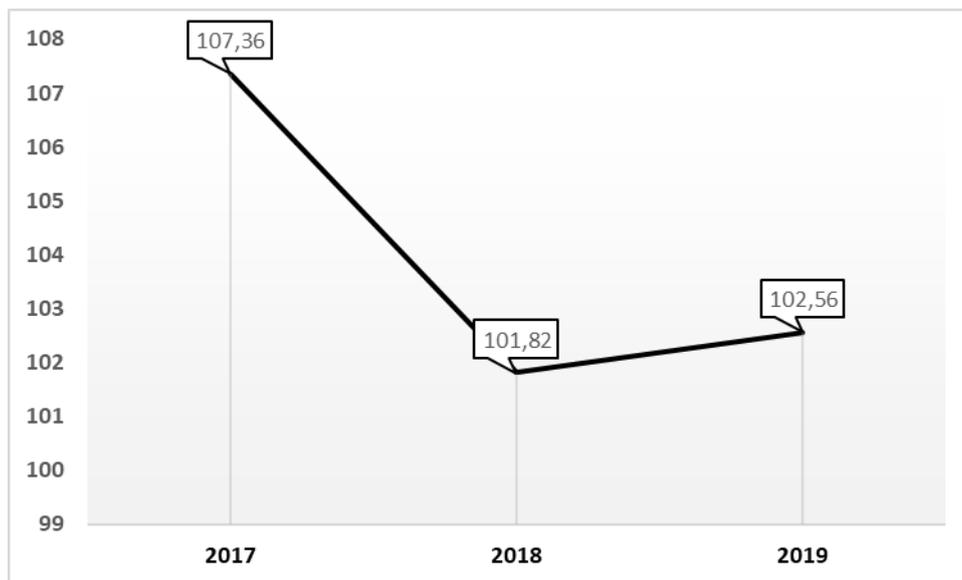
Bidang pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam program penanggulangan kemiskinan. Unsur pendidikan memegang peranan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki semangat dan kemampuan untuk menciptakan kemakmuran bagi dirinya sendiri, alam dan lingkungannya. Oleh karena itu pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi sangat penting bagi masyarakat termasuk wajib belajarnya dalam rangka persaingan yang lebih adil dan bermartabat. Hal ini sangat relevan dengan upaya mengatasi masalah kemiskinan yang merupakan akibat dari kesenjangan dan mengacu kepada salah satu tujuan SDGs yaitu mengenai pendidikan berkualitas pada tujuan ke 4. Dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa merupakan kewajiban Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan yang didukung oleh masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas infrastruktur, tenaga, anggaran dan program yang tepat, efektif dan memadai.

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Dalam kaitan ini, salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Oleh sebab itu kualitas SDM harus diupayakan untuk selalu ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Permasalahannya adalah pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat pada akses penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar (guru/dosen), kelengkapan literatur (buku-buku) dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Hanya saja, segala bentuk upaya peningkatan pendidikan selalu terganjal dengan beragam kendala. Sarana pendidikan seperti bangunan fisik (gedung sekolah) yang ideal merupakan harapan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmatinya. Kabupaten Jombang pada Tahun 2019 memiliki 507 Sekolah Dasar Negeri dan 41 Sekolah Dasar Swasta yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk SMP terdapat 48 Sekolah Menengah Pertama Negeri dan 81 Sekolah Menengah Pertama Swasta. Sementara untuk SMA terdapat 12 Sekolah Menengah Atas Negeri dan 35 Sekolah Menengah Atas Swasta. Indikator penting yang terkait dengan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melek Huruf (AMH).

2.5.1 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Pendidikan

- **Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan jumlah siswa yang ditampung dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkat sekolah yang bersangkutan di Kabupaten Jombang, indikator ini dapat menggambarkan partisipasi dalam rangka pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dasar bagi semua. Untuk mengetahui perkembangan indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dapat dilihat pada gambar 35.



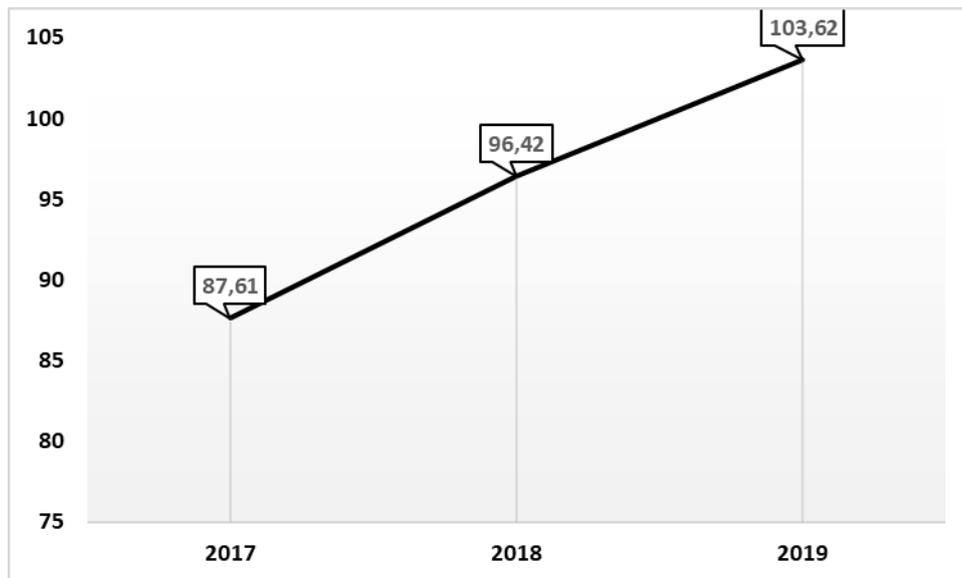
Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 35. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tiga tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 APK SD/MI Kabupaten Jombang sebesar 107,36 persen. Pada tahun 2018, APK SD/MI Kabupaten Jombang turun sebesar 5,54 persen menjadi 101,82 persen. Pada tahun 2019, APK SD/MI Kabupaten Jombang naik sebesar 0,74 persen menjadi 102,56 persen. Rata-rata penurunan APK SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 sebesar 2,4 persen per tahun.

Sedangkan perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun dengan rata-rata peningkatan 8,0 persen per tahun. Perkembangan tersebut terlihat dari APK SMP/ MTs tahun 2017 yang sebesar 87,61 persen naik sebesar 8,81 persen menjadi 96,42 persen pada tahun 2018. Pada

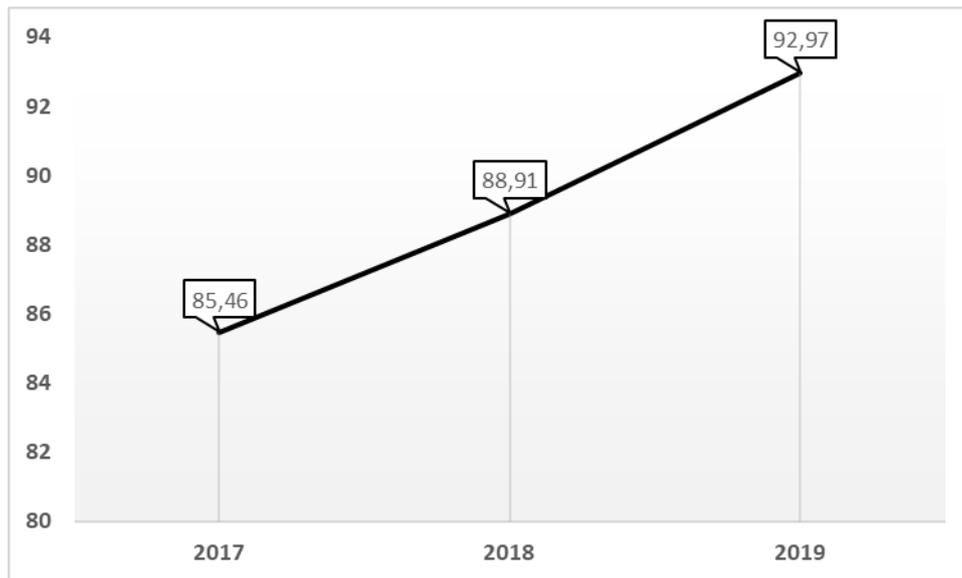
tahun 2019, APK SMP/MTs Kabupaten Jombang naik sebesar 7,2 persen menjadi 103,62 persen, perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 36.



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 36. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,75 persen per tahun. Pada tahun 2017 APK SMA/MA Kabupaten Jombang sebesar 85,46 persen. Pada tahun 2018, APK SMA/MA Kabupaten Jombang naik sebesar 3,45 persen menjadi 88,91 persen. Pada tahun 2019, APK SMA/MA Kabupaten Jombang naik sebesar 4,06 persen menjadi 92,97 persen. Perkembangan APK SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar 37.



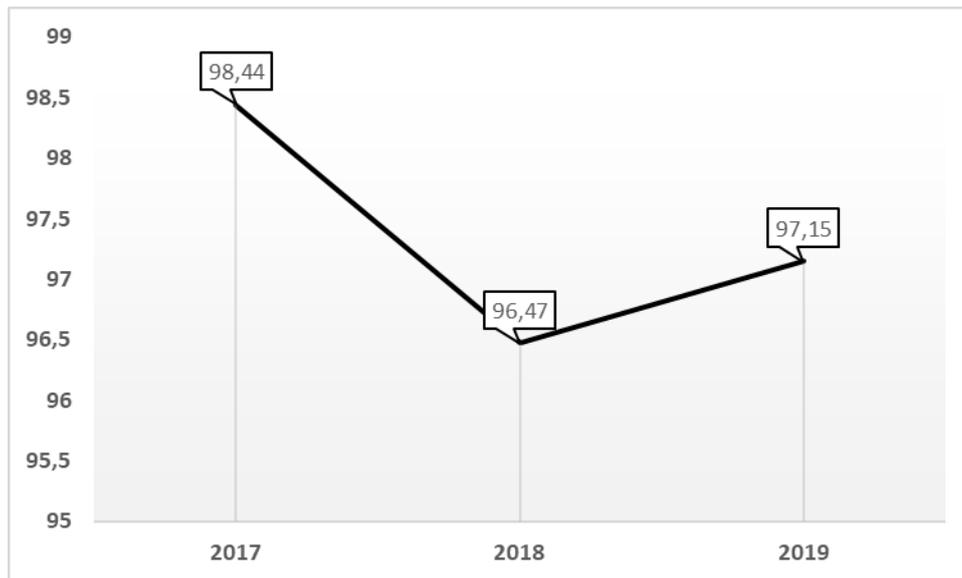
Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 37. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang bersekolah tetapi belum cukup umur dan/atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

- **Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI dan SMP/ MTs menunjukkan banyaknya siswa yang diserap sesuai usia sekolah pada tingkat pendidikan bersangkutan di Kabupaten Jombang. Indikator APM sangat penting karena menunjukkan partisipasi mengikuti pendidikan dalam rangka wajib belajar pada usia sekolah bersangkutan. Kewajiban mana merupakan hak memperoleh pendidikan dan oleh karenanya adalah kewajiban pemerintah menyelenggarakan pendidikan guna mempertinggi harkat dan martabat serta melepaskan diri dari kemiskinan dan ketertinggalan. Perkembangan antar waktu dari indikator APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA Kabupaten Jombang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perkembangan APM SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar 38.

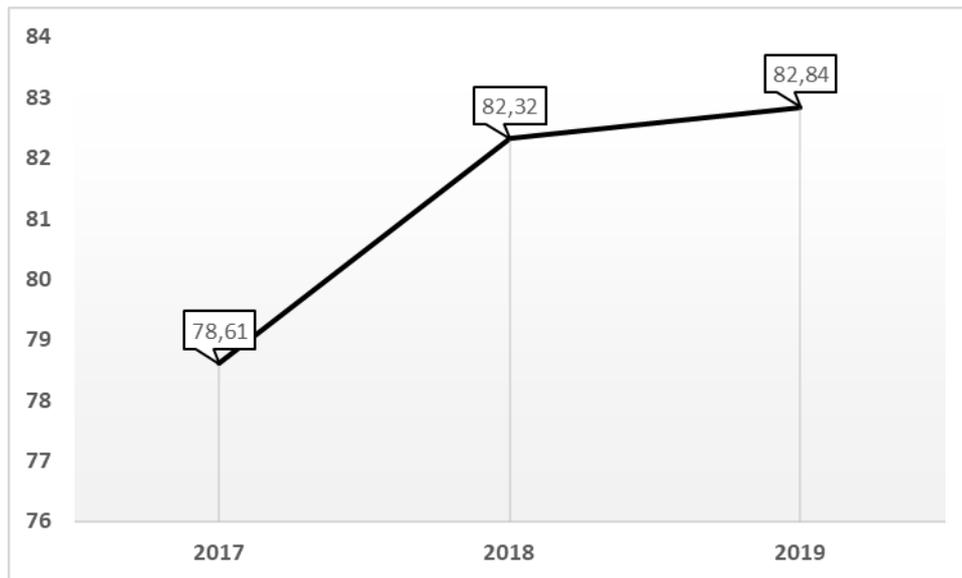


Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 38. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

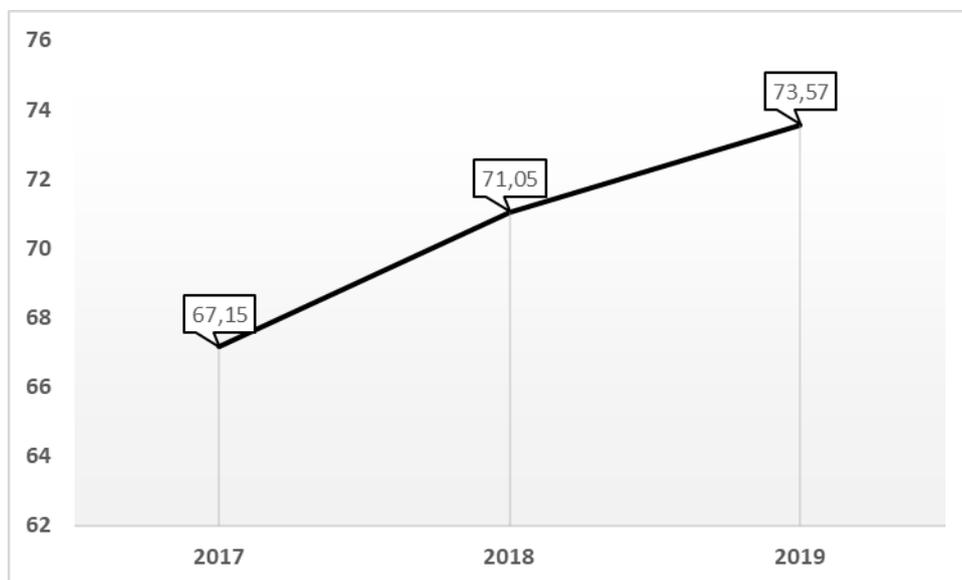
Pada tahun 2017, APM SD/MI Kabupaten Jombang sebesar 98,44 persen. Pada tahun 2018, APM SD/MI Kabupaten Jombang menurun sebesar 1,97 persen menjadi 96,47 persen. Pada tahun 2019, APM SD/MI Kabupaten Jombang meningkat sebesar 0,68 persen menjadi 97,15 persen. Perkembangan APM SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 cenderung menurun dengan rata-rata peningkatan 0,64 persen per tahun.

Perkembangan APM SMP/MTs di Kabupaten Jombang cenderung mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu tiga tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,11 persen per tahun. Pada tahun 2017, APM SMP/MTs Kabupaten Jombang sebesar 78,61 persen. Pada tahun 2018, APM SMP/MTs Kabupaten Jombang naik 3,71 persen menjadi 82,32 persen. Pada tahun 2019, APM SMP/MTs Kabupaten Jombang naik 0,52 persen menjadi 82,84 persen. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada gambar 39.



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 39. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019



Sumber Data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 40. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebesar 67,15 persen. Pada tahun 2018, APM SMA/MA Kabupaten Jombang naik sebesar 3,9 persen menjadi 71,05 persen. Pada tahun 2019, APM SMA/MA Kabupaten Jombang naik sebesar 2,50 persen menjadi 73,57 persen. Rata-rata peningkatan APM SMA/MA Kabupaten

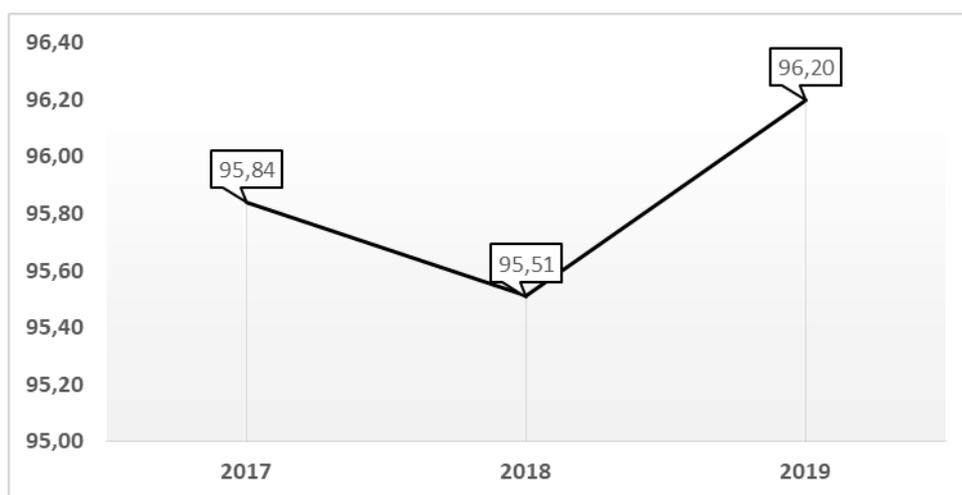
Jombang tahun 2017-2019 sebesar 3,21 persen per tahun. Perkembangan APM SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2017-2019 dapat dilihat pada gambar 40.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Jika dilihat kondisi perkembangan APM di Kabupaten Jombang masih perlu dilakukan upaya peningkatan karena angka partisipasi murni masih belum mencapai nilai 100. APM SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 97,15 persen yang artinya masih perlu ditingkatkan sebesar 2,85 persen. APM SMP/MTs Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 82,84 persen yang artinya masih perlu ditingkatkan sebesar 17,16 persen dan APM SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 73,57 persen yang artinya masih perlu ditingkatkan sebesar 26,43 persen.

- **Angka Melek Huruf (AMH)**

Angka Melek Huruf (AMH) dihitung dari jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Jombang selama kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Angka melek huruf Kabupaten Jombang tahun 2017 sebesar 95,84 persen. Pada tahun 2018, angka melek huruf Kabupaten Jombang menurun sebesar 0,33 persen menjadi 95,51 persen. Namun pada tahun 2019 angka melek huruf Kabupaten Jombang mengalami kenaikan sebesar 0,69 persen menjadi 96,20 persen. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Jombang dapat dilihat pada gambar 41.



Gambar 41. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Jombang, Tahun 2017-2019

2.5.2 Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan

Indikator bidang pendidikan yang berpengaruh terhadap perkembangan angka kemiskinan yaitu angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni dan angka melek huruf. Angka partisipasi kasar terdiri dari angka partisipasi kasar SD/MI, angka partisipasi kasar SMP/MTs, dan angka partisipasi kasar SMA/MA. Angka partisipasi murni terdiri dari angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs, dan angka partisipasi murni SMA/MA. Angka melek huruf diukur pada tingkat kemampuan membaca pada penduduk yang berusia di atas 15 tahun.

Capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan capaian tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama (posisi relatif) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Posisi Relatif Capaian Indikator Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019

Indikator	Capaian Tahun 2019 (%)		
	Kabupaten Jombang	Jawa Timur	Nasional
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	102,56	105,56	107,36
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,62	94,24	90,20
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA	92,97	84,80	79,94
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	97,15	98,01	97,64
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	82,84	82,64	79,40
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA	73,57	61,77	60,84
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15+	96,20	92,32	95,90

Sumber: BPS (data diolah)

Posisi relatif capaian APK SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 102,56 persen berada 3,00 poin di bawah capaian APK SD/MI Provinsi sebesar 105,56 persen dan 4,80 poin di bawah capaian APK SD/MI Nasional sebesar 107,36 persen. Posisi relatif capaian APK SMP/MTs Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 103,62 persen berada 9,38 poin di atas capaian APK SMP/MTs Provinsi Jawa Timur sebesar 94,24 persen dan 13,42 poin di atas capaian APK SMP/MTs Nasional sebesar 90,20 persen. Posisi relatif capaian APK SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 92,97 persen berada 8,17 poin di atas capaian APK SMA/MA Provinsi sebesar 84,80 persen dan 13,03 poin di atas capaian APK SMA/MA Nasional sebesar 79,94 persen.

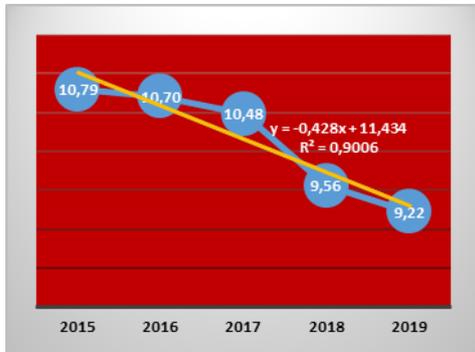
Posisi relatif capaian APM SD/MI Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 97,15 persen berada 0,86 poin di bawah capaian APM SD/MI Provinsi sebesar 98,01 persen dan 0,49 poin di bawah capaian APM SD/MI Nasional sebesar 97,64 persen. Posisi relatif capaian APM SMP/MTs Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 82,84 persen berada 0,20 poin di atas capaian APM SMP/MTs Provinsi sebesar 82,64 persen dan 3,44 poin di atas capaian APM SMP/MTs Nasional sebesar 79,40 persen. Posisi relatif capaian APM SMA/MA Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 73,57 persen berada 11,80 poin di atas capaian APM SMA/MA Provinsi sebesar 61,77 persen dan 12,73 poin di atas capaian APM SMA/MA Nasional sebesar 60,84 persen. Posisi relatif capaian AMH Kabupaten Jombang tahun 2019 sebesar 96,20 persen berada 3,88 poin di atas capaian AMH Provinsi Jawa Timur sebesar 91,32 persen dan 0,20 poin di atas AMH Nasional sebesar 95,90 persen.

2.5.3 Analisis Prioritas Bidang Pendidikan

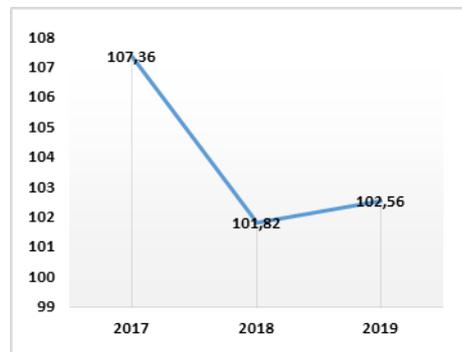
Indikator bidang pendidikan yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melek Huruf (AMH) sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Melek Huruf (AMH) sejalan dengan penurunan angka kemiskinan.

Perkembangan indikator APK SMP/MTs dan SMA/MA pada dasarnya sejalan dengan angka kemiskinan secara keseluruhan. Sementara perkembangan yang tidak konsisten terjadi pada APK SD/MI dimana angka kemiskinan yang turun namun APK terjadi penurunan. Dengan demikian APK SD/MI dapat menjadi prioritas intervensi kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Jombang.

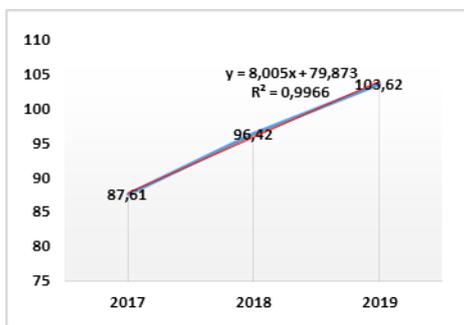
Perkembangan indikator APM SMP/MTs dan SMA/MA pada dasarnya sejalan dengan angka kemiskinan secara keseluruhan. Sementara perkembangan yang tidak konsisten terjadi pada APM SD/MI dimana angka kemiskinan yang turun namun capaian APM terjadi penurunan. Dengan demikian APM SD/MI dapat menjadi prioritas intervensi kebijakan bidang pendidikan di Kabupaten Jombang.



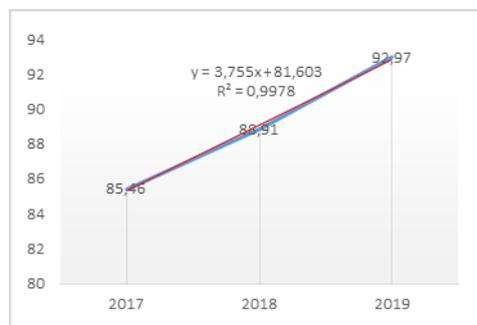
Persentase Penduduk Miskin



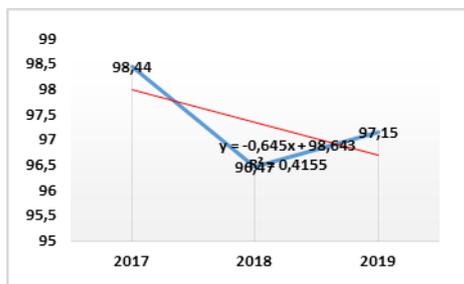
APK SD/MI



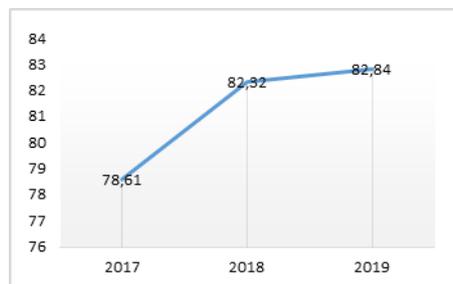
APK SMP/MTs



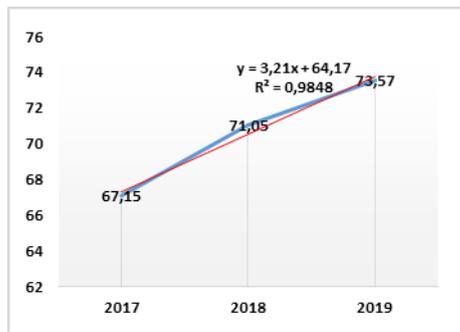
APK SMA/MA



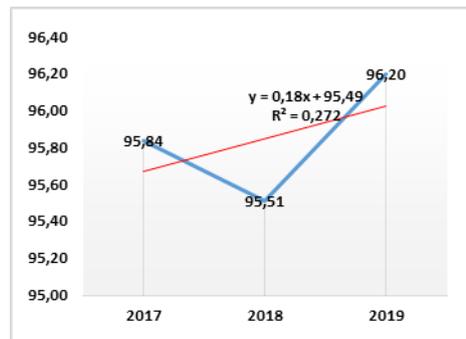
APM SD/MI



APM SMP/MTs



APM SMA/MA



AMH

Gambar 42. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

2.6 Dimensi Kesehatan

Indikator kesehatan baik secara kolektif maupun tersendiri memiliki relevansi langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Sebagai bidang prioritas dalam penurunan angka kemiskinan maka perlu dilakukan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan dengan visi Indonesia Sehat adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang melalui terciptanya budaya atau perilaku hidup sehat dan menciptakan lingkungan sehat. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menyediakan pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, sehingga masyarakat memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan kesehatan juga diselenggarakan untuk mendukung pencapaian indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penyelenggaraan pembangunan kesehatan didasarkan pada paradigma sehat, dimana upaya preventif dan promotif lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

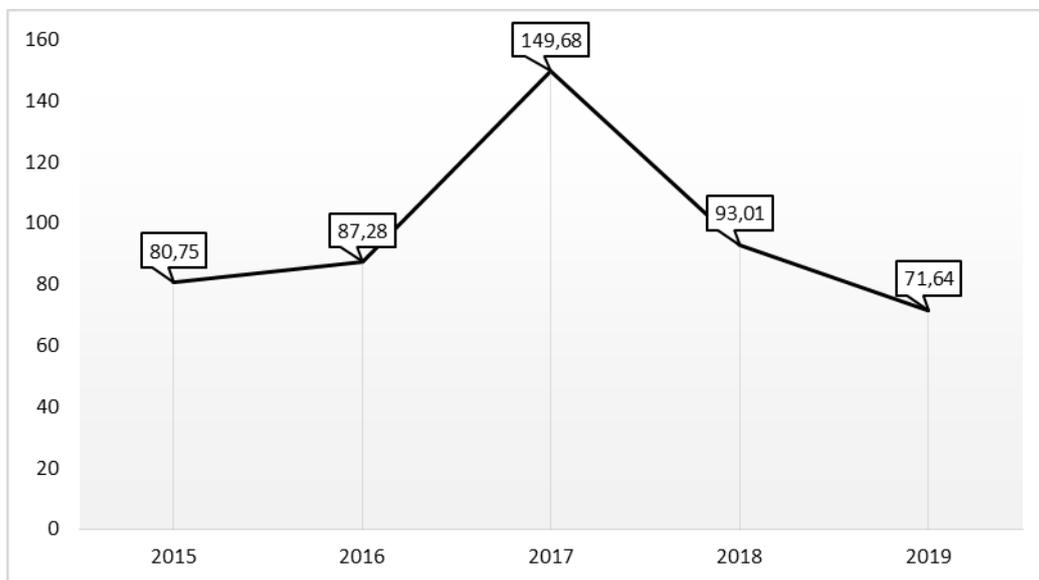
Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan. Adalah relevan apabila perbaikan derajat kesehatan masyarakat dibarengi pula oleh ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Dalam rangka mencapai upaya tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang telah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dalam upaya penyelenggaraan upaya kesehatan dasar baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, serta upaya kesehatan rujukan.

Indikator penting bidang kesehatan yang dapat mempengaruhi penurunan angka kemiskinan antara lain: angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk pada balita, prevalensi gizi kurang pada balita, dan persalinan ditolong oleh tenaga medis.

2.6.1 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Kesehatan

- **Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh**

Indikator Angka Kematian Ibu atau *Maternal Mortality Rate* dapat menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu serta keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, fasilitas dan tingkat pelayanan prenatal. Perkembangan AKI di Kabupaten Jombang menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2015, Angka Kematian Ibu Kabupaten Jombang sebesar 80,75. Pada tahun 2016 naik sebesar 6,53 persen menjadi 87,28 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2017, AKI Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar 62,4 persen menjadi 149,68. Pada tahun 2018, AKI Kabupaten Jombang menurun 56,67 persen menjadi 93,01. Pada tahun 2019, AKI Kabupaten Jombang kembali menurun sebesar 21,37 persen menjadi 71,64. Perkembangan AKI Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 rata-rata mengalami penurunan sebesar 2,27 persen per tahun. Perkembangan AKI Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 2.36.



Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 43. Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

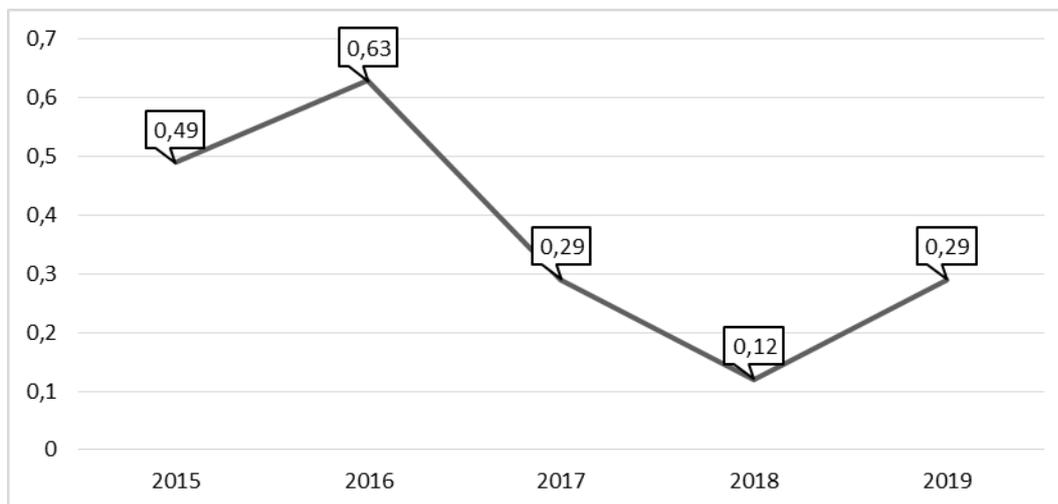
Berdasarkan capaian indikator Angka Kematian Ibu di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan capaian dari intervensi kebijakan secara umum mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari arah kemiringan grafik Angka Kematian Ibu di Kabupaten Jombang yang menunjukkan kemajuan dari kondisi awalnya. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama dalam

periode tahun 2015-2019 terhadap indikator Angka Kematian Ibu adalah efektif.

- **Prevalensi Gizi Buruk pada Balita (%)**

Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan status gizi masyarakat antara lain melalui pelayanan perbaikan gizi masyarakat berupa pemberian makanan tinggi kalori dan protein untuk ibu hamil kurang energi kronis, pemantapan waspada gizi buruk, pemantapan kader siaga gizi buruk, pembentukan taman pemulihan gizi, serta pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.

Analisis status gizi buruk pada balita dapat menggambarkan secara langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, perkembangan antar waktu status gizi buruk pada balita di Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir mengalami rata-rata penurunan 0,05 persen per tahun. Pada tahun 2015, prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang sebesar 0,49 persen. Pada tahun 2016, prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang naik sebesar 0,14 persen menjadi 0,63 persen. Pada tahun 2017, prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang turun sebesar 0,34 persen menjadi 0,29 persen. Pada tahun 2018, prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang turun sebesar 0,17 persen menjadi 0,12 persen. Pada tahun 2019, prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang naik sebesar 0,17 persen menjadi 0,29 persen. Perkembangan prevalensi balita gizi buruk Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 44.



Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 44. Perkembangan Prevalensi Gizi Buruk pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

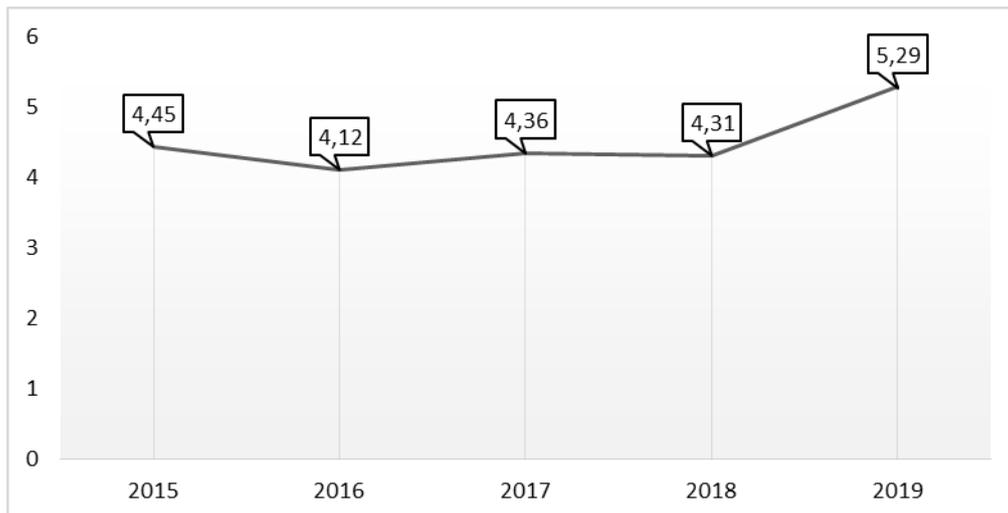
Berdasarkan capaian indikator prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan capaian dari intervensi kebijakan secara umum mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dari arah kemiringan grafik prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Jombang yang menunjukkan kemajuan dari kondisi awalnya. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama dalam

periode tahun 2015-2019 terhadap indikator prevalensi balita gizi buruk adalah efektif. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan upaya-upaya untuk menekan kasus balita gizi buruk. Salah satu upaya yaitu dengan meningkatkan mutu konsumsi pangan yang berdampak pada perbaikan status gizi masyarakat khususnya balita.

- **Prevalensi Gizi Kurang pada Balita (%)**

Status gizi balita adalah cerminan ukuran terpenuhinya kebutuhan gizi anak balita yang didapatkan dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Status gizi dapat ditentukan dengan pengukuran antropometri, pemeriksaan klinis, analisa biokimia, dan biofisik. Salah satu cara yang digunakan dilapangan adalah dengan pengukuran antropometri. Untuk status gizi dengan indikator Berat Badan menurut Umur balita (BB/U). Indikator status gizi berdasar indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan.

Indikator gizi kurang pada balita juga menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pembangunan bidang kesehatan. Perkembangan prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 4,45 persen. Pada tahun 2016, prevalensi gizi kurang pada balita Kabupaten Jombang turun sebesar 0,33 persen menjadi 4,12 persen. Pada tahun 2017, prevalensi gizi kurang pada balita Kabupaten Jombang naik sebesar 0,24 persen menjadi 4,36 persen. Pada tahun 2018, prevalensi gizi kurang pada balita Kabupaten Jombang turun sebesar 0,05 persen menjadi 4,31 persen. Pada tahun 2019, prevalensi gizi kurang pada balita Kabupaten Jombang kembali mengalami kenaikan sebesar 0,98 persen menjadi 5,29 persen. Perkembangan prevalensi gizi kurang pada Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,21 persen per tahun. Perkembangan prevalensi gizi kurang pada Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 45.



Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

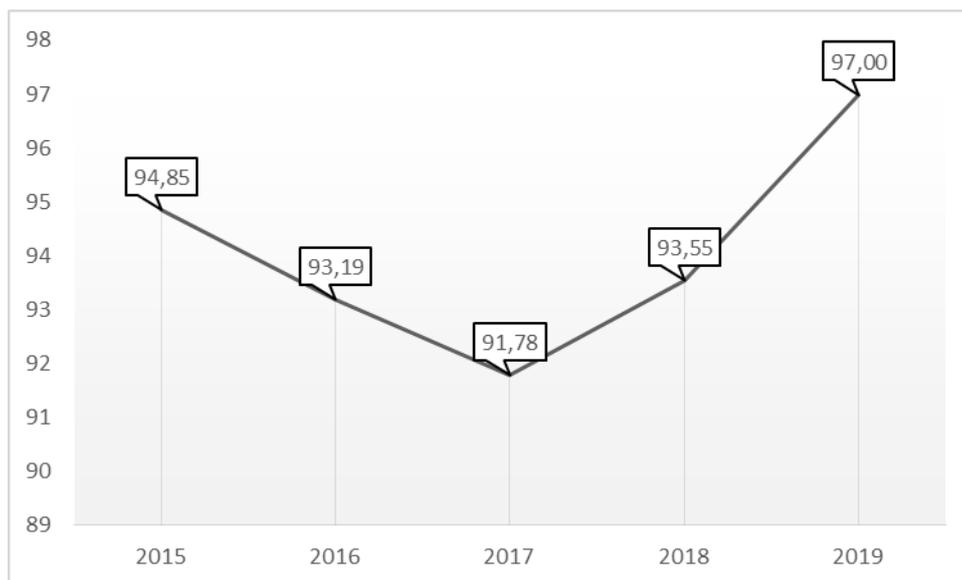
Gambar 45. Perkembangan Prevalensi Gizi Kurang pada Balita Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Berdasarkan capaian indikator prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan capaian dari intervensi kebijakan secara umum belum mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari arah kemiringan grafik prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Jombang yang menunjukkan kemunduran dari kondisi awalnya. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama dalam periode tahun 2015-2019 terhadap indikator prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Jombang adalah belum efektif.

- **Persalinan Ditolong oleh Tenaga Medis (%)**

Perkembangan kelahiran atau persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga medis Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 94,85 persen. Pada tahun 2016, persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang menurun sebesar 1,66 persen menjadi 93,19 persen. Pada tahun 2017, persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang menurun sebesar 1,41 persen menjadi 91,78 persen. Pada tahun 2018, persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang meningkat sebesar 1,77 persen menjadi 93,55 persen. Pada tahun 2019, persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang meningkat sebesar 3,45 persen menjadi 97,00 persen. Perkembangan persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 0,53 persen. Perkembangan persalinan ditolong oleh tenaga medis Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 46.

Berdasarkan capaian indikator persalinan ditolong oleh tenaga medis di Kabupaten Jombang dalam periode tahun 2015-2019 menunjukkan capaian dari intervensi kebijakan secara umum mengalami perbaikan. Hal ini ditunjukkan dari arah kemiringan grafik persalinan ditolong oleh tenaga medis di Kabupaten Jombang yang menunjukkan kemajuan dari kondisi awalnya. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama dalam periode tahun 2015-2019 terhadap indikator persalinan ditolong oleh tenaga medis adalah efektif.



Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 46. Perkembangan Persalinan Ditolong oleh Tenaga Medis (%) Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

2.6.2 Capaian indikator kesehatan terhadap Provinsi dan Nasional

Capaian indikator-indikator dimensi kesehatan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan capaian secara Nasional pada tahun yang sama adalah sebagaimana nampak pada tabel 5.

Tabel 5. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Kesehatan Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2019

Indikator	Capaian 2019		
	Jombang	Jawa Timur	Nasional
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh	71.64	89.81	183.00
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	0.29	0.27	0.28
Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	5.29	8.00	13.80
Persalinan oleh Tenaga Medis (%)	97.00	97.00	90.95

Sumber data: BPS (data diolah)

Dari tabel 5, dapat disimpulkan bahwa Tingkat kemajuan capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) per 100 ribu kh, Prevalensi Balita Gizi Kurang (%), dan indikator Persalinan oleh Tenaga Medis (%) di Kabupaten Jombang lebih baik daripada tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi/nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh, Prevalensi Balita Gizi Kurang (%), dan indikator Persalinan oleh Tenaga Medis (%) di Kabupaten Jombang sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator-indikator tersebut di tingkat provinsi/nasional.

Sementara Tingkat kemajuan capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) di Kabupaten Jombang lebih kecil daripada tingkat kemajuan yang terjadi secara provinsi/nasional. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) di Kabupaten Jombang cukup relevan terhadap kemajuan capaian indikator di tingkat provinsi Jawa Timur atau nasional.

2.6.3 Analisis Prioritas Bidang Kesehatan

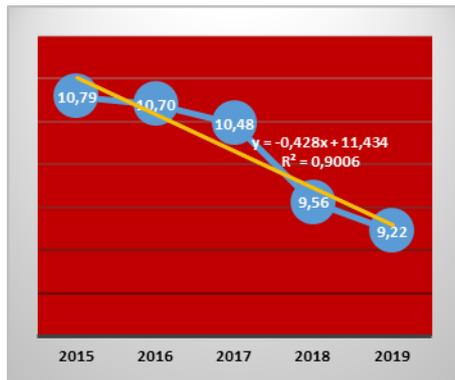
Analisis prioritas bidang kesehatan adalah analisis indikator utama bidang kesehatan yang memiliki relevansi kuat terhadap tingkat kemiskinan. Indikator bidang kesehatan yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yaitu Angka Kematian Ibu Melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup), prevalensi gizi buruk pada balita, prevalensi gizi kurang pada balita, dan persalinan ditolong oleh tenaga medis sehingga menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang selama periode 2015-2019, menunjukkan perkembangan yang menurun, dengan perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun, dengan rata-rata penurunan persentase penduduk

miskin sebesar 3,81 persen per tahun. Kondisi tersebut sejalan dengan angka kematian ibu melahirkan yang menurun rata-rata sebesar 2,27 persen per tahun, penurunan prevalensi gizi buruk pada balita rata-rata sebesar 0,05 persen per tahun, dan persalinan ditolong tenaga medis dengan rata-rata peningkatan 0,53 persen per tahun. Namun kondisi berbeda ditunjukkan pada indikator penurunan prevalensi gizi kurang pada balita yang meningkat rata-rata sebesar 0,21 persen per tahun.

Dari indikator utama bidang kesehatan yang dianalisis, ternyata pada periode tahun 2015-2019, hanya indikator penurunan prevalensi gizi kurang yang tidak konsisten dengan perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang yang mengalami penurunan. Sementara indikator angka kematian ibu melahirkan, penurunan prevalensi gizi buruk pada balita, dan persalinan ditolong tenaga medis memiliki keterkaitan dan konsisten dengan capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

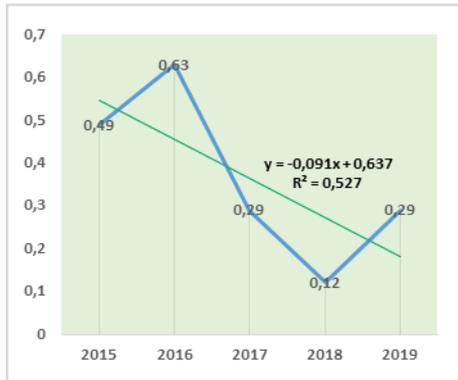
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan indikator dimensi kesehatan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang, maka prioritas intervensi kebijakan ditujukan pada indikator penurunan prevalensi gizi kurang pada balita di Kabupaten Jombang yang perkembangannya belum sesuai harapan. Sementara intervensi kebijakan terhadap indikator angka kematian ibu melahirkan, penurunan prevalensi gizi buruk pada balita, dan persalinan ditolong tenaga medis tetap dipertahankan yang sudah menunjukkan kemajuan dalam perkembangannya.



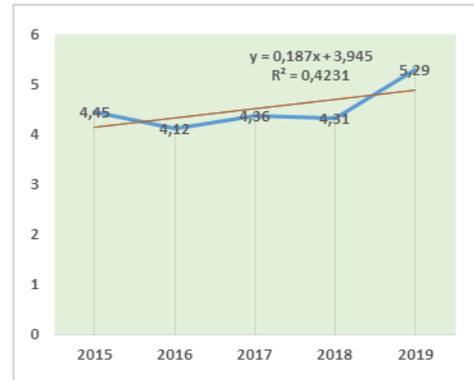
Persentase Penduduk Miskin



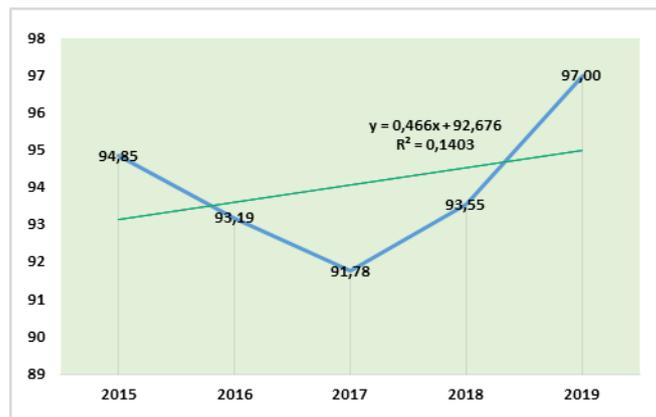
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh



Prevalensi Gizi Buruk pada Balita



Angka Kematian Ibu (AKI) per 100ribu kh



Persalinan Ditolong oleh Tenaga Medis

Gambar 47. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

2.7 Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi prasarana/infrastruktur dasar di Kabupaten Jombang dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang prasarana dasar yakni: Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, Rumah Tangga Akses Listrik dan Rumah Tangga dengan Kepemilikan Sendiri selama kurun waktu 2015-2019 dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.7.1 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Prasarana Dasar

Dari 4 indikator pada dimensi prasarana/infrastruktur dasar di Kabupaten Jombang selama periode tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) indikator yang menunjukkan *trend*

perkembangan yang membaik, yaitu indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Rumah Tangga dengan Akses Listrik. Sementara 2 (dua) indikator yang menunjukkan trend perkembangan memburuk, yaitu indikator Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak dan Rumah Tangga dengan Penguasaan atas Bangunan Tempat Tinggal (milik sendiri).

Tabel 6 Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Tahun 2017-2019

Indikator	Capaian Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak	74.04	81.53	84.3	84.72	88.7
Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	97.95	98.42	98.79	97.35	94.01
Rumah Tangga dgn Akses Listrik	98.64	99.51	100.00	100.00	100.00
Rumah Tangga dengan Penguasaan atas Bangunan Tempat Tinggal (milik sendiri)	90.84	91.86	88.04	89.48	89.65

Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Sanitasi layak yang merupakan data rumah tangga dengan kepemilikan jamban. Kondisi sanitasi layak masih perlu dikembangkan pada pengertian yang lebih luas kepada masyarakat karena masih banyak yang tidak peduli terhadap sanitasi dalam kaitan dengan kelestarian lingkungan hidup. Sanitasi layak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan dalam arti luas, yang memiliki dampak pelan namun pasti pada penurunan sumber daya dan pada akhirnya akan meningkatkan kemiskinan. Perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Jombang mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun dari semula 74,04 persen pada tahun 2015 menjadi 88,70 persen pada tahun 2019 dengan rata-rata peningkatan 3,66 persen per tahun selama 5 tahun.

Rumah Tangga dengan akses air minum layak adalah Rumah Tangga dengan sumber air minum yang berasal dari sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan perpipaan. Dengan capaian 97,95 persen pada tahun 2015 dan menjadi 94,01 persen pada tahun 2019 maka perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 mengalami penurunan dengan rata-rata 0,98 persen per tahun.

Perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2019 rata-rata meningkat sebesar 0,34 persen dimana rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Jombang sudah mencapai 100 persen mulai tahun 2017. Artinya seluruh penduduk Kabupaten Jombang dapat mengakses listrik. Perkembangan proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri di Kabupaten Jombang tahun 2015-2019

cenderung menurun dengan rata-rata penurunan 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2015 proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri Kabupaten Jombang sebesar 90,84 persen. Pada tahun 2016, proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri Kabupaten Jombang meningkat sebesar 1,02 persen menjadi 91,86 persen. Pada tahun 2017, proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri Kabupaten Jombang menurun sebesar 3,82 persen menjadi 88,04 persen. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri Kabupaten Jombang meningkat sebesar 1,44 persen menjadi 89,48 persen. Pada tahun 2019, proporsi rumah tangga dengan kepemilikan rumah sendiri Kabupaten Jombang meningkat sebesar 0,17 persen menjadi 89,65 persen.

2.7.2 Capaian indikator Prasarana/Infrastruktur Dasar terhadap Provinsi dan Nasional

Capaian indikator-indikator dimensi Prasarana/ Infrastruktur Dasar di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dan secara Nasional pada tahun yang sama akan menunjukkan posisi relatifnya, apakah lebih buruk ataukah lebih baik. Gambaran posisi relatif indikator-indikator dimensi Prasarana/ Infrastruktur Dasar di Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Prasarana/Infrastruktur Dasar, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi dan Nasional, Tahun 2019

Indikator	Capaian 2019 (%)		
	Jombang	Jawa Timur	Nasional
Rumah Tangga dgn Akses Air Minum Layak	88.7	78.78	66.57
Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak	94.01	94.39	84.91
Rumah Tangga dgn Akses Listrik	100.00	99.59	96.52
Rumah Tangga dengan Penguasaan atas Bangunan Tempat Tinggal (milik sendiri)	89.65	87.58	90.36

Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Berdasarkan tabel 7, indikator-indikator pada dimensi prasarana/infrastruktur dasar di Kabupaten Jombang yang masih bermasalah untuk tahun 2019 adalah indikator proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, dan proporsi rumah tangga dengan penguasaan atas bangunan tempat tinggal (rumah milik sendiri). Kedua indikator ini menunjukkan capaian lebih buruk dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur untuk indikator Rumah Tangga dgn Akses Sanitasi Layak meskipun lebih baik dari capaian secara Nasional. Sementara itu untuk indikator proporsi rumah tangga dengan penguasaan atas bangunan tempat tinggal (rumah milik sendiri) di

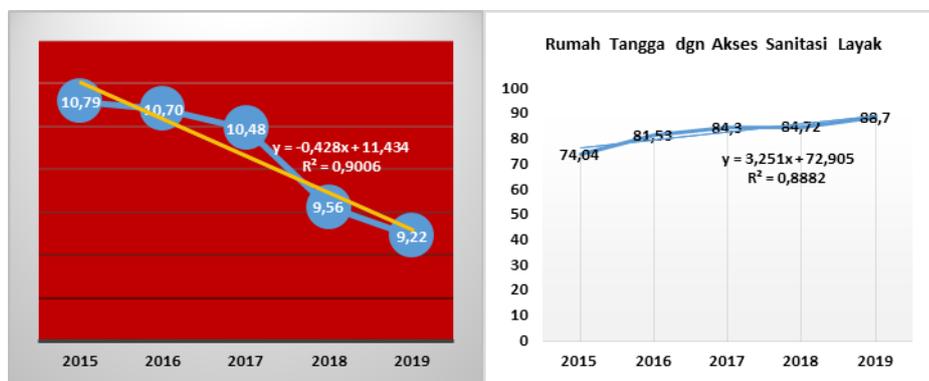
Kabupaten Jombang menunjukkan capaian yang lebih buruk dari capaian di tingkat Nasional tetapi masih lebih baik terhadap capaian di Tingkat Provinsi.

2.7.3 Analisis Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar

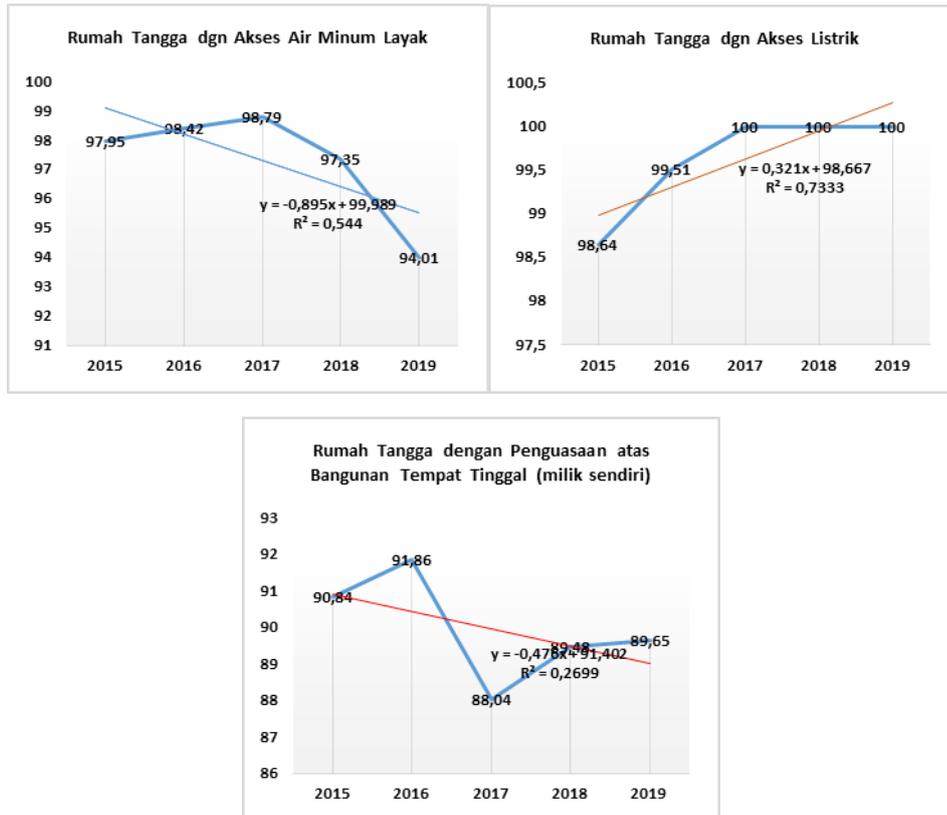
Indikator bidang infrastruktur dasar yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan antara lain proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, proporsi rumah tangga dengan air minum layak, proporsi rumah tangga dengan akses listrik, dan proporsi rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri. Perkembangan empat indikator tersebut pada tahun 2015-2019 memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jombang.

Dari empat indikator bidang infrastruktur yang dianalisis, dua indikator memiliki keterkaitan yang konsisten dengan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang yang artinya memiliki perkembangan yang sejalan dengan perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Kedua indikator tersebut adalah rumah tangga dengan sanitasi layak dan rumah tangga dengan akses listrik.

Sementara indikator rumah tangga dengan air minum layak dan rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri ternyata tidak konsisten dengan penurunan angka kemiskinan. Dengan demikian kedua indikator ini dapat menjadi prioritas intervensi kebijakan bidang infrastruktur di Kabupaten Jombang agar perkembangannya sejalan dengan tingkat kemiskinan.



(a) Persentase Penduduk Miskin



(b) Persentase Penduduk Miskin

Gambar 48. Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

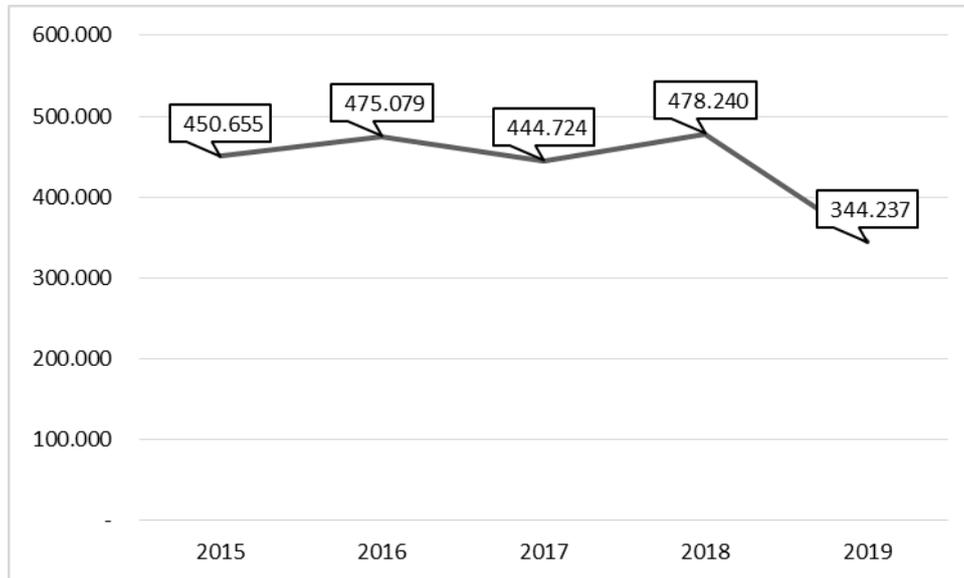
2.8 Dimensi Ketahanan Pangan

Kondisi kemiskinan ditinjau dari dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Jombang dilakukan dengan melihat perkembangan capaian indikator-indikator bidang ketahanan pangan terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Jombang antara lain: harga beras (Rp), harga kebutuhan pokok non beras (Rp) dan produksi padi (Ton) selama kurun waktu 2015-2019 dan capaian indikator-indikator tersebut pada tahun terakhir terhadap capaian tahun yang sama di tingkat Provinsi Jawa Timur.

2.8.1 Perkembangan Capaian Indikator Bidang Ketahanan Pangan

Dari indikator-indikator pada dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Jombang selama periode tahun 2015-2019, indikator yang menunjukkan perkembangan yang membaik (meningkat) adalah produksi padi Kabupaten Jombang dengan rata-rata peningkatan sebesar 0.020 persen per tahun. Produksi padi Kabupaten Jombang pada tahun 2015 sebesar 450.655

ton. Pada tahun 2016, produksi padi Kabupaten Jombang meningkat 5,42 persen menjadi 475.079 ton. Pada tahun 2017, produksi padi Kabupaten Jombang menurun sebesar 0,064 persen menjadi 444.724 ton. Pada tahun 2018, produksi padi Kabupaten Jombang meningkat 0,075 persen menjadi 478.240 ton. Pada tahun 2019, produksi padi Kabupaten Jombang menurun menjadi 344.237 ton. Perkembangan produksi padi Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 49.



Sumber data: BPS Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 49. Produksi Padi Kabupaten Jombang (Ton) Tahun 2015-2019

Sementara indikator harga komoditas yang menunjukkan rata-rata perkembangan yang membaik (harga menurun) adalah harga tepung dengan rata-rata penurunan harga sebesar 0.017 persen selama tahun 2015-2019. Sedangkan harga beras, harga minyak goreng curah, harga daging ayam, harga telur, harga gula pasir, harga daging sapi dan harga tepung menunjukkan kenaikan harga selama tahun 2015-2019. Gambaran perkembangan capaian indikator dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Perkembangan Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Tahun 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Harga beras IR 64 (Rp/kg)	8,933	8,733	10,000	9,500	9,166
Produksi beras (ton)	450,655	475,079	444,724	478,240	344,236.78
Harga Bahan Kebutuhan Pokok Lainnya					

Gula Pasir (Rp/kg)	11,833	12,500	10,833	10,333	11,750
Minyak Goreng Curah (Rp/kg)	9,400	11,433	11,000	10,333	9,416
Daging Sapi (Rp/kg)	96,833	99,333	98,666	101,666	103,166
Daging Ayam (Rp/kg)	29,666	28,333	31,333	36,333	31,333
Telur (Rp/kg)	23,833	20,333	23,333	24,666	23,333
Tepung (Rp/kg)	8,000	7,660	7,000	7,333	7,416

Sumber data: siskaperbapo (data diolah)

2.8.2 Capaian indikator Ketahanan Pangan terhadap Provinsi

Capaian indikator-indikator dimensi Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 bila dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun yang sama akan menunjukkan posisi relatifnya, apakah lebih buruk ataukah lebih baik. Gambaran posisi relatif indikator-indikator dimensi Ketahanan Pangan di Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 9.

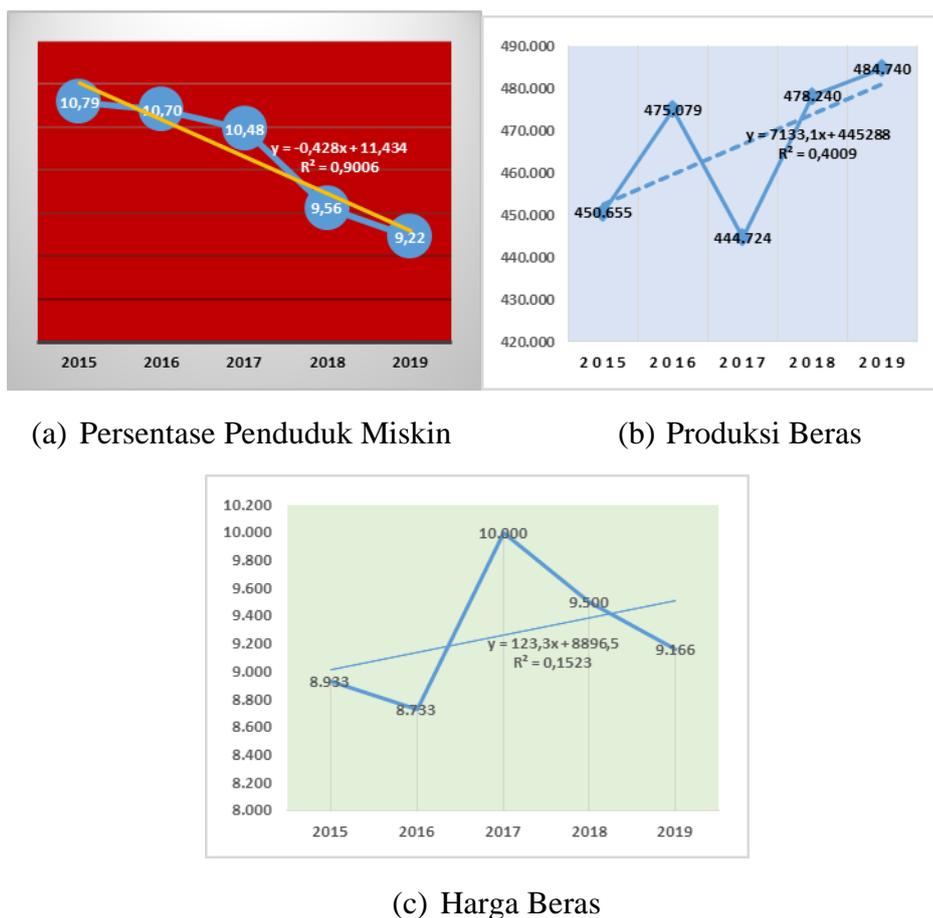
Tabel 9. Posisi Relatif Capaian Indikator-Indikator Dimensi Ketahanan Pangan, Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur, Tahun 2019

Indikator	Capaian 2019	
	Jombang	Jawa Timur
Harga beras IR 64 (Rp/kg)	9,166	9,622
Harga Bahan Kebutuhan Pokok Lainnya		
Gula Pasir (Rp/kg)	11,750	12,108
Minyak Goreng Curah (Rp/kg)	9,416	10,857
Daging Sapi (Rp/kg)	103,166	107,950
Daging Ayam (Rp/kg)	31,333	32,142
Telur (Rp/kg)	23,333	23,634
Tepung (Rp/kg)	7,416	8,120

Berdasarkan Tabel 9, semua indikator-indikator pada dimensi ketahanan pangan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 menunjukkan capaian yang lebih baik dari capaian di tingkat Provinsi Jawa Timur dalam hal ini ditinjau dari aspek harga-harga kebutuhan pokok (beras) maupun kebutuhan pokok lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ketahanan pangan di Kabupaten Jombang lebih baik daripada tingkat kemajuan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa perkembangan capaian indikator ketahanan pangan di Kabupaten Jombang sangat relevan terhadap kemajuan capaian indikator-indikator tersebut di Provinsi Jawa Timur.

2.8.3 Analisis Prioritas Bidang Ketahanan Pangan

Indikator bidang ketahanan pangan yang dinilai berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan antara lain adalah harga beras dan produksi padi. Perkembangan indikator tersebut pada tahun 2015-2019 berbeda dengan perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jombang. Perkembangan harga beras Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 rata-rata naik sebesar 0,09 persen per tahun. Produksi padi Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 rata-rata naik sebesar 0,02 persen per tahun. Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 rata-rata turun sebesar 3,81 persen per tahun.



Gambar 50. (a,b,c) Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Dari indikator bidang ketahanan pangan dapat diketahui bahwa indikator harga beras yang tidak konsisten dengan perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang yang mengalami penurunan. Seharusnya tingkat kemiskinan memiliki kaitan dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok utama terutama harga beras. Sementara indikator produksi beras di

Kabupaten Jombang memiliki keterkaitan dan konsisten dengan capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan indikator dimensi ketahanan pangan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang, maka prioritas intervensi kebijakan ditujukan pada indikator harga beras di Kabupaten Jombang yang perkembangannya belum sesuai harapan. Sementara intervensi kebijakan terhadap indikator produksi beras di Kabupaten Jombang tetap dipertahankan yang sudah menunjukkan kemajuan dalam penurunan tingkat kemiskinan.

Dengan demikian pengendalian harga bahan beras menjadi penting dilakukan mengingat akan sangat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan angka kemiskinan. Jika mengacu pada hasil analisis prioritas bidang ketahanan pangan tersebut, maka harga beras yang merupakan faktor dasar pengentasan kemiskinan perlu memerlukan perhatian khusus.

BAB III

TINJAUAN ANGGARAN BELANJA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Jombang terus berkomitmen dalam melaksanakan prioritas penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan beserta alokasi anggaran, baik itu anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Secara global anggaran tersebut meningkat dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Realisasi APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Realisasi	Pendapatan	Belanja	Selisih(%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahun 2015	Rp 2.151.287.874.052,96	Rp 2.164.953.026.633,20	-0,64
Tahun 2016	Rp 2.257.099.357.781,47	Rp 2.364.581.573.271,18	-4,76
Tahun 2017	Rp 2.517.003.141.056,17	Rp 2.401.430.893.002,94	4,59
Tahun 2018	Rp 2.512.293.408.215,60	Rp 2.354.108.953.698,38	6,30
Tahun 2019	Rp 2.672.346.199.409,46	Rp 2.180.806.206.195,47	3,80

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

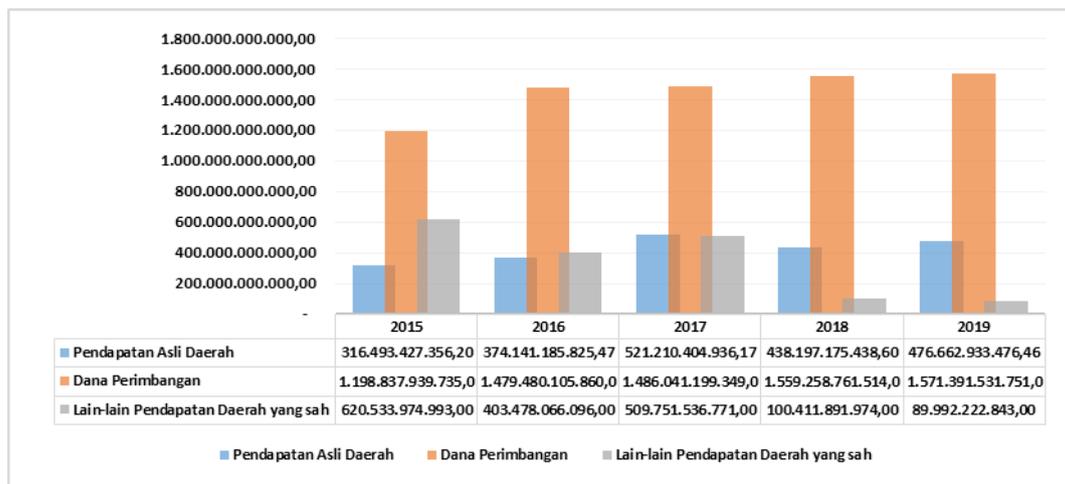
Berdasarkan pada tabel 10 nampak bahwa realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jombang mengalami peningkatan sebesar 6,37 persen atau sebesar Rp. 160.052.791.193,86. Di sisi lain realisasi belanja daerah Kabupaten Jombang tahun 2019 mengalami penurunan 7,36 persen terhadap realisasi belanja tahun 2018 atau sebesar Rp. 173.302.747.502,91.

Selama periode 2015-2019 terjadi dua kali defisit anggaran yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,64 persen dan tahun 2016 sebesar 4,76 persen. Surplus anggaran tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 6,30 persen. Penjabaran anggaran pendapatan & belanja, komposisi serta proporsinya akan diulas untuk menjelaskan kontribusinya terhadap

penanggulangan kemiskinan. Analisis anggaran belanja penanggulangan kemiskinan adalah analisis terhadap alokasi dan manajemen anggaran belanja publik dalam bidang atau sektor (urusan pemerintah) yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Analisis terutama mengacu kepada anggaran belanja pemerintah daerah meskipun keterkaitan antara anggaran pemerintah daerah dengan anggaran pemerintah pusat perlu diperhatikan. Adapun analisis dilakukan terhadap realisasi anggaran dari APBD sebagai berikut :

3.1 Komposisi Penerimaan Anggaran Daerah

Kondisi APBD Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 menurut komponen pendapatan dapat dilihat pada gambar 51.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 51. Perkembangan Penerimaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Perkembangan penerimaan anggaran daerah Kabupaten Jombang tahun 2019 seperti pada gambar yaitu sebagian besar berasal dari dana perimbangan sebesar Rp.1.571.391.531.751,00 diikuti PAD sebesar Rp. 476.662.933.476,46 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 89.992.222.843,00. Proporsi komponen penerimaan anggaran daerah dalam APBD Kabupaten Jombang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Proporsi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Komponen	Proporsi dalam APBD (dalam %)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16,92	16,58	20,71	17,42	17,84
Dana Perimbangan	54,42	65,55	59,04	62,07	58,80
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	28,66	17,88	20,25	20,51	23,36

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Selama lima tahun struktur pendapatan tidak mengalami perubahan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran 2015-2019, proporsi pendapatan dalam APBD Kabupaten Jombang lebih banyak didominasi dari komponen dana perimbangan yang mana proporsi rata-rata di atas 50 persen, diikuti dengan Pendapatan Asli Daerah kemudian komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam memberikan kontribusi APBD Kabupaten Jombang.

Proporsi komponen-komponen dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kabupaten Jombang tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Proporsi Komponen PAD Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2019

Komponen	Proporsi dalam PAD (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pajak Daerah	22,07	24,45	21,22	27,34	27,93
Retribusi Daerah	10,97	11,20	8,06	9,52	7,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan	0,78	0,65	0,49	0,73	0,64
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	66,18	63,70	70,22	62,41	64,21

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Berdasarkan tabel 12, komponen PAD yang memiliki proporsi terbesar yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rata-rata proporsi di atas 60 persen, kemudian diikuti dengan komponen pajak daerah dengan rata-rata proporsi dalam kontribusi terhadap PAD di atas 20 persen. Perkembangan masing-masing komponen PAD Kabupaten Jombang menunjukkan fluktuasi dari tahun 2015-2019.

3.2 Distribusi Anggaran Belanja Menurut Fungsi

Berdasarkan komposisi belanja langsung dan tidak langsung pada APBD Kabupaten Jombang tahun 2014-2018, maka tampak kondisi seperti terlihat pada tabel 13

Tabel 13. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2018

Realisasi	Belanja Langsung		Belanja Tidak Langsung	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)		(3)	(4)
Tahun 2015	Rp. 914.694.820.830,20	42,2 5	Rp.1.250.258.205.803,00	57,75
Tahun 2016	Rp. 895.287.335.041,18	37,8 6	Rp.1.469.294.238.230,00	62,14
Tahun 2017	Rp.1.009.346.349.102,35	42,0 3	Rp.1.392.084.543.900,59	57,97
Tahun 2018	Rp. 935.792.097.324,38	39,75	Rp.1.418.316.856.374,00	60,25
Tahun 2019	Rp.1.137.929.782.111,84	40,65	Rp.1.661.482.399.831,02	59,35

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Berdasarkan tabel 13, selama periode 2015-2019 komponen belanja tidak langsung mendominasi realisasi belanja daerah dalam APBD Kabupaten Jombang. Realisasi belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung menunjukkan fluktuasi. Jika dibandingkan dengan proporsi pos belanja daerah tahun anggaran 2017, maka terdapat kenaikan proporsi belanja tidak langsung dari 57,97 persen pada tahun 2017 menjadi 60,25 persen pada tahun 2018, dan proporsi belanja langsung mengalami penurunan dari 42,03 persen pada tahun 2017 menjadi 39,75 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019, proporsi belanja langsung mengalami peningkatan dari 39,75 persen pada tahun 2018 menjadi 40,65 persen pada tahun 2019

Kondisi realisasi anggaran belanja menurut proporsi komponen-komponen pada belanja langsung dan tidak langsung dalam APBD tahun 2015-2019 Kabupaten Jombang ditunjukkan pada Tabel 14.

Tabel 14. Proporsi Komponen Belanja Anggaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

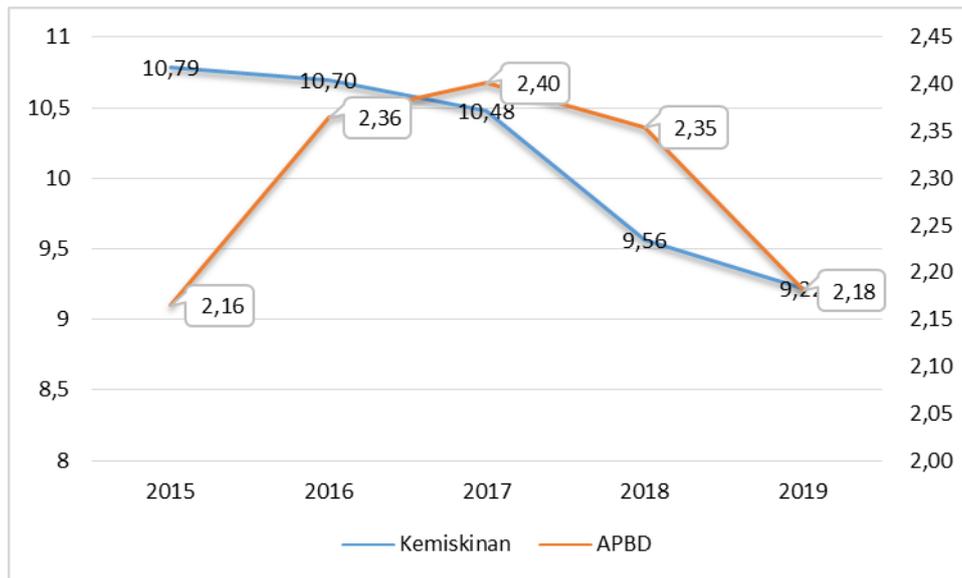
Komponen	Proporsi (dalam %)				
	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>Belanja Langsung:</u>					
1. Belanja Pegawai	2,32	2,39	3,48	10,35	3,74
2. Belanja Barang dan Jasa	21,31	20,04	22,43	58,26	25,84
<u>Belanja Tidak Langsung:</u>					
1. Belanja Pegawai	44,15	43,35	36,87	63,48	40,34
2. Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3. Belanja Hibah	2,37	2,70	2,81	6,82	2,29
4. Belanja Bantuan Sosial	0,07	0,12	0,17	0,34	0,14
5. Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Dapat diketahui bahwa belanja hibah dan bantuan sosial yang merupakan bagian dari belanja tidak langsung sebagai bagian dari APBD untuk masyarakat (miskin) masih menempati posisi yang relatif kecil selama kurun waktu tahun 2015-2019. Namun demikian kedua komponen tersebut persentase realisasi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

3.3 Efektivitas Perkembangan APBD Kabupaten Jombang

Analisis perkembangan APBD sebagai sumber daya pembangunan dilakukan untuk melihat efektivitasnya terhadap capaian indikator dan sasaran pembangunan. Relevansi antara perkembangan APBD dengan tingkat kemiskinan sebagai salah satu capaian indikator utama. Efektivitas perkembangan APBD terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 52.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 52. Analisis Efektivitas Perkembangan APBD terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

Perkembangan APBD Kabupaten Jombang dari tahun 2015-2017 sejalan dengan penurunan angka kemiskinan. Efektivitas perkembangan APBD terhadap penurunan tingkat kemiskinan dapat pada tahun 2016, anggaran belanja Kabupaten Jombang meningkat 9,22 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Jombang menurun 0,83 persen menjadi 10,70 persen. Pada tahun 2017, anggaran belanja Kabupaten Jombang meningkat 1,56 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Jombang menurun 2,06 persen menjadi 10,48 persen

Sedangkan pada penurunan APBD Kabupaten Jombang dari tahun 2018-2019 masih tetap diikuti dengan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2018, anggaran belanja Kabupaten Jombang menurun 1,97 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Jombang menurun 8,78 persen menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2019, anggaran belanja Kabupaten Jombang menurun 7,36 persen dan angka kemiskinan Kabupaten Jombang menurun 3,56 persen menjadi 9,22 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perkembangan APBD Kabupaten Jombang selama tahun 2015 – 2017 terakhir cukup signifikan dalam mendukung perkembangan pencapaian tujuan pembangunan khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.

3.4 Komposisi Anggaran Belanja Sektor

Komposisi anggaran belanja sektoral terdiri dari anggaran belanja bidang yang dapat memberikan intervensi terhadap penurunan angka kemiskinan. Bidang yang dapat memberikan intervensi meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketenagakerjaan dan bidang ketahanan pangan. Analisis perkembangan anggaran belanja khusus untuk bidang yang terkait dengan kemiskinan dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Distribusi Anggaran Belanja Menurut Bidang Kabupaten Jombang Tahun 2015-2019

Bidang	Anggaran per Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pendidikan	226.403.911. 102,00	258.502.281. 450,00	260.401.934.3 57,00	281.819.092.3 58,00	204,326,013, 864.00
Kesehatan	276.000.655. 307,15	329.247.277. 977,38	382.361.168.9 96,00	337.025.232.9 69,94	420,545,410, 493.21
Infrastruktur Dasar	331.825.318. 100,00	322.744.628. 440,00	360.179.325.6 30,00	791.036.833.5 72,50	191,489,381, 504.07
Ketenagakerjaan	2.123.311.80 0,00	3.235.000.00 0,00	2.061.453.894 ,00	2.061.453.894 ,00	2,548,932,82 6.00
Ketahanan Pangan	1.636.574.20 0,00	2.221.793.90 0,00	4.500.638.878 ,00	2.166.784.512 ,00	4,972,672,23 6.00
Jumlah	837.989.770. 509,15	915.950.981. 767,38	1.009.504.521 .755,00	1.414.109.397 .306,44	823,882,412, 942.28

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang terkait dengan bidang kemiskinan mengalami peningkatan khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Besaran anggaran per bidang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar Rp. 226.403.911.102,00. Pada tahun

2016, alokasi anggaran bidang pendidikan meningkat sebesar 14,18 persen menjadi Rp. 258.502.281.450,00. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang pendidikan meningkat sebesar 0,73 persen menjadi Rp. 260.401.934.357,00. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang pendidikan meningkat sebesar 8,22 persen menjadi Rp. 281.819.092.358,00. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang pendidikan menurun sebesar 27,50 persen menjadi Rp. 204.326.013.864,00.

Bidang kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 276.000.655.307,15 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 19,29 persen menjadi Rp. 329.247.277.977,38. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 16,13 persen menjadi Rp. 382.361.168.996,00. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang kesehatan menurun sebesar 11,86 persen menjadi Rp. 337.025.232.969,94. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 24,78 persen menjadi Rp. 420.545.410.493,21.

Pada bidang infrastruktur dasar, alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 331.825.318.100,00. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun sebesar 2,74 persen menjadi Rp. 322.744.628.440,00. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat sebesar 11,60 persen menjadi Rp. 360.179.325.630,00. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat sebesar 119,62 persen menjadi Rp. 791.036.833.572,50. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun sebesar 75,79 persen menjadi Rp. 191.489.381.504,07.

Pada bidang ketenagakerjaan, alokasi anggaran pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.123.311.800,00. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan meningkat sebesar 52,36 persen menjadi Rp. 3.235.000.000,00. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan turun sebesar 36,38 persen menjadi Rp. 2.061.453.894,00 dan alokasi anggaran pada tahun 2018 sama dengan alokasi anggaran pada tahun 2017. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan naik sebesar 23,65 persen menjadi Rp. 2.548.932.826,00.

Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.636.574.200,00. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan naik sebesar 35,76 persen menjadi Rp. 2.221.739.900,00. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan meningkat sebesar 102,57 persen menjadi Rp. 4.500.638.878,00. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan turun sebesar 51,86 persen menjadi Rp. 2.166.784.512,00. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan meningkat sebesar 129,50 persen menjadi Rp. 4.972.672.236,00

Dalam distribusi anggaran yang disajikan pada tabel, anggaran yang cukup besar pada alokasi anggaran infrastruktur dasar. Hal ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan infrastruktur dasar yang memadai karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Jombang terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat memberikan pengaruh positif antara lain meningkatnya kemudahan dan kelancaran transportasi antar wilayah karena adanya rehabilitasi dan peningkatan kondisi jalan dan jembatan serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat karena adanya fasilitasi penyediaan air bersih di daerah yang rawan air bersih maupun akses layanan sanitasi bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jombang. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dicapai melalui dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Proporsi anggaran belanja bidang intervensi kemiskinan terhadap APBD tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Proporsi Anggaran Belanja Bidang Intervensi terhadap APBD Kabupaten Jombang

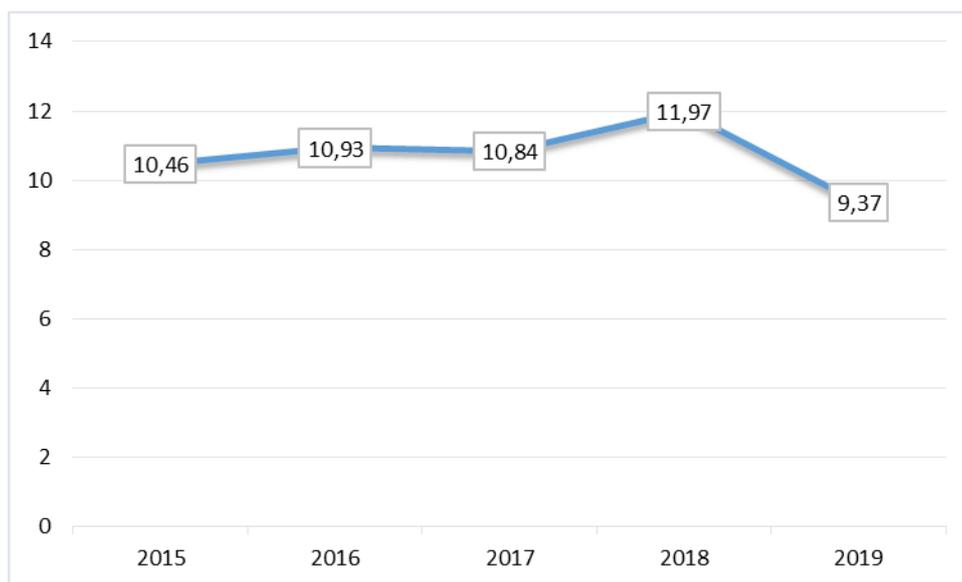
Bidang	Proporsi Anggaran Belanja Bidang Intervensi terhadap APBD				
	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
Pendidikan	10,46	10,93	10,84	11,97	9,37
Kesehatan	12,75	13,92	15,92	14,32	19,28
Infrastruktur Dasar	15,33	13,65	15,00	33,60	8,78
Ketenagakerjaan	0,10	0,14	0,09	0,09	0,12
Ketahanan Pangan	0,08	0,09	0,19	0,09	0,23

Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Dapat dilihat bahwa proporsi anggaran belanja sektoral bidang kemiskinan pada tahun 2019 yang terbesar yaitu bidang kesehatan sebesar 19,28 persen, diikuti bidang pendidikan sebesar 9,37 persen, bidang infrastruktur dasar sebesar 8,78 persen, bidang ketahanan pangan sebesar 0,23 persen dan bidang ketenagakerjaan sebesar 0,12 persen.

3.4.1 Anggaran Belanja Sektor Pendidikan

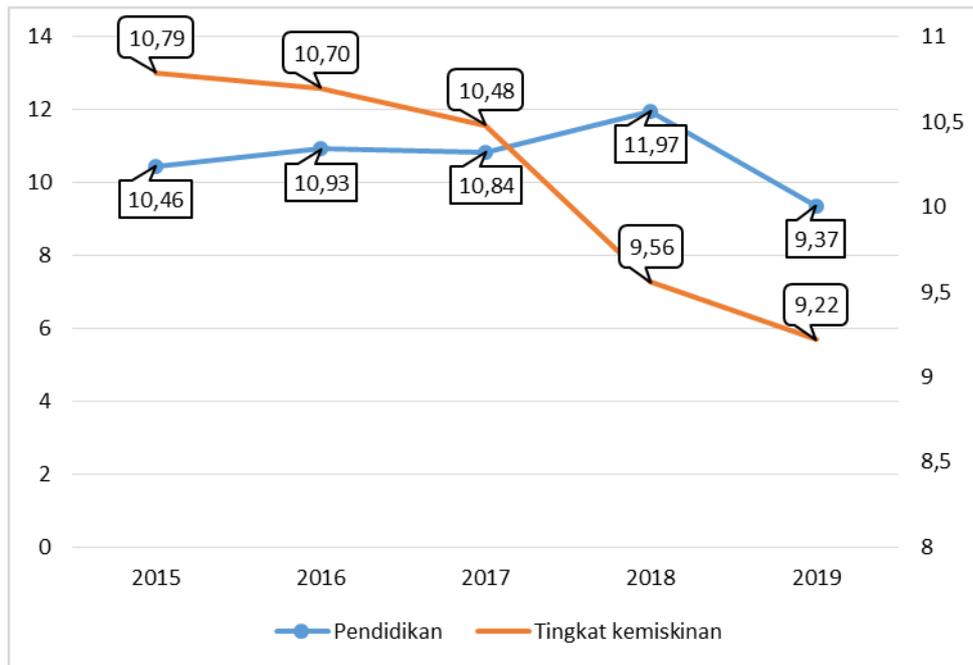
Kabupaten Jombang tidak mengedepankan sistem persentase dalam penganggaran namun lebih kepada sistem kebutuhan. Jika memang diperlukan oleh pendidikan di Kabupaten Jombang untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan maupun peningkatan kualitas pendidikan, anggaran tentunya akan dialokasikan. Perkembangan anggaran bidang pendidikan Kabupaten Jombang terus meningkat dari tahun 2014-2018. Alokasi anggaran bidang pendidikan ini digunakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan layanan dasar yang terjangkau dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang diarahkan pada pencapaian sasaran meningkatnya derajat pendidikan. Perkembangan alokasi anggaran belanja bidang pendidikan terhadap APBD Kabupaten Jombang cenderung meningkat tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada gambar 53.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 53. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Kabupaten Jombang

Jika dilihat pada gambar 53, alokasi anggaran terbesar yaitu pada tahun 2018 sebesar 11,97 persen dan alokasi anggaran terendah pada tahun 2019 sebesar 9,37 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang pendidikan terhadap APBD sebesar 11,97 persen meningkat sebesar 1,13 persen dibandingkan alokasi anggaran bidang pendidikan tahun 2017. Efektivitas alokasi anggaran belanja bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 54.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 54. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

Efektivitas anggaran belanja bidang pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan perkembangan alokasi anggaran bidang pendidikan dengan perkembangan penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2015 alokasi anggaran bidang pendidikan sebesar Rp. 226.403.911.102,00 (10,46 persen) dan angka kemiskinan sebesar 10,79 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang pendidikan meningkat menjadi Rp. 258.502.281.450,00 (10,93 persen) dan angka kemiskinan menurun menjadi 10,10 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang pendidikan meningkat sebesar 0,73 persen menjadi Rp. 260.401.934.357,00 dan angka kemiskinan menurun menjadi 10,48 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang pendidikan menjadi Rp. 281.819.092.358,00 (11,97 persen) dan angka kemiskinan menurun menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang pendidikan menurun sebesar 27,50 persen menjadi Rp. 204.326.013.864,00 dan angka kemiskinan tetap turun 3,56 persen menjadi 9,22 persen.

Peningkatan alokasi anggaran belanja bidang pendidikan pada APBD Kabupaten Jombang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang dari tahun

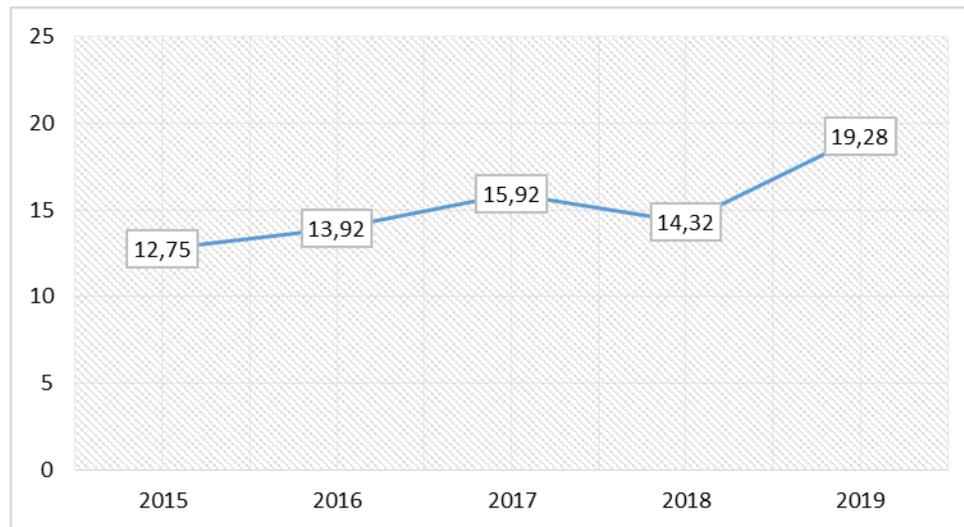
2015-2016 dan tahun 2017-2018, sementara pada 2018-2019 sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Alokasi anggaran belanja bidang pendidikan diarahkan pada sasaran meningkatnya partisipasi pendidikan dengan indikator meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Jombang. Anggaran belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan 17 program yang mendukung sasaran antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Program Pendidikan Non Formal; Program Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan; Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun; Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pembangunan/Peningkatan Perpustakaan Sekolah Dasar; Program Pembangunan/Peningkatan Lapangan Olahraga Sekolah Dasar; Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 6 Tahun; Program Peningkatan Sarana Penunjang Mutu Pendidikan Dasar 9 Tahun; Program Pengembangan Pendidikan Inklusi; Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (rehabilitasi Ringan); Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Rehabilitasi Sedang/Berat); Program Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar 6 Tahun (Pembangunan); Program Peningkatan Prasarana Penunjang Sekolah Dasar; dan Program Penunjang Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Dasar 6 Tahun.

3.4.2 Anggaran Belanja Sektor Kesehatan

Pembiayaan di bidang kesehatan dibiayai bersama-sama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Disamping itu, Pemerintah daerah mengupayakan pengembangan sumber dana yang tidak hanya dari pemerintah saja namun juga menjangkau sumber dana dari non pemerintah. Berbagai perbaikan terhadap derajat kesehatan, upaya dan sarana kesehatan telah dicapai sebagai hasil pembangunan kesehatan sejalan dengan perbaikan kondisi umum dan perbaikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang.

Penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Jombang telah dilaksanakan berdasarkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan sehingga juga berdampak pada pembangunan secara sektoral. Bagaimanapun, perkembangan kesehatan tetap merupakan kebutuhan masyarakat yang selalu ditingkatkan secara terus menerus searah dengan pembangunan daerah. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan program kesehatan adalah meningkatnya derajat kesehatan yang ditunjukkan dari tercapainya indikator derajat kesehatan.

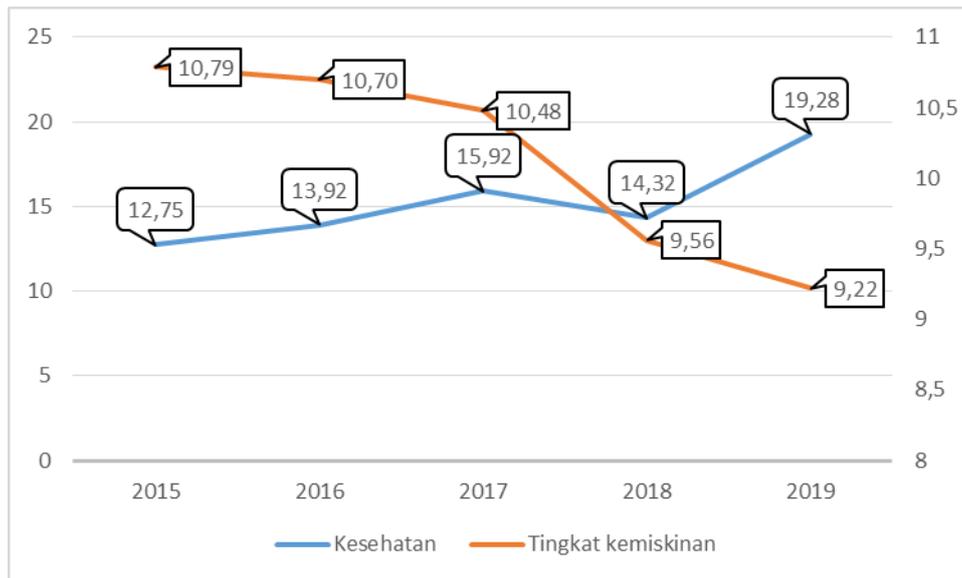
Persentase perkembangan alokasi anggaran belanja bidang kesehatan terhadap APBD Kabupaten Jombang dapat dilihat pada gambar 55.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 55. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Kesehatan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019

Jika dilihat pada gambar 55, alokasi anggaran terbesar yaitu pada tahun 2019 sebesar 19,28 persen dan alokasi anggaran terendah pada tahun 2015 sebesar 12,75 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 19,29 persen menjadi 12,75 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 16,13 persen menjadi 13,92 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang kesehatan terhadap APBD sebesar 14,32 persen turun sebesar 11,86 persen dibandingkan alokasi anggaran bidang kesehatan tahun 2017. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat sebesar 24,78 persen menjadi 19,28 persen. Efektivitas alokasi anggaran belanja bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 56.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 56. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

Efektivitas anggaran belanja bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan perkembangan alokasi anggaran bidang pendidikan dengan perkembangan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2015, alokasi anggaran bidang kesehatan sebesar 12,75 persen dan angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 10,79 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat menjadi 13,92 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 10,70 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang kesehatan meningkat menjadi 15,92 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 10,48 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang kesehatan turun sebesar 11,86 persen menjadi 14,32 persen dan angka kemiskinan tetap mengalami penurunan sebesar 3,56 persen menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang kesehatan naik menjadi 19,28 persen dan angka kemiskinan tetap mengalami penurunan menjadi 9,22 persen.

Perkembangan alokasi anggaran bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang ternyata tidak sejalan. Meskipun anggaran bidang kesehatan menurun tetapi angka kemiskinan di Kabupaten Jombang tetap mengalami penurunan. Hal ini terjadi pada tahun 2015-2017 dan 2018-2019. Sementara tahun 2017-2018 penurunan anggaran bidang Kesehatan masih diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan. Alokasi anggaran bidang kesehatan digunakan untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan didasarkan pada paradigma sehat, dimana upaya preventif dan promotif lebih dikedepankan tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Anggaran bidang kesehatan digunakan Dinas kesehatan beserta seluruh UPTD Kesehatan yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar baik UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) maupun UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) serta RSUD Jombang dan RSUD Ploso sebagai penyelenggara upaya kesehatan rujukan. Anggaran belanja digunakan untuk mewujudkan layanan dasar yang terjangkau dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan, yang diarahkan pada pencapaian sasaran Meningkatnya Usia Harapan Hidup, dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH).

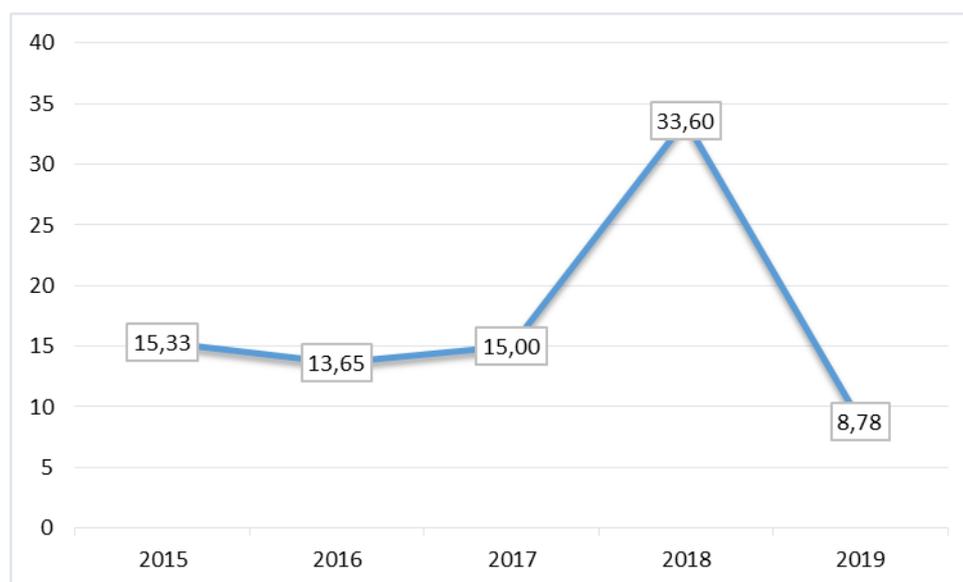
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan 11 program di tahun 2018 antara lain Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Program Pengawasan, Pengendalian Obat dan Kesehatan Makanan; Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi; Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular; Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya; Program Peningkatan Aparatur Kesehatan; Program Pembinaan Sosial Bidang Kesehatan.

Selain 11 program tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Masyarakat berbasis Kartu Jombang Sehat. Program ini telah melayani seluruh pengajuan pelayanan masyarakat miskin di kabupaten Jombang dengan persyaratan yang telah ditentukan. Program pelayanan bagi masyarakat miskin di kabupaten dalam bentuk Kartu Jombang Sehat (KJS) dilaksanakan dengan menggunakan Belanja Operasional RSUD Kabupaten Jombang sebesar Rp.8.123.875.428,17. Hasil dari program ini adalah seluruh pasien KJS telah mendapatkan pelayanan rujukan dengan baik. RSUD juga mampu melayani masyarakat kurang mampu (miskin). Pada tahun 2018 pasien Kartu Jombang Sehat yang mendapatkan pelayanan di RSUD Kabupaten Jombang sebanyak 3.587 pasien Rawat Jalan dan 1.187 Pasien Rawat Inap dengan Pelayanan Obat sebanyak 5.428 kali dan Pelayanan Penunjang sebanyak 421 kali layanan.

Dengan suksesnya Program Jaminan Kesehatan Nasional mengakibatkan terjadinya penurunan penggunaan fasilitas Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam bentuk Kartu Jombang Sehat ini. Hal ini selaras dengan program pemerintah dalam mensukseskan Program JKN.

3.4.3 Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar

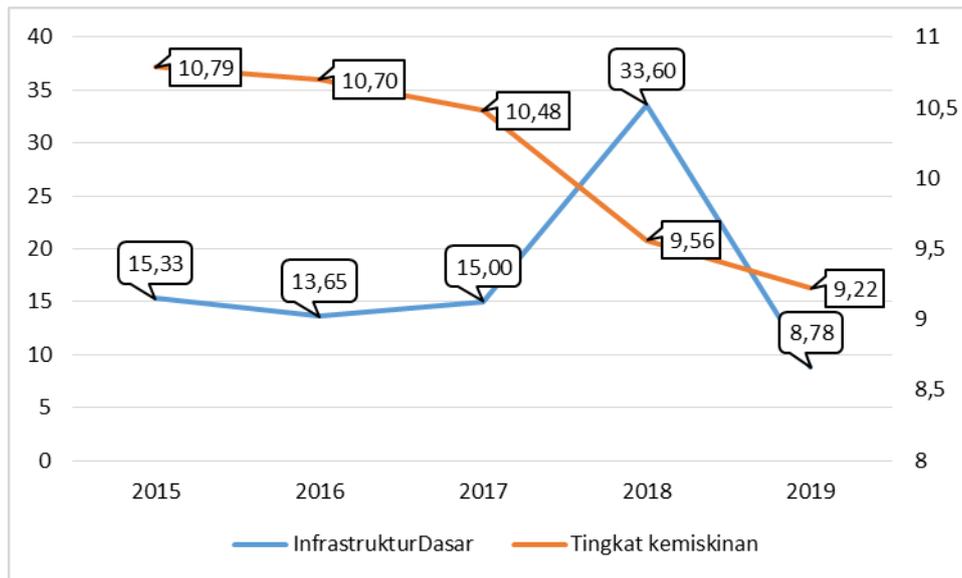
Perkembangan anggaran belanja bidang infrastruktur dasar di Kabupaten Jombang cenderung meningkat dari tahun 2015-2018. Pada tahun 2018 alokasi anggaran belanja bidang kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan berbagai program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dasar. Perkembangan alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur dasar terhadap APBD Kabupaten Jombang yang dapat dilihat pada gambar 3.7.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 57. Perkembangan Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Dasar Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019

Jika dilihat pada gambar 57, alokasi anggaran terbesar yaitu pada tahun 2018 sebesar 33,60 persen dan alokasi anggaran terendah pada tahun 2019 sebesar 8,78 persen. Pada tahun 2015 alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar sebesar Rp. 331.825.318.100,00 (15,33 persen). Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun sebesar 2,74 persen menjadi 13,65 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat sebesar 11,60 persen menjadi 15 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat sebesar 119,62 persen menjadi 33,60 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun sebesar 75,79 persen menjadi 8,78 persen. Efektivitas alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur dasar terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 58.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 58. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Infrastruktur Dasar terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

Efektivitas anggaran belanja bidang infrastruktur dasar terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan perkembangan alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar dengan perkembangan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2015, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar sebesar 15,33 persen dan angka kemiskinan sebesar 10,79 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar turun menjadi sebesar 13,65 dan angka kemiskinan menurun sebesar 0,83 persen menjadi 10,70 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat sebesar 11,60 persen menjadi 15,00 persen dan angka kemiskinan menurun menjadi sebesar 10,48 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat menjadi 33,60 persen dan angka kemiskinan sebesar 9,56 persen. Pada tahun 2019 alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun menjadi 8,78 persen dan angka kemiskinan menurun sebesar 3,56 persen menjadi 9,22 persen.

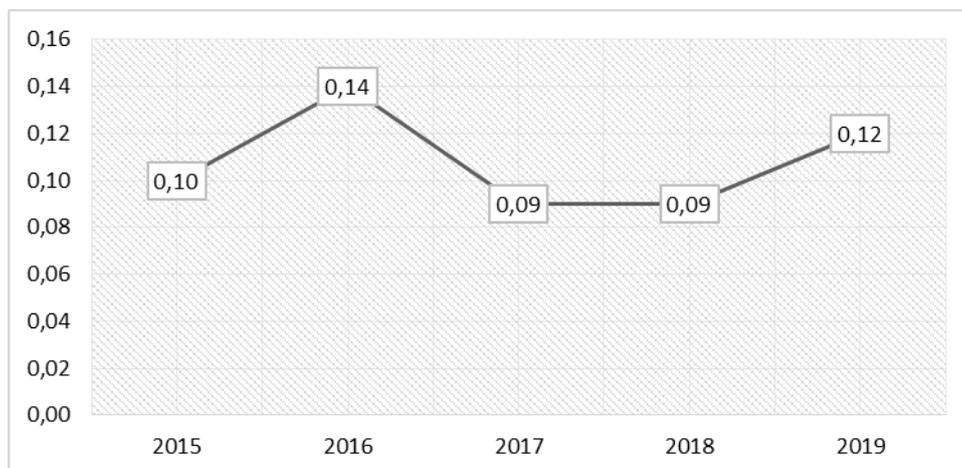
Peningkatan alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur dasar pada APBD Kabupaten Jombang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang terjadi pada tahun 2016-2018. Anggaran infrastruktur dasar diarahkan untuk menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan meningkatkan infrastruktur dasar yang memadai. Sementara pada tahun 2019, penurunan alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur dasar pada APBD Kabupaten Jombang tetap diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pada suatu wilayah, karena dengan adanya infrastruktur yang memadai akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jenis program yang dapat memberikan pengaruh positif dari adanya pembangunan infrastruktur antara lain naiknya produksi pertanian melalui rehabilitasi maupun pembangunan jaringan irigasi, adanya kemudahan dan kelancaran transportasi antar wilayah karena adanya rehabilitasi dan peningkatan kondisi jalan dan jembatan serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat karena adanya fasilitasi penyediaan air bersih di daerah yang rawan air bersih maupun akses layanan sanitasi bagi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Jombang.

Guna mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang adalah “Meningkatnya Infrastruktur Dasar Masyarakat dan Daerah”. Untuk mendukung sasaran tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan beberapa program yang mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung indikator penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang.

3.4.4 Anggaran Belanja Sektor Ketenagakerjaan

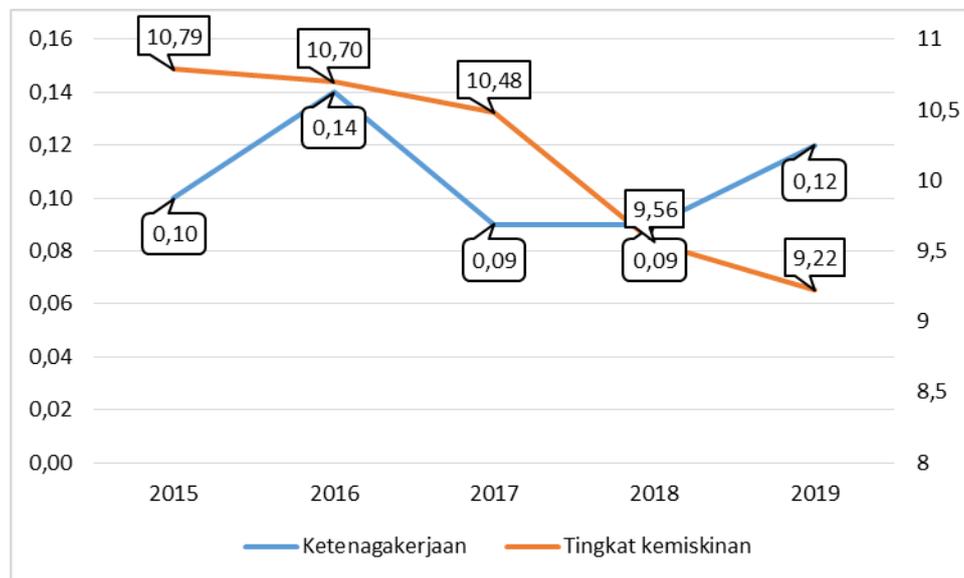
Perkembangan anggaran belanja sektor ketenagakerjaan pada meningkat tahun 2015-2016, selanjutnya menurun pada tahun 2017 dan tahun 2018. Perkembangan proporsi anggaran belanja sektor ketenagakerjaan terhadap APBD Kabupaten Jombang yang dapat dilihat pada gambar 59.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 59. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019

Jika dilihat pada gambar 59, alokasi anggaran terbesar yaitu pada tahun 2016 sebesar 0,14 persen dan alokasi anggaran yang terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 0,09 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan terhadap APBD sebesar 0,9 persen sama dengan alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan pada tahun 2017. Pada tahun 2019 alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan meningkat menjadi 0,12 persen. Efektivitas alokasi anggaran belanja bidang ketenagakerjaan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 60.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 60. Efektivitas Anggaran Belanja Bidang Ketenagakerjaan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

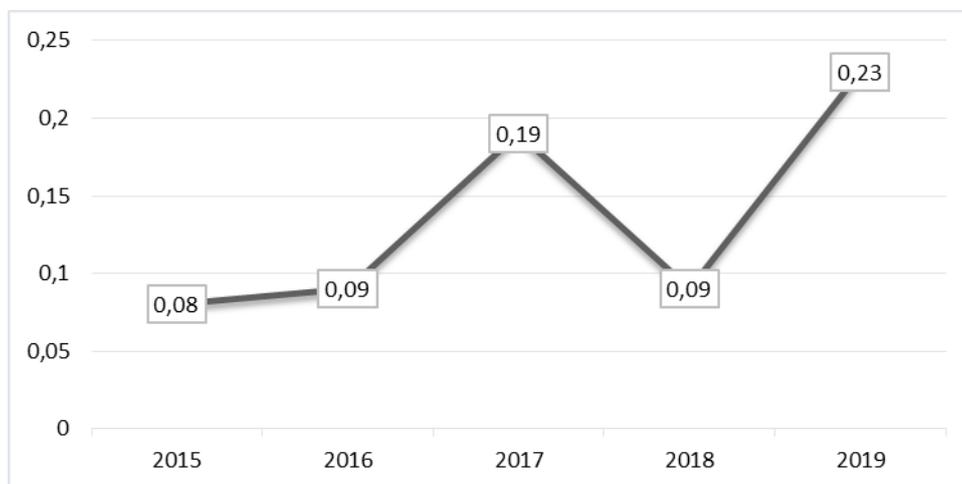
Efektivitas anggaran belanja bidang ketenagakerjaan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan perkembangan alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar dengan perkembangan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2015, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan sebesar 0,10 persen dan angka kemiskinan sebesar 10,79 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan meningkat sebesar 50,09 persen menjadi 0,14 persn dan angka kemiskinan turun 0,83 persen menjadi 10,70 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan turun sebesar 36,28 persen menjadi 0,09 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 10,48 persen. Meskipun pada tahun 2018 alokasi anggaran sama dengan alokasi anggaran pada tahun 2017, tetapi angka kemiskinan turun menjadi 9,56 persen menjadi 9,22 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan naik menjadi 0,12 persen dan angka kemiskinan turun sebesar 3,56 persen menjadi 9,22 persen.

Perkembangan anggaran belanja bidang ketenagakerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2017-2019. Namun anggaran bidang ketenagakerjaan digunakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung indikator bidang ketenagakerjaan yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Anggaran belanja bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mewujudkan layanan dasar yang terjangkau dengan tujuan terwujudnya pembangunan manusia yang berdaya saing dan berkelanjutan yang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Standar Hidup Layak atau Indeks Pengeluaran.

Arah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan daerah adalah dengan mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas-luasnya dan meningkatkan kapasitas ketrampilan dan sikap perilaku pencari kerja. Guna mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan 4 program yaitu Program Peningkatan Kesempatan Kerja; Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program pembinaan lingkungan sosial bidang tenaga kerja; dan Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

3.4.5 Anggaran Belanja Sektor Ketahanan Pangan

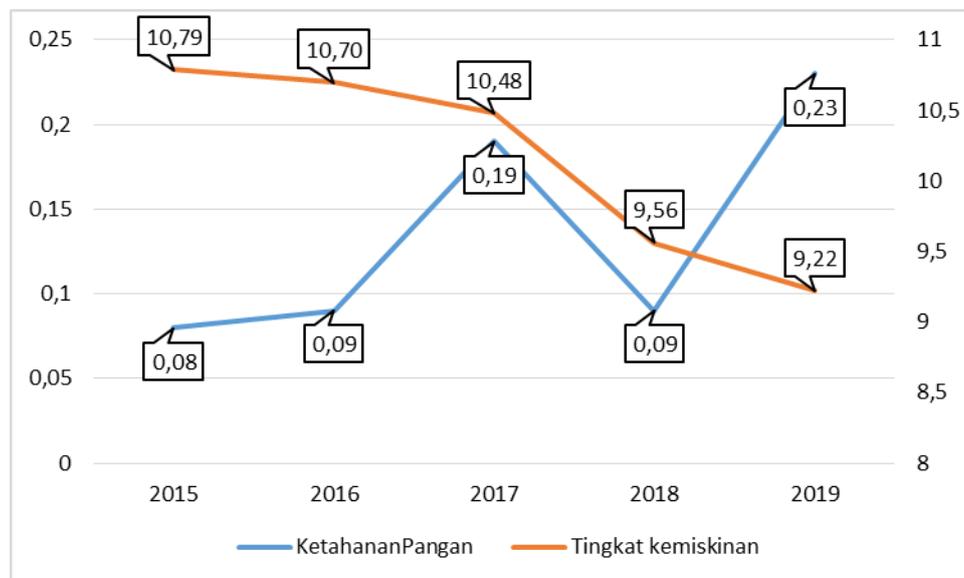
Perkembangan anggaran belanja sektor ketahanan pangan dari tahun 2015-2019 berfluktuasi, tahun 2015-2017 meningkat, kemudian turun pada tahun 2018 dan meningkat lagi pada tahun 2019. Perkembangan alokasi anggaran belanja bidang ketahanan pangan terhadap APBD Kabupaten Jombang yang dapat dilihat pada gambar 61.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 61. Perkembangan Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang, Tahun 2015-2019

Jika dilihat pada gambar, alokasi anggaran terbesar yaitu pada tahun 2019 sebesar 0,23 persen dan alokasi anggaran terendah pada tahun 2015 sebesar 0,08 persen. Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.636.574.200,00. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan naik menjadi 0,09. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan meningkat sebesar 102,57 persen menjadi 0,19 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan turun sebesar 51,86 persen menjadi 0,09 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan meningkat sebesar 129,50 persen menjadi 0,23 persen. Efektivitas alokasi anggaran belanja bidang ketahanan pangan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat pada gambar 62.



Sumber data: BPKAD Kabupaten Jombang (data diolah)

Gambar 62. Efektifitas Anggaran Belanja Bidang Ketahanan Pangan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang

Efektivitas anggaran belanja bidang ketahanan pangan terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari perbandingan perkembangan alokasi anggaran bidang ketahanan pangan dengan perkembangan penurunan angka kemiskinan. Alokasi anggaran bidang ketahanan pangan pada tahun 2015 sebesar 0,08 persen dan angka kemiskinan sebesar 10,79 persen. Pada tahun 2016, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan meningkat menjadi 0,09 persen dan angka kemiskinan turun sebesar 0,83 persen menjadi 10,70 persen. Pada tahun 2017, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan naik menjadi 0,19 persen dan angka kemiskinan turun 2,06 persen menjadi 10,48 persen. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan turun menjadi 0,09 persen dan angka kemiskinan turun sebesar 8,78 persen menjadi

9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan naik menjadi 0,23 persen dan angka kemiskinan tetap turun menjadi 9,22 persen.

Perkembangan anggaran belanja bidang ketahanan pangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2017-2018. Meskipun anggaran bidang ketahanan pangan menurun, namun tingkat kemiskinan juga turun. Anggaran bidang ketahanan pangan digunakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mewujudkan layanan dasar yang terjangkau dengan tujuan meningkatkan kemandirian pangan daerah dengan sasaran terwujudnya ketahanan pangan daerah. Untuk mewujudkan sasaran tercukupinya cadangan pangan pemerintah dan tercukupinya cadangan pangan masyarakat, pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan beberapa program antara lain Program Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan; Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan. Sedangkan untuk pencapaian sasaran yang ketiga yaitu Terwujudnya panganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan segar, Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan beberapa program antara lain: Program Panganekaragaman Pangan; Program Pembinaan lingkungan sosial bidang ketahanan pangan; dan Program Peningkatan Keamanan Pangan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH

4.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari pada tujuan pembangunan nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah. Penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jombang telah terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah yang tertuang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 hingga implementasinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang. Kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Jombang adalah sesuai dengan Visi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jombang yaitu: **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.”**

Dengan Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- b. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya
- c. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal dan Industri.

Tujuan:

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas,
2. Meningkatkan kualitas SDM
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
4. Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya
5. **Menurunkan Tingkat Kemiskinan**
6. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

Hubungan antara Misi dan Tujuan serta Sasaran dapat dilihat pada table 17.

Tabel 17. Matrik Hubungan Antara Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Jombang 2018-2023

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang Berkualitas	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Strategi 1: Memperkuat dan mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang didukung oleh ASN yang profesional guna menciptakan kelembagaan birokrasi berbasis digital yang menciptakan pelayanan masyarakat yang prima.
	Sasaran 2: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	
	Sasaran 3: Meningkatnya Profesionalitas Pegawai	
Misi 2: Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius dan berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas SDM	Sasaran 4: Meningkatnya Derajat Pendidikan	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
	Sasaran 5: Meningkatnya derajat Kesehatan	Strategi 3: Meningkatkan akses layanan dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
	Sasaran 6: Meningkatnya daya beli masyarakat	Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
	Sasaran 7: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8: kualitas kawasan permukiman	Strategi 3: Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan ekonomi yang merata untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat
Tujuan 4: Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya	Sasaran 9: Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, ketenteraman, keamanan, ketertiban umum dan kesadaran berbudaya	Strategi 2: Optimalisasi pemanfaatan nilai agama, ilmu pengetahuan- teknologi, budaya, dan modal sosial kemasyarakatan untuk peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang integratif dan menyeluruh dengan prespektif keadilan dan kesetaraan gender
Tujuan 5: Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Sasaran 10: Menurunnya jumlah penduduk miskin	Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif
Misi 3: Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri		
Tujuan 6: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Sasaran 11: Meningkatnya Investasi Daerah	Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan memitigasi resiko bencana
	Sasaran 12: Menurunnya Tingkat Pengangguran	
	Sasaran 13: Meningkatnya kunjungan wisata	Strategi 6: Pertumbuhan sektor unggulan ekonomi yang inklusif, akselerasi, dan berkelanjutan
	Sasaran 14: Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	
	Sasaran 15: Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur Untuk Daya Saing	Strategi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur sebagai penunjang hilirisasi dan interkoneksi untuk daya saing ekonomi dan produktivitas produk unggulan melalui peningkatan daya tarik investasi berwawasan lingkungan dan kemampuan

VISI : "Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing"		
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		memitigasi resiko bencana

Khusus untuk tujuan 5 yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dengan Sasaran menurunnya jumlah penduduk miskin dengan strategi Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif. Berdasarkan strategi yang telah ditentukan diatas, selanjutnya guna dapat implementasikan dalam mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Jombang maka strategi pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dalam program pembangunan daerah.

Tabel 18. Matrik Hubungan Strategi dan Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023

STRATEGI	PROGRAM
Strategi 4: Penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Produksi, Penerapan Standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM
	Program Pembinaan lingkungan Sosial Bidang Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Arah kebijakan pembangunan daerah penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam hal penanganan kemiskinan secara komprehensif tematik, terpadu, inklusif, dan partisipatif. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang berdasarkan isu strategis dan sasaran strategis berikut penjabaran program dan indikator program pembangunan daerah:

Tabel 19. Program dan Indikator Program Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jombang 2018-2023

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Program Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan pangan Masyarakat (kg/tribulan)
	Persentase informasi pasokan harga dan akses pangan
Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Jumlah ketersediaan energi perkapita perhari
	Jumlah Ketersediaan protein perkapita perhari
	Persentase penanganan desa cukup tahan pangan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketahanan Pangan	Persentase pelaku usaha olahan pangan lokal yang bersertiikasi

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Level klasifikasi kelas kelompok : utama, madya, lanjut, pemula
Program Penanganan Pasca Panen dan pemasaran Produk Pertanian	Persentase gabungan kelompok tani yang melaksanakan kemitraan pemasaran produk pertanian
	Nilai tambah produk pertanian
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro	Pertumbuhan volume usaha
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi pelatihan usaha bagi industri kecil dan menengah dari DBHCHT
	Prosentase peningkatan omset pelaku usaha komoditas lokal
Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemantauan Perdagangan	jml omzet penjualan pelaku usaha
Program pengembangan produksi, penerapan standarisasi dan Fasilitasi HKI bagi IKM	Prosentase peningkatan omzet produksi Industri kecil dan menengah
	Prosentase Jumlah tenaga kerja yang terserap sektor Industri kecil dan menengah
Program Pembinaan Industri	Prosentase Industri Hasil Tembakau yang memenuhi standar mutu
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
Program Pemberdayaan Sosial	% PSKS yg menyelenggarakan usaha kesos
	% LKS yg menyediakan pelayanan kesos sesuai standar
Program Pengembangan Perumahan	Persentase penanganan rumah tidak layak huni
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Pencari Kerja yang Ditempatkan sesuai Kualifikasi
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase peserta pelatihan yang bersertifikasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Prosentase peserta pelatihan yang ditempatkan dari DBHCHT
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan rentang koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Angka Melek Huruf
Program peningkatan mutu pendidikan dasar 6 tahun	Rata-rata Nilai USBN SD/MI
	Rata-rata Nilai USBN SD/MI
Program Peningkatan Mutu	Rata-rata Nilai UN/US SMP/MTs

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Pendidikan Dasar 9 tahun	Nilai Rapor Mutu Sarana Prasarana SMP Negeri/Swasta

Adapun regulasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jombang untuk mendukung kebijakan dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Jombang

No .	Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati	Peraturan Tentang	Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SK Bupati No.188.4.45/234/415.10.10/2014	Penetapan Database Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang	Database penduduk miskin Kabupaten Jombang dalam rangka pemberian pelayanan jaminan kesehatan berupa KJS (Kartu Jombang
2.	Perbup No. 5A Tahun 2015	JaminanKesehatan	Pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau bagi penduduk miskin
3.	Perbup No. 8 Tahun 2016	Perubahan Atas Perbup No. 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan	
4.	Perbup No. 14A Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Perbup No. 5A Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan	
5.	Perbup No. 1 Tahun 2017	JaminanKesehatan	
6.	SK BupatiNo.188.4.45/196/415.10.3.4/2017	Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jombang	Koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang
7.	Perbup No. 20 Tahun 2019	Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terintegrasi	Peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan kemiskinan di Kabupaten Jombang

4.2 Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah di berbagai tingkatan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) telah menetapkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui strategi penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan makro dalam strategi penurunan kemiskinan yaitu menjaga stabilitas makro ekonomi, stabilisasi harga, penciptaan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dan pengembangan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan kebijakan mikro diarahkan pada dua hal yaitu menurunkan beban pengetahuan dan meningkatkan pendapatan.

Kebijakan dalam menurunkan beban pengeluaran terdiri dari 4 program sebagai berikut:

1. Bantuan pangan (Rastra) atau Bantuan Program Non Tunai (BPNT)
2. Bantuan Tunai Bersyarat (PKH)
3. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kartu Indonesia Sehat
4. Bantuan Tunai Pendidikan Kartu Indonesia Pintar

Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat miskin dan rentan masuk ke dalam kelompok menengah. Kebijakan dalam meningkatkan pendapatan terdiri dari 4 program sebagai berikut:

1. Peningkatan akses permodalan
2. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran
3. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha
4. Pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan.

Dalam memperkuat proses penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten Jombang, TKPKD Kabupaten Jombang melakukan analisis kemiskinan (menganalisis dan mendiagnosis kondisi kemiskinan suatu daerah), perencanaan (menghasilkan indikasi intervensi program/kegiatan berdasarkan analisis kemiskinan, penganggaran (merumuskan alokasi anggaran berdasarkan jenis dan volume program/kegiatan), monitoring (memantau progress program/kegiatan dari sisi penyerapan anggaran), evaluasi (mengukur efektivitas program dan kegiatan dibandingkan permasalahan kemiskinan).

Kegiatan yang telah dilakukan TKPKD Kabupaten Jombang dalam penanggulangan kemiskinan antara lain:

1. Menganalisis kondisi kemiskinan di Kabupaten Jombang sesuai dengan bidang indikator kemiskinan.
2. Memfasilitasi proses perencanaan dan penganggaran yang *pro-poor* oleh SKPD terkait.
3. Menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah oleh OPD terkait yang terintegrasi dengan RPJMD,
4. Melakukan advokasi pemantauan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan.
5. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan didaerah (LP2KD)
6. Penguatan *data base* kemiskinan (Dinas Sosial)

BAB V
KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

5.1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Agar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bisa berjalan baik dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan, maka membutuhkan adanya keterpaduan dan sinergitas antar *stakeholder* yang terlibat, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Keterpaduan dan sinergitas ini akan terwujud bila terdapat koordinasi yang baik dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan agar lebih terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah, maka pada tahun 2010 dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya diubah menjadi Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2015, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, di tingkat pusat dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan di tingkat daerah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (TKPKD). Tim ini memiliki fungsi dan tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang di daerah disebut LP2KD.

Koordinasi yang dilakukan TKPKD terkait penanggulangan kemiskinan meliputi koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang pemberdayaan masyarakat, koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya

5.1.1 Koordinasi di Tingkat Daerah

Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Jombang telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan SPKD (Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sebagai dasar penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah);
 - d. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota. Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi:
 - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penang-gulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penang-gulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan;
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi.

Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk:

1. Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi.
2. Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan.
 - b. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri:
- a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial.

Masing-masing kelompok program bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai pembedangannya.

5.1.2 Koordinasi di Tingkat Provinsi dan Pusat

Karena tugas TKPKD sebagian besar terkait dengan koordinasi penanggulangan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Jombang umumnya berupa:

1. Pelaporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
2. Koordinasi dengan kelembagaan di tingkat Provinsi dan Pusat.
3. Koordinasi permasalahan kemiskinan terkini.
4. Mensinergikan program-program penanggulangan kemiskinan baru.

Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Jombang melibatkan seluruh unsur yang terlibat dalam struktur TKPKD Kabupaten Jombang. Selaku penanggungjawab, Bupati Jombang berperan penting dalam menggerakkan seluruh elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang.

Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Jombang juga melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pihak swasta maupun secara mandiri (swadaya masyarakat).

5.2 Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan mengamati pencapaian indikator program dan kegiatan dalam tahapan sebagai berikut:

1. masukan (*input*);
2. kegiatan (*process*);
3. keluaran (*output*);
4. sasaran (*outcome*);
5. tujuan (*goals*).

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan terhadap:

1. monitoring terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
2. monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan bersasaran;
3. evaluasi terhadap output program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di setiap bidang Perangkat Daerah;
4. evaluasi terhadap capaian indikator-indikator (*outcome*) kemiskinan.

Metode yang digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi antara lain:

1. survey: mengumpulkan informasi yang relevan dari responden yang diperoleh dari sampel yang representative
2. metode partisipatif: mendapatkan informasi dengan cara pelibatan secara intensif dan observasi langsung dalam kurun waktu tertentu
3. analisis anggaran: menganalisis item-item pengeluaran program dan membandingkan dengan rencana awal
4. kunjungan lapangan (*spot check /rapid appraisal*): Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya. Perolehan informasi secara cepat dari penerima program dan pemangku kepentingan lainnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinator Program dalam TKPK bersama dengan Perangkat Daerah terkait yang menjadi Satuan Kerja (Satker) pelaksana dari setiap Program dan kegiatan dimaksud. Secara rutin setiap tiga bulan TKPK Kabupaten Jombang melakukan rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerja Kabupaten Jombang.

5.3 Penanganan Pengaduan Masyarakat

Secara luas, pengertian pengaduan masyarakat pada program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang adalah langkah-langkah tindakan masyarakat yang ditujukan pada Pemerintah Kabupaten Jombang, menyangkut:

1. Upaya masyarakat untuk memperoleh informasi/kejelasan mengenai suatu program/kegiatan atau pelayanan yang terkait dengan masyarakat miskin;
2. Upaya masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan yang diterima oleh masyarakat miskin;
3. Upaya masyarakat untuk menyampaikan komplain terkait dengan kerugian yang di alami oleh masyarakat miskin akibat pelaksanaan pembangunan.

Penanganan pengaduan masyarakat di Kabupaten Jombang secara umum sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dengan tenaga pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan azas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Tetapi khusus terkait dengan penanggulangan kemiskinan penanganan pengaduan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu – Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT-Puskesmas). Melalui program SLRT – Puskesmas dapat dilakukan beberapa hal yaitu:

1. Melalui Puskesmas, melayani, mendata, mencatat merujuk permasalahan orang miskin dan tidak mampu serta perempuan dan anak korban kekerasan.
2. *Ter-update* nya data kemiskinan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) *Next Generation* (NG) (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPPFM-OTM)).
3. Memastikan keluhan masyarakat miskin, orang tidak mampu, perempuan dan anak korban kekerasan tertangani dengan baik.

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas berdasarkan Permensos 15 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat daerah Kabupaten/Kota.
2. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas.
3. Memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan/nama lain atau daerah di Daerah/ Kabupaten/Kota melalui SLRT.

4. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga Non-Pemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan atau Kabupaten.
5. Mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di tingkat desa/kelurahan.

Masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keluhan dapat melakukan pengaduan melalui *call centre*, media sosial, dan *whatsapp*.

BAB VI PENUTUP

6.1 Prioritas Intervensi Sektoral

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,76 persen per-tahun;
2. Tahun 2019, persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang mengalami penurunan sebesar 3,56% terhadap kondisi tahun 2018;
3. Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 1,34 mengalami penurunan sebesar 0,43 jika dibandingkan dengan tahun 2018;
4. Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2019 adalah sebesar 0,53 mengalami peningkatan sebesar 0,23 jika dibandingkan dengan tahun 2018.
5. Perkembangan antar waktu dari indikator bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Perkembangan antar waktu dari indikator bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan infrastruktur dasar

Bidang	Indikator	Perkembangan Antar Waktu
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
Ketenagakerjaan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian tahun 2019 4,39 persen, menurun 0,356 persen dibandingkan tahun 2018. <i>Trend</i> secara keseluruhan menurun (membaik), namun masih di bawah capaian Provinsi Jawa Timur.
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Trend peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan rata-rata 1,51 persen per tahun
Pendidikan	APK SD/MI	• Fluktuatif, Tren cenderung turun dengan Rata-rata penurunan 2,4

Bidang	Indikator	Perkembangan Antar Waktu
(1)	(2)	(3)
		persen per tahun.
	APK SMP/MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,0 persen per tahun • Capaian tahun 2019, naik sebesar 7,2 persen menjadi 103,62
	APK SMA/MA	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,75 persen per tahun • Capaian tahun 2019 naik 4,06 persen menjadi 92,97 dari capaian tahun 2018.
	APM SD/MI	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,64 persen per tahun • Capaian 2019 meningkat 0,68 persen menjadi 97,15 persen.
	APM SMP/MTs	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata peningkatan sebesar 2,1 persen per tahun • Capaian tahun 2019 naik 0,52 persen menjadi 82,84 persen
	APM SMA/MA	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata peningkatan sebesar 3.21 persen per tahun • Capaian tahun 2019 naik 2,50 persen menjadi 73,57 persen.
	Angka Melek Huruf (AMH)	<ul style="list-style-type: none"> • Trend cenderung naik • Capaian 2019 naik 0,69 persen

Bidang	Indikator	Perkembangan Antar Waktu
(1)	(2)	(3)
		menjadi 96,20 persen.
Kesehatan	AKI per 100 KH	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun sebesar 2,27 persen per tahun • Capaian tahun 2019 sebesar 71,64 persen, turun 21,31 persen dari capaian tahun 2018.
	Prevalensi Gizi Buruk pada Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun dengan rata-rata sebesar 0,05 persen per tahun • Capaian tahun 2019 sebesar 0,29 persen, naik 0,17 persen dari capaian tahun 2018
	Prevalensi Gizi Kurang pada Balita	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata 0,21 persen per tahun • Capaian tahun 2019 sebesar 5,29 persen, naik 0,98 persen dari capaian tahun 2018
	Persalinan ditolong Tenaga Medis	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata sebesar 0,53 persen per tahun • Capaian tahun 2019 sebesar 97,00 persen, naik 3,45 persen dari capaian tahun 2018.
Ketahanan Pangan	Harga beras	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,09 persen per tahun • Capaian tahun 2019 sebesar Rp. 9.166,00, turun 0,08 persen dari capaian tahun 2018
	Produksi Padi	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun dengan rata-rata sebesar 5,36 persen per tahun

Bidang	Indikator	Perkembangan Antar Waktu
(1)	(2)	(3)
		<ul style="list-style-type: none"> • Capaian tahun 2019 turun 28,02 persen dari capaian tahun 2018
Infrastruktur Dasar	Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,66 persen per tahun
	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,98 persen per tahun
	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah tercapai 100 persen mulai tahun 2016
	Proporsi Rumah Tangga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Tren cenderung turun dengan rata-rata penurunan sebesar 0.29 persen per tahun

6.2. Implikasi Penyesuaian Program Dan Anggaran Belanja

Sebagai konsekuensi dari prioritas intervensi sektoral dalam penanggulangan kemiskinan, maka implikasi terhadap penyesuaian program dan anggaran belanja, kedepan agar seluruhnya bersinergi menuju pada sasaran. Implikasi program dan anggaran belanja terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jombang Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang pendidikan menjadi Rp. 281.819.092.358,00 (11,97 persen) dan angka kemiskinan menurun menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang pendidikan menurun sebesar 27,50 persen menjadi Rp. 204.326.013.864,00 dan angka kemiskinan tetap turun 3,56 persen menjadi 9,22 persen. Peningkatan alokasi anggaran belanja bidang pendidikan pada APBD Kabupaten Jombang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang dari tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2018, sementara pada 2018-2019 tidak sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan.

2. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang kesehatan turun sebesar 11,86 persen menjadi 14,32 persen dan angka kemiskinan sebesar 9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang kesehatan naik menjadi 19,28 persen dan angka kemiskinan tetap mengalami penurunan menjadi 9,22 persen. Perkembangan alokasi anggaran bidang kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang ternyata tidak sejalan. Meskipun anggaran bidang kesehatan menurun tetapi angka kemiskinan di Kabupaten Jombang tetap mengalami penurunan. Hal ini terjadi pada tahun 2015-2017 dan 2018-2019. Sementara tahun 2017-2018 penurunan anggaran bidang Kesehatan masih diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan.
3. Pada tahun 2018, alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar meningkat menjadi 33,60 persen dan angka kemiskinan sebesar 9,56 persen. Pada tahun 2019 alokasi anggaran bidang infrastruktur dasar menurun menjadi 8,78 persen dan angka kemiskinan menurun sebesar 3,56 persen menjadi 9,22 persen. Peningkatan alokasi anggaran belanja bidang infrastruktur dasar pada APBD Kabupaten Jombang sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang terjadi pada tahun 2016-2018.
4. Anggaran belanja sektor ketenagakerjaan pada tahun 2018 sama dengan alokasi anggaran pada tahun 2017, tetapi angka kemiskinan turun menjadi 9,56 persen menjadi 9,22 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketenagakerjaan naik menjadi 0,12 persen dan angka kemiskinan turun menjadi 9,22 persen. Perkembangan anggaran belanja bidang ketenagakerjaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2017-2019.
5. Anggaran belanja sektor ketahanan pangan pada tahun 2018 turun menjadi 0,09 persen dan angka kemiskinan turun sebesar 8,78 persen menjadi 9,56 persen. Pada tahun 2019, alokasi anggaran bidang ketahanan pangan naik menjadi 0,23 persen dan angka kemiskinan tetap turun menjadi 9,22 persen. Perkembangan anggaran belanja bidang ketahanan pangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang pada tahun 2017-2018. Meskipun anggaran bidang ketahanan pangan menurun, namun tingkat kemiskinan juga turun.

6.3. Rencana Koordinasi Dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Belum tercapainya target penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jombang secara kuantitatif maupun kualitatif maka mengharuskan Kabupaten Jombang untuk melakukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Mengingat kondisi kemiskinan yang bersifat multi dimensi, maka memerlukan rencana koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan yang langkah-langkah ditempuh sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi antar *stakeholders* terkait, khususnya SKPD yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Jombang, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan semakin efektif.
2. Mengembangkan kerja sama dengan kalangan profesional, dunia usaha (pemilik modal) dan tokoh-tokoh masyarakat lokal/lembaga lain dalam program-program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya gerakan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Laporan Akhir Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Jombang Tahun 2019
2. Ridwan Maulana, "*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur*", July 2022, Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, DOI: 10.58192/profit.v1i3.349
3. Rinaldo Isnawan Prasetyono, Dyah Anggraini, "*Analisis Peramalan Tingkat Kemiskinan di Indonesia dengan Model ARIMA*", January 2021 Jurnal Ilmiah Informatika Komputer 26(2):95-110, DOI: 10.35760/ik.2021.v26i2.3699
4. Palupi Lindiasari Samputra, Adis Imam Munandar, "*Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*", January 2019, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 12(1), DOI: 10.24843/JEKT.2019.v12.i01.p04"
5. Evawaty Tanuar, Violitta Yesmaya, Edy Irwansyah, "*Hubungan Partisipasi Sekolah dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*", November 2016, Conference: National Conference On Corporate Social Responsibility 2016, Jakarta, Indonesia, Volume: 1
6. Desak Ayu Sriary Bhegawati, Desak Made Sukarnasih, "*Kajian Kemiskinan di Indonesia yang dimediasi oleh adanya pengangguran*", July 2022, Widya Amerta 9(1):56-68, Jurnal Fakultas Ekonomi "Widya Amerta", DOI: 10.37637/wa.v9i1.988
7. Mas'udin Mas'udin, "*Peran belanja pemerintah pusat dalam pengurangan tingkat kemiskinan di indonesia*", November 2017, Jurnal Manajemen Keuangan Publik 1(2):1, DOI: 10.31092/jmkp.v1i2.100
8. Prof. Dr. Susetiawan, et.al, "*Tinjauan Terhadap Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*", March 2013, Project: Strategic Alliance for Poverty Allievation Research (PSPK UGM - PSSAT UGM - SAPA - FORD FOUNDATION)
9. Putri Yaumul Pahlawan, Ratna Ratna, "*Pengaruh Tingkat Pendidikan, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia periode 2012-2017*", January 2020, DOI: 10.29103/jmpe.v1i2.882
10. Arif Rahman, dkk, September 2022, "*Anomali pengaruh sektor industri terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*", September 2022, SOROT 17(2):91, DOI: 10.31258/sorot.17.2.91-103
11. Wawan Kurniawan, November 2017, "*pengaruh pembangunan sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di indonesia (Dengan Kewilayahan Sebagai Variabel Moderasi)*", Jurnal Litbang Sukowati Media Penelitian dan Pengembangan 1(1):22-38, DOI: 10.32630/sukowati.v1i1.3
12. M Rafi Farrel Fuady, Mirza Fuady, Fahmi Aulia, "*Kemiskinan Multi Dimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia*", November 2021 Jurnal Tataloka 23(4):575-582, DOI: 10.14710/tataloka.23.4.575-582

PROFIL PENULIS



Nama : Dr. Sunardi, SE., MM.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Lengkap : Jl. Danau Paniai H4 E14 RT/RW:003/010 Madyopuro,
Kedungkandang

Alamat Kantor : Jl. Terusan Raya Dieng No.62-64, Pisang Candi, Sukun,
Kota Malang, Kode Pos. 65146

Telepon : +62 812-5218-443

Tempat / Tanggal Lahir : Tulungagung, 19-08-1961

Status : Menikah

Alamat Domisili : Jl. Danau Paniai H4 E14 RT/RW:003/010 Madyopuro,
Kedungkandang

Email : sunardi@unmer.ac.id



ZENIUS
PUBLISHER

Jl. Gentong Desa Waruoyom Kecamatan Depok
Kabupaten Cirebon, Kodepos 45653
email: zenius955@gmail.com
web: zeniuspublisher.com

ISBN 978-623-5264-21-9



9 786235 264219